

Bunga Rampai: Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

Siti Yumnah - Khoirul - Wonadi Idris - Siti Halimah

Mansyur - Dedi Eko Riyadi - Moh Yasin

Badrut Tamam - Muhammad Arbain - Istifadah

Ahmad Abrar Rangkuti - Jakaria Umro



Cipta Media Nusantara

Bunga Rampai: Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam

viii + 275 Halaman, 15,5 x 23 cm
Terbit Pertama, November 2022

ISBN : 978-623-8041-14-5

Penulis : Siti Yumnah- Khoirul - Wonadi Idris -
Siti Halimah - Mansyur - Dedi Eko Riyadi - Moh
Yasin - Badrut Tamam - Muhammad Arbain -
Istifadah - Ahmad Abrar Rangkuti - Jakaria Umro
Editor : Abdul Khakim, S.Pd.
Tata Letak : Rinasheeqa
Desain Sampul : Nabilx

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

Cipta Media Nusantara

Anggota IKAPI: 270/JTI/2021

Alamat : Jl. Jemurwonosari 1/39, Wonocolo, Surabaya

Email : contact@ciptapublishing.id

Web : www.ciptapublishing.id

© All Rights Reserved

Ketentuan Pidana Pasal 112-119

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Dunia pendidikan tidak terlepas dari kurikulum yang menjadi acuan. Kurikulum merupakan rancangan pembelajaran. Sebagai kerangka vital dalam berjalannya sebuah pendidikan, hendaknya manajemen kurikulum dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar hasil pembelajarannya lebih efektif.

Pengembangan kurikulum wajib untuk terus dilakukan demi tercapainya sistem pendidikan yang lebih baik. Pengembangan kurikulum tentu saja tidak dapat terlepas dari kondisi yang terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pengembangan kurikulum pun mencakup aspek yang lebih kompleks.

Manajemen kurikulum tidak hanya harus dilaksanakan oleh sekolah umum, melainkan juga institusi pendidikan berbasis Islam. Manajemen kurikulum pendidikan Islam dimaksudkan agar proses pendidikan yang berlangsung dapat terarah serta terkoordinasi secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya dengan mempertimbangkan nilai-nilai keislaman.

Kurikulum memang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kebijakan tersebut. Namun, dalam pengimplementasiannya, kurikulum dapat dikembangkan oleh pelaku pendidikan yang lain, terutama guru. Guru dapat

menyesuaikan kurikulum yang sudah ditetapkan dengan kondisi peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih mudah dalam mencapai tujuan.

Kumpulan tulisan dalam buku ini membahas banyak hal mengenai manajemen kurikulum dalam pendidikan Islam. Banyak hal yang dapat kita pelajari mulai dari hal mendasar sampai pada ujung tombaknya. Mulai dari hakikat manajemen kurikulum hingga bagaimana mengimplementasikannya dalam institusi pendidikan berbasis Islam.

DAFTAR ISI

BAB I HAKIKAT MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Oleh: Siti Yumnah.....	1
A. Pengertian Manajemen Kurikulum.....	1
B. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum	3
C. Prinsip Manajemen Kurikulum	11
D. Fungsi Manajemen Kurikulum.....	13
E. Kedudukan Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan.....	15

BAB II LANDASAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Oleh: Khoirul	19
A. Diskursus Landasan Kurikulum.....	19
B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam.....	23
C. Landasan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.....	25

BAB III PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

Oleh: Wonadi Idris.....	37
A. Pengertian Kurikulum PAI.....	37
B. Ruang Lingkup Materi dalam Kurikulum PAI	42
C. Fungsi Kurikulum PAI.....	45
D. Komponen Kurikulum PAI	46
E. Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum PAI.	48
F. Guru PAI dan Perubahan Kurikulum.....	54

BAB IV PERAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Oleh: Siti Halimah	61
A. Pengertian Peran.....	61
B. Pengertian Kepala Sekolah.....	62
C. Ciri-Ciri atau karakteristik Kepala Sekolah.....	64
D. Syarat Kepala Sekolah.....	66
E. Fungsi Kepala Sekolah.....	68
F. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah	72
G. Kompetensi Kepala Sekolah	79
H. Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum.....	80

BAB V PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA

Oleh: Mansyur	87
A. Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia	87
B. Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia	89
C. Dinamika Eksistensi Madrasah di Indonesia	92
D. Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah.....	105

BAB VI KOMPONEN-KOMPONEN DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

Oleh: Dedi Eko Riyadi HS	113
A. Komponen-Komponen Kurikulum.....	113
B. Model Pengembangan Kurikulum.....	124

BAB VII DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN	
Oleh: Moh Yasin.....	135
A. Pengertian Desain Kurikulum.....	135
B. Prinsip-Prinsip Desain Kurikulum.....	136
C. Model Desain Kurikulum	137
BAB VIII PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI PESANTREN, SEKOLAH DAN MADRASAH	
Oleh: Badrut Tamam.....	149
A. Pengertian dan Anatomi Pengembangan Kurikulum	149
B. Pengembangan Kurikulum Pesantren	154
C. Manajemen Prosedur Pengembangan Kurikulum Pesantren, Sekolah dan Madrasah	161
BAB IX PRAKTIK PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA	
Oleh: Muhammad Arbain.....	169
A. Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan	169
B. Landasan Pengembangan Kurikulum	171
C. Praktik Perkembangan Kurikulum di Indonesia	182
BAB X SUMBER DAYA PENDUKUNG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM	
Oleh: Ahmad Abrar Rangkuti.....	195
A. Hakikat Kurikulum.....	195
B. Implementasi Kurikulum.....	198
C. Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum.....	204

BAB XI PENGEMBANGAN TUJUAN DAN KONTEN KURIKULUM

Oleh: Istifadah.....	221
A. Merumuskan Maksud, Tujuan dan Sasaran Kurikulum.....	221
B. Menentukan Konten Kurikulum.....	232
C. Representasi Pengembangan Tujuan dan Konten Kurikulum.....	239

BAB XII PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER

Oleh: Jakaria Umro	245
A. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter .	245
B. Nilai-Nilai Pembentukan Pendidikan Karakter.....	250
C. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter	254
D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter di Tingkat Satuan Pendidikan	255
E. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah.....	261
DAFTAR PUSTAKA.....	264
PROFIL PENULIS	266

BAB I

HAKIKAT MANAJEMEN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Siti Yumnah



A. Pengertian Manajemen Kurikulum

Secara etimologi, kata manajemen berasal, salah satunya, dari Bahasa Italia, *maneggiare*. Kata ini mengandung arti mengendalikan. Konteks yang digunakan dalam kata *maneggiare* terutama adalah mengendalikan kuda, yang kata itu sendiri oleh sebagian kalangan diyakini berasal dari Bahasa Latin, *manus* yang berarti tangan (Sarinah & Mardalena, 2017).

Sementara, menurut istilah, manajemen memiliki arti yang cukup beragam. Keragaman pengertian manajemen ini dipengaruhi oleh sudut pandang, keyakinan, serta pemahaman subjektif orang-orang yang mendefinisikan atau yang membuat definisi tersebut.

Akan tetapi, secara umum, manajemen diartikan sebagai proses pengelolaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil serta demi mencapai tujuan-tujuan dengan cara melibatkan orang lain (Hambali & Mu'alimin, 2020).

Malayu S.P Hasibuan, sebagaimana dikutip U. Saefullah, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu (Saefullah, 2012). Selain itu beberapa ahli memberikan pengertian manajemen sebagai berikut:

1. Menurut Terry manajemen merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Nur Zazin, 2018).
2. Menurut Stoner manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Shimatul Ula, 2013).
3. Menurut Burhanuddin manajemen sebagai usaha pencapaian tujuan yang diinginkan dengan membangun suatu lingkungan yang *favorable* terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok terorganisir ((Shimatul Ula, 2013).
4. Menurut Gibson manajemen sebagai suatu proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain (Sulistyorini, 2006).

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli, maka manajemen bisa diartikan sebagai seni, ilmu dan proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan sebagai pengendalian terhadap orang-orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kurikulum sendiri, harus diselenggarakan secara efektif. Apabila pengelolanya seorang profesional, akan menghasilkan kurikulum yang siap untuk diujicobakan ataupun diterapkan pada sasaran yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 mendefinisikan kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan

pendidikan tertentu". Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya (Agustinus, 2014).

Manajemen kaitannya dengan kurikulum berarti merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan dititik beratkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Manajemen kurikulum menunjuk pada fungsi-fungsi manajemen. Terdapatnya lima fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, dan *controlling* (Daryanto & Farid, 2013).

Dengan demikian, manajemen kurikulum menekankan pada suatu sistem kurikulum yang berorientasi pada produktivitas, dimana kurikulum tersebut berorientasi pada peserta didik, kurikulum dibuat agar dapat membuat peserta didik dapat mencapai tujuan hasil belajar. Kurikulum merupakan upaya untuk mengurus, mengatur, dan mengelola perangkat mata pelajaran yang akan diajarkan pada lembaga pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Ruang lingkup dari manajemen kurikulum ini ialah perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang secara umum banyak digunakan di berbagai situasi dalam sebuah organisasi. Berikut penjelasan secara rinci terhadap ruang lingkup manajemen kurikulum sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

1. Perencanaan Kurikulum

Maksud manajemen dalam perencanaan kurikulum ialah keahlian mengelola dalam arti kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional. Hamalik menyatakan bahwa dalam perencanaan kurikulum hal pertama yang dikemukakan ialah berkenaan dengan kenyataan adanya gap atau jurang antara ide-ide strategi dan pendekatan yang dikandung oleh suatu kurikulum dengan usaha-usaha implementasinya. *Gap* ini disebabkan oleh masalah keterlibatan personal dalam perencanaan kurikulum yang banyak bergantung pada pendekatan perencanaan kurikulum yang dianut (Hamalik, 2010).

Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan kurikulum, yaitu pendekatan yang bersifat *administrative approach* dan pendekatan yang bersifat *grass roots approach*. Pendekatan yang bersifat *administrative approach* kurikulum direncanakan oleh pihak atasan kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawahan sampai kepada guru-guru. Jadi *from the top down*, dari atas ke bawah atas inisiatif para administrator. Dalam hal ini tidak banyak yang dapat dilakukan oleh bawahan dalam melakukan perencanaan kurikulum, karena atasanlah yang memiliki kuasa penuh dalam melakukan perencanaan tersebut. Pendekatan yang bersifat *grass roots approach* yaitu, dimulai dari bawah. Pendekatan ini menekankan pada perencanaan kurikulum yang melibatkan bawahan bahkan pada tingkat guru-guru untuk dapat bersama-sama memikirkan ide baru mengenai kurikulum dan bersedia menerapkannya untuk meningkatkan mutu pelajaran.

Selanjutnya, J.G. Owen yang dikutip oleh Hamalik, menjelaskan bahwa perencanaan kurikulum yang profesional harus menekankan pada masalah bagaimana menganalisis kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perencanaan kurikulum. Terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kurikulum, yaitu:

- a. Kondisi sosiokultural, yakni kondisi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral dimana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan atau guru dengan murid dengan lingkungannya.
- b. Kondisi fasilitas, kondisi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya *gap* antara perencanaan kurikulum dengan para pelaksana kurikulum terutama guru-guru. Fasilitas yang perlu diperhatikan terutama adalah ketersediaan buku-buku teks, peralatan laboratorium, dan alat-alat praktikum lainnya, dana, sarana, dan prasarana sebagai pertimbangan.

2. Organisasi Kurikulum

Kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan sebaiknya berisi tentang bahan belajar, program pembelajaran, hasil pembelajaran yang diharapkan, reproduksi kebudayaan, tugas dan konsep yang mempunyai karakteristik tersendiri, serta memberikan bekal untuk kecakapan hidup (*life skill*).

Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Rusman memberikan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pelajaran, kontinuitas kurikulum yang berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, keseimbangan bahan pelajaran, dan alokasi waktu yang dibutuhkan (Rusman, 2011).

Organisasi kurikulum, yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran disusun dan disampaikan kepada murid-murid, merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program pengajaran-pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Dalam penyusunan organisasi kurikulum ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yakni :

- a. Ruang lingkup (*Scope*); Merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang harus dipelajari siswa. Ruang lingkup bahan pelajaran sangat tergantung pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai.
- b. Urutan bahan (*Sequence*); Berhubungan dengan urutan penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar proses belajar dapat berjalan dengan

lancar. Urutan bahan meliputi dua hal yaitu urutan isi bahan pelajaran dan urutan pengalaman belajar yang memerlukan pengetahuan tentang perkembangan anak dalam menghadapi pelajaran tertentu.

- c. Kontinuitas; Berhubungan dengan kesinambungan bahan pelajaran tiap mata pelajaran, pada tiap jenjang sekolah dan materi pelajaran yang terdapat dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Kontinuitas ini dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- d. Keseimbangan; Adalah faktor yang berhubungan dengan bagaimana semua mata pelajaran itu mendapat perhatian yang layak dalam komposisi kurikulum yang akan diprogramkan pada siswa. Keseimbangan dalam kurikulum dapat ditinjau dari dua segi yakni keseimbangan isi atau apa yang dipelajari, dan keseimbangan cara atau proses belajar.
- e. Integrasi atau keterpaduan; Yang berhubungan dengan bagaimana pengetahuan dan pengalaman yang diterima siswa mampu memberi bekal dalam menjawab tantangan hidupnya, setelah siswa menyelesaikan program pendidikan disekolah (Nurgiantoro, 1988).

Secara akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi, sebagai berikut:

- a. Kurikulum mata pelajaran, yang terdiri dari sejumlah mata ajaran secara terpisah.
- b. Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan mata ajaran sejenis.
- c. Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu.

- d. *Core curriculum*, yakni kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.

Pada tahap pengorganisasian dan koordinasi ini merupakan tahap yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh kepala madrasah. Kepala madrasah berkewajiban untuk mengelola dan mengatur penyusunan kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan madrasah.

3. Implementasi Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Minarti, 2011).

Nana yang dikutip oleh Rusman, mengemukakan bahwa untuk mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan rancangan, dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Oemar Hamalik berpendapat bahwa, pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat madrasah dan tingkat kelas. Dalam tingkat madrasah yang berperan adalah kepala madrasah dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Pada tingkat madrasah, kepala madrasah melaksanakan kegiatan kurikulum diantaranya adalah menyusun rencana kegiatan tahunan, menyusun rencana pelaksanaan program/unit,

Sebagus apapun desain kurikulum yang dibuat semua tergantung kepada guru. Guru adalah kunci utama keberhasilan implementasi kurikulum.

menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, mengatur alat perlengkapan pendidikan, melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan, merencanakan usaha-usaha peningkatan mutu guru. Pada tingkat kelas guru melaksanakan kurikulum dengan melakukan proses kegiatan belajar mengajar, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan evaluasi tahap akhir.

Implementasi kurikulum mencakup tiga tahapan pokok yaitu:

- a. Pengembangan program, mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu ada juga program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum catur wulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

4. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang

sistematik tentang manfaat, kesesuaian efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan *reliable* untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut.

Evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, yang bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta memperbaiki metode pendidikan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektifitas dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai bahan pembuat keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu revisi atau kurikulum tersebut harus diganti dengan kurikulum yang baru. Evaluasi kurikulum juga penting dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan kebutuhan pasar yang berubah.

Menurut Stufflebeam yang dikutip oleh Rusman, tujuan utama evaluasi kurikulum ialah memberi informasi terhadap pembuat keputusan, atau untuk penggunaannya dalam proses menggambarkan hasil, dan memberikan informasi yang berguna untuk membuat pertimbangan berbagai alternatif keputusan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan

untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Untuk perbaikan program, bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan.

C. Prinsip Manajemen Kurikulum

Pendidikan Islam dibangun atas dasar pemikiran yang Islami, bertolak dari pandangan hidup dan pandangan tentang manusia, serta diarahkan kepada tujuan pendidikan yang dilandasi kaidah-kaidah Islam. Dikutip Sulistyorini dari Abdurrahman al-Nahlawi, prinsipnya sebagai berikut (Sulistyorini, 2009):

1. Sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan fitrah manusia,
2. Hendaknya mengacu kepada pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam,
3. Kurikulum disusun secara bertahap mengikuti periodisasi perkembangan peserta didik,
4. Kurikulum hendaknya memperhatikan kepentingan nyata masyarakat seperti kesehatan, keamanan, administrasi dan pendidikan khususnya.
5. Kurikulum hendaknya terstruktur dan terorganisir secara integral,
6. kurikulum hendaknya realistis, artinya: kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan berbagai kemudahan yang dimiliki setiap negara yang melaksanakannya,

7. Metode pendidikan yang merupakan salah satu komponen kurikulum hendaknya dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi lokal,
8. Efektif untuk mencapai tingkah laku dan emosi yang positif,
9. Memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik, baik fisik, emosional ataupun intelektualnya,
10. Kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek tingkah laku alamiah Islam.

Sepuluh prinsip kurikulum yang dikemukakan diatas tampaknya sudah meliputi apa yang secara teknis disebut landasan kurikulum (yakni filosofis, dan landasan sosial) dan prinsip-prinsip umum kurikulum. Kemudian yang dimaksud dengan prinsip-prinsip umum kurikulum ialah prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis atau efisiensi dan prinsip efektivitas. Terdapat lima prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu sebagai berikut (Rusman, 2009):

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
5. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum.

D. Fungsi Manajemen Kurikulum

Fungsi kurikulum untuk sekolah bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman untuk mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari (Hidayat, 2013).

Fungsi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui

kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dengan pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

E. Kedudukan Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan

Dalam masyarakat, baik dinegara-negara maju maupun yang sedang berkembang terdapat kepercayaan bahwa, pendidikan merupakan sarana pencerahan bangsa serta kesadaran adanya hubungan pendidikan dengan kemajuan suatu negara. Pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran (Reksoatmodjo, 2010).

Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Agar pendidikan yang dilaksanakan dapat berjalan mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu dibentuk kurikulum. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), pasal 1, butir 19, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atas dasar pengertian tersebut, inti kurikulum sebenarnya adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu banyak kaitannya dengan melakukan proses pembelajaran.

Kurikulum dan pembelajaran dipersiapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat hidup di masyarakat (Sanjaya, 2008). Maka kurikulum dibentuk untuk mengarahkan segala bentuk aktivitas pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu

pembentukan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa memegang peranan penting dalam pendidikan. Maka kurikulum sebagai pedoman dan pembelajaran sebagai prosesnya, harus mampu mengantarkan anak didik menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas, terampil dan berbudi luhur, berilmu, bermoral, tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik semata, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami, diterima, dan dilakukan.

Sehingga kurikulum dan pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam keseluruhan pendidikan, akan tetapi keberadaan kurikulum tetap saja hanya sebagai alat (instrumental) yang bersifat statis dan pembelajaran sebagai proses dari kurikulum yang bersifat kontekstual. Kurikulum akan bermakna ketika benar-benar dapat terimplementasikan dengan baik dan tepat dalam setiap proses pembelajaran serta dapat berjalan efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Agustinus, Hermino. 2014. *Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daryanto & Farid, Mohammad. 2013. *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: Gava Media
- Hamalik, Oemar. 2010. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hambali, Muh. & Mu'alimin. 2020. *Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer*. Yogyakarta: IRCiSoD
- Hidayat. Sholeh. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri* Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Nurgiyantoro, Burhan. 1988. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta: BPFE
- Reksoatmodjo, Tedjo Narsono. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- S, Syamsu. (2019). "Manajemen Kurikulum Pendidikan Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Palopo", PALITA: Journal of Social-Religion Research Aprilr 2019, Vol.4, No.1
- Saefullah, U. 2012. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Kencana.
- Sarinah & Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish

- Sulistyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam*, Surabaya: TERAS
- Ula, S. Shimatul. 2013. *Manajemen Pendidikan Efektif*, Yogyakarta: Berlian
- Zazin, Nur, 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, Malang: Edulitera

BAB II

LANDASAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Khoirul



A. Diskursus Landasan Kurikulum

1. Pengertian Landasan

Landasan secara esensial merupakan tumpuan dasar atau tempat pijakan, sedangkan (Yatimah, 2017:354) mengatakan landasan adalah dasar, tumpuan, atau alas, oleh karena itu landasan pendidikan merupakan tempat bertumpu atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Dalam Bahasa Inggris landasan disebut *fondation* yang berarti fondasi, kemudian dalam Bahasa Arab landasan disebut dengan قاعدة memiliki arti basis, hal ini sepadan dengan sinonim yang ada di Bahasa Indonesia.

Dalam KBBI landasan berarti alas, tumpuan, atau dasar. Perlu diketahui bahwa kata landasan termasuk sebuah homonim karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, sebagaimana contoh “pesawat mendarat di landasan dengan selamat” yang dimaksud landasan disini adalah alas atau tempat lapangan terbang.

Contoh lainnya
“landasan hukum
negara kita ialah
pancasila dan UUD
1945” maka landasan
yang dimaksud adalah
tumpuan atau dasar.

Penulis hanya ingin mengatakan bahwa kata landasan secara harfiah memiliki ejaan dan pelafalan yang sama akan

tetapi maknanya berbeda sesuai dengan konteks/kata sesudahnya. Sebagaimana bila dikaitkan dengan pendidikan maka, landasan pendidikan adalah acuan konsep dasar yang menjadi pijakan atau titik tolak dalam rangka studi dan praktik pendidikan (Amos N & Amalia A, 2017:3). Maka dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau pijakan yang dapat mendukung terwujudnya suatu tujuan terkhusus di dunia pendidikan.

2. Pengertian Kurikulum

Dalam Bahasa Prancis, kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti berlari. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu *curir* yang memiliki arti pelari dan *curere* "tempat berpacu", dalam hal ini kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis *start* sampai dengan *finish* untuk memperoleh medali atau penghargaan (Zainal Arifin, 2014:2). Yang dimaksud jarak tempuh dalam pendidikan ditafsirkan dengan program sekolah dan seseorang yang terlibat di dalamnya. Program tersebut berisi mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu.

Hal yang perlu diketahui istilah kurikulum itu baru muncul di kamus Webster pada tahun 1856 yang memiliki definisi lebih kearah dunia olahraga sebagaimana yang penulis paparkan diatas dan istilah kurikulum di Indonesia boleh dikatakan baru populer sejak tahun lima puluhan, sebelumnya dikenal dengan sebutan rencana pelajaran (S. Nasution, 2014:2). Pada hakikatnya kurikulum sama artinya dengan rencana pembelajaran, sebagaimana pendapat Hilda Taba dalam bukunya *Curriculum Development Theory and*

Practive yang mengartikan sebagai “*a plan for learning*” sesuatu yang direncanakan untuk pelajaran anak.

Sedangkan kurikulum dalam perspektif Yuridis formal saat ini tentang sistem pendidikan nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, metode, serta pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003). Oleh karenanya kurikulum dalam pembelajaran dan pelaksanaannya sangat diperlukan untuk memaksimalkan tercapainya suatu tujuan.

Penulis menyimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat program yang di dalamnya terdapat program pembelajaran dalam pendidikan yang kemudian dirancang, dikembangkan, dan dimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Namun penafsiran terhadap kurikulum dapat ditinjau dari segi kurikulum sebagai produk, sebagai program, sebagai hal yang diinginkan bagi siswa, dan sebagai pengalaman siswa. Adapun rincian dari segi penafsiran masing-masing diatas sebagai berikut:

- a. Kurikulum sebagai produk yakni, sebagai hasil karya para pengembangan kurikulum hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum. Yang berupa dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar.
- b. Kurikulum sebagai program merupakan alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya, misalnya berupa mata pelajaran dan dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi

perkembangan siswa contoh pramuka, latihan dasar kepemimpinan, pertandingan, dan perkumpulan sekolah yang bisa mencapai tujuan sekolah.

- c. Kurikulum sebagai hal yang diinginkan bagi siswa yaitu hasil akibat usaha belajar siswa yang memperoleh kepandaian atau ilmu untuk merubah tingkah laku yang disebabkan pengalaman belajar. Jadi dapat mewujudkan perubahan yang baik berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang disebabkan oleh pengalaman belajar.
- d. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yaitu, serangkaian proses dan peristiwa yang dialami oleh setiap peserta didik dalam ruang lingkup tertentu dengan metode yang digunakan. Sebagai konsekuensinya apa yang direncanakan dalam kurikulum dengan metode yang digunakan belum tentu berhasil sebagaimana yang diharapkan (Lise C & Ferdi Hardian P, 2019:5).

Hal ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi seperti halnya kompetensi guru dalam menerapkan dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Artinya sebaik apapun kurikulumnya bila tidak didukung oleh guru yang profesional tentu tidak banyak memberikan makna dan pengaruh terhadap peserta didik. Ini juga berlaku terhadap kurikulum pendidikan agama Islam yang tentu dalam pengembangannya harus memperhatikan hal-hal tersebut, agar dapat mencapai tujuan utama kurikulum pendidikan nantinya.

B. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan rancangan pendidikan dan pembelajaran yang berisi *learning program* (program pembelajaran), *learning experience* (pengalaman belajar), dan *planned learning program* (perencanaan program pembelajaran). Kurikulum pendidikan agama Islam juga suatu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh *kaffah*. Tentu itu semua sesuai dengan sistem kurikulum nasional, bahwa isi kurikulum setiap jenis dan jenjangnya wajib memuat pendidikan agama tidak terkecuali Islam.

Dengan adanya kurikulum Pendidikan agama Islam tersebut, akan memberikan *output* kepada peserta didik menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, memiliki keterampilan dalam hidup yang dijiwai oleh ajaran Islam dan nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sehingga menjadi pribadi yang paripurna (Agus Zainul Fitri, 2013:71). Dalam konsep Islam, iman merupakan potensi rohani yang harus diaktualisasikan dalam bentuk amal shaleh, sehingga menghasilkan prestasi rohani (iman) yang disebut taqwa.

Terlepas dari hal diatas, kurikulum pendidikan agama Islam semua aktivitas, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama yang berupa alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, oleh karena itu adanya kurikulum pendidikan agama Islam dalam mencapai tujuannya tentu disesuaikan pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan pelajarannya.

Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam tersebut secara umum adalah membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik jasmani maupun ruhani, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, dan alam semesta (Haidar Putra D, 2014:15). Tujuan pendidikan agama Islam juga tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat.

Sebenarnya tujuan pendidikan agama Islam tidak lain adalah tujuan merealisasikan identitas Islam, dan Identitas Islam itu sendiri pada hakikatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati.

Tujuan akhir pendidikan Islam terletak dalam perwujudan ketertundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas atau kelompok, maupun seluruh umat manusia.

Secara analitis bahwa tujuan pendidikan Islam yang ingin diwujudkan terlihat pada tujuan akhir (*ultimate aims of education*). Pada tataran konseptual normatif, nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam tujuan pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang bersifat fundamental, seperti nilai-nilai sosial, ilmiah, moral, dan agama. Karena pendidikan memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menciptakan seluruh aspek.

Ibnu Taimiyah lebih menyederhanakan tujuan pendidikan Islam dalam tiga tujuan pokok yaitu yang *Pertama*, membentuk individu muslim. *Kedua*, membentuk umat muslim. *Ketiga*, dakwah Islam sedunia (Nur Kholik, 2020:243). Hal yang diperhatikan dalam pendidikan agama Islam harus

mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya serta penerapannya dalam realitas kehidupan yang bertujuan menciptakan suatu sikap tanggung jawab untuk menghadapi berbagai tantangan dunia nyata. Pengembangan ilmu pengetahuan tersebut sebagai suatu keperdulian pendidikan agama Islam agar manusia mampu menghadapi kondisi dan situasi sosial budaya yang terus berubah.

C. Landasan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Landasan dalam kurikulum terkhususnya terhadap pendidikan agama Islam tentu mengacu pada standar nasional pendidikan yang ada, untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Tujuan pendidikan Nasional di atas sejalan dengan tujuan pendidikan agama Islam yaitu membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam serta dapat memiliki kecerdasan berfikir (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan Spiritual (SQ) untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Di dalam landasan kurikulum pendidikan agama Islam tentu akan mengarah pada tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang nantinya akan membingkai seluruh kurikulum PAI melalui proses KBM termasuk di dalamnya terdapat materi, media, metode, sarana-prasarana, dan evaluasi yang akan menjadi standar dalam tolak ukur pencapaiannya dalam mengembangkan kurikulum pendidikan agama islam.

Sebuah landasan dalam kurikulum pendidikan agama Islam sangatlah penting karena menjadi tumpuan nilai-nilai operasionalisasi sistem pendidikan agama Islam sendiri, sebagaimana halnya dasar atau pondasi rumah yang menjadi kekuatan utama suatu bangunan sehingga mampu berdiri kokoh dan kuat. Landasan dalam pengembangan kurikulum bagaikan mata uang satu sisi dengan sisi lainnya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Adapun yang menjadi pondasi utama atau disebut juga sebagai landasan kurikulum dalam pendidikan agama Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Landasan tersebut juga disebut dengan landasan religius, rincian dari landasan tersebut sebagaimana berikut:

1. Al-Qur'an

Secara etimologi al-Qur'an berasal dari bahasa Arab *qara yaqra'u*, *qur'an* yang berarti bacaan atau yang harus dibaca. Sedangkan secara terminologi adalah firman-firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir dengan perantaraan al-Amin Jibril a.s. yang tertulis dalam mushaf yang disampaikan kepada manusia secara mutawatir, yang dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya yang dimulai dengan surat al-Fatihah dan di tutup dengan surat al-Nas.

Al-Qur'an menjelaskan pemberian keterangan secara memuaskan dan rasional disertai dengan perangsang emosi

dan kesan insani. Dengan demikian maka al Qur'an mendidik akal dan emosi sejalan dengan fitrah manusia dan tidak membebani diluar kemampuannya guna membangun peradaban dan budaya manusia. (Jumadi, 2020: 25). Sebagaimana isyarat yang terdapat di dalam al-Qur'an bahwa tujuan terpenting al-Qur'an adalah mendidik manusia dengan metode mengajak membaca, belajar, menelaah dan observasi secara ilmiah tentang penciptaan manusia sejak masih dalam kandungan.

Sebagaimana firman Allah

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

Artinya

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajari (Manusia) dengan pena, Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq/96:1-5).

Berdasarkan ayat di atas bahwa hendaknya manusia meyakini akan adanya Tuhan pencipta manusia (dari segumpal darah), selanjutnya untuk memperkokoh keyakinan dan memelihara agar tidak luntur, hendaknya melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan bahan (materi) pendidikan agar manusia hidup sempurna di dunia. Allah juga telah memberikan potensi pada diri manusia berupa akal untuk dapat meningkatkan kualitas dan mencapai kemampuan intelektual menuju masyarakat yang penuh peradaban, material, dan spiritual dalam artian antara dunia dan akhirat seimbang.

Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan yang paling utama. Al-Qur'an merupakan petunjuk yang kompleks pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Keuniversalan pengetahuan ajarannya mencakup ilmu yang tinggi dan sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya hanya bisa dipahami dan di mengerti, dengan jiwa yang suci dan akal yang bersih. Al-Qur'an diturunkan Allah untuk menuntun dan menunjuki manusia ke arah yang baik lagi benar.

Al-Qur'an menduduki tempat paling pertama dan utama sebagai tempat mengambil rujukan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai nilai al-Qur'an. Setiap ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an tentu semua bisa di gunakan dalam pengembangan pendidikan serta tidak diragukan lagi apabila al-Qur'an dijadikan sebagai landasan dalam kurikulum pendidikan agama Islam.

Meskipun al-Qur'an dijadikan sebagai landasan dalam kurikulum pendidikan agama Islam tentu hal ini tidak bertentangan, akan tetapi sangatlah berhubungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan meskipun dimasa modern ini. Karena kandungan ajarannya sangat sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern, al-Qur'an dan Sains modern melalui analisis komparatif dan akademik terhadap al-Qur'an sebagai wahyu murni adalah sangat wajar jika al-Qur'an mempunyai kedudukan yang istimewa, sehubungan dengan jaminan kemurniannya dan pernyataan sains yang dikandungnya (Maurice Bucaelle:1991). Al-Qur'an juga selalu memberikan

pandangan yang mengacu pada kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Maka sangatlah tepat al-Qur'an dijadikan landasan utama dalam perkembangan kurikulum pendidikan Agama Islam.

2. As-Sunnah

Sunnah berasal dari bahasa arab yang artinya mengasah atau menajamkan. Kata tersebut tidak bermakna tunggal, melainkan memiliki makna yang sangat luas dan tergantung pada susunan kalimat. Bila kata sunnah disandarkan pada kata (*thoriq*) maka ia berarti "berjalan di jalan", dan bila kata tersebut disandarkan pada manusia maka ia berarti "Mengadakan sunnah untuk mereka", dan bila kata tersebut diberi tasydid maka ia berarti "jalan, tabi'at, peri kehidupan." Intinya adalah makna kata sunnah sangat dipengaruhi oleh kalimat yang mengikutinya. Hal tersebut didukung oleh penulis kamus yang lain seperti kamus al-Munawir, kamus Arab kontemporer (ahmad Muhdi Z, 1997:1092).

Lafadz sunah (سُنَّةٌ) ketika dibaca dhammah huruf sin dan tasydid huruf nunnya, sebagaimana pendapat Abu al-Baqa dalam kitab *kulliyat'* secara bahasa adalah suatu jalan walaupun tidak diridhai, sedangkan secara syara' merupakan jalan yang diridhai dan ditempuh dalam agama sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah (Hasyim Asy'ari).

Secara *urf* (tradisi), sunnah adalah suatu ajaran yang diikuti secara konsisten oleh para pengikut, baik nabi maupun wali. Dan istilah sunni adalah nisbat kepada sunnah. Sunnah bisa berarti perilaku (*sirah*), jalan (*tariqah*), kebiasaan atau ketentuan, sunah dalam pengertian ini bisa

mencakup sunnah yang baik (sunnah hasanah) dan sunnah yang buruk (sunnah qabihah).

Sedangkan secara istilah sunnah adalah semua amalan atau perjalanan hidup nabi Muhammad SAW yang dilakukan sejak beliau diangkat menjadi rasul, merupakan sebuah pelajaran atau petunjuk yang patut diikuti atau diteladani, bahkan ada di antara amalan-amalan itu yang dihukum wajib diikuti atau dicontoh yang merupakan penjabaran atau aplikasi dari perintah Allah yang secara tegas disebutkan instruksinya dalam al-Qur'an atau melalui petunjuk praktis dari nabi Muhammad saw (Ambo Asse: 2010).

Sunnah juga berisi petunjuk kemaslahatan dalam hidup manusia dengan segala aspek untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya yaitu muslim yang bertakwa. Dalam praktiknya apabila kita kembali dalam sejarah nabi Muhammad adalah pendidik Utama, karena beliau pernah mendidik dengan menggunakan rumah al-Arqam kemudian memanfaatkan tawanan perang untuk mengajar baca tulis, serta mengirimkan para sahabat ke daerah-daerah yang baru memeluk agama Islam (Zakiah Derajat: 1991).

Dalam hal tersebut nabi Muhammad menjadi pendidik utama yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka membentuk manusia seutuhnya dan masyarakat Islam. Oleh karenanya Sunnah menjadi landasan kedua dengan dua tujuan, *pertama* untuk menjelaskan sistem pendidikan yang terdapat di dalam al-Qur'an serta menerangkan hal-hal kecil yang tidak terdapat di dalamnya (pendidikan), *kedua* mencontoh atau mengambil metode pendidikan dari kehidupan nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang digunakan dalam penanaman akidah ke dalam jiwa masyarakat pada saat itu.

Artinya:

“Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa al-Rasyidin setelahku.”

Dari hadits diatas sunnah tentu dapat menjadi landasan kedua dalam pendidikan agama Islam khususnya dalam kurikulum itu sendiri, untuk membentuk pribadi muslim melalui pendidikan. Teladan yang ditunjukkan nabi Muhammad di dalam Sunnah (Hadist) merupakan sumber acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas kehidupan, dalam ranah pendidikan Islam acuan tersebut dapat dilihat dari dua bentuk *Pertama* sebagai acuan syar’iyah meliputi pokok ajaran Islam secara teoritis. *Kedua*, sebagai acuan oprasional yang meliputi cara nabi Muhammad memainkan peranannya sebagai pendidikan dan evaluator yang adil serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

Dengan dijadikannya sunnah ke dalam landasan kurikulum pendidikan agama Islam maka proses pendidikan agama Islam yang ditunjukkan Nabi Muhammad dalam pelaksanaan akan bersifat fleksibel dan universal, sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik, kebiasaan masyarakat serta kondisi alam di mana proses pendidikan tersebut berlangsung dengan dibalut oleh pilar-pilar akidah Islamiah.

3. Ijtihad

Ijtihad menurut terminologi pakar ushul fikih adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada

kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali hukum (*istinbath al hukm*) dari sumbernya.

Frasa “mengerahkan kekuatan maksimal” artinya seseorang yang sedang mencari hukum suatu permasalahan yang dihadapinya harus mengerahkan kekuatan semaksimal mungkin ketika mencarinya, di mana ia merasa tidak ada kekuatan lebih besar lagi yang dikerahkan dalam mencari hukum tersebut, dan ia yakin bahwa semua cara pencarian hukum tentang permasalahan tersebut sudah ia tempuh. Dengan demikian, seseorang yang mencari hukum hanya dengan mengenalnya dari *nash* yang *sharih* (eksplisit) lagi *qath'i ad-dilalah* (maknanya pasti satu, tidak memungkinkan makna yang lain), maka ia tidak disebut sedang berijtihad. Pasalnya, ia tidak mengerahkan kekuatan maksimal untuk mengetahui hukum tersebut.

Frasa “untuk sampai pada kesimpulan (pengetahuan tentang) suatu hukum syar'i yang aplikatif” berarti tujuan seseorang mencari hukum dengan mengerahkan kekuatan maksimal adalah untuk sampai pada suatu kesimpulan, yaitu mengetahui hukum syar'i yang bersifat 'amali (aplikatif) dari suatu permasalahan. Dengan demikian, mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan hukum yang bersifat rasio (akal), seperti samanya dua sudut segitiga sama kaki, samanya sudut-sudut segitiga sama sisi, atau mengembangnya suatu benda karena terkena panas, tidak termasuk ijtihad menurut terminologi pakarushul fikih.

Kemudian frasa “dari dalilnya yang rinci” artinya adalah seseorang yang sedang mencari hukum harus merujuknya langsung pada sumber yang asli yaitu dalil syar'i yang rinci, maksudnya adalah nash-nash Al-Qur'an,

Sunnah, atau pun qiyas. Dengan demikian, mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan hukum syar'i yang aplikatif namun dari pendapat-pendapat para imam madzhab, atau keterangan-keterangan yang ada pada matan atau pun syarah (penjelasan matan), maka tidak disebut ijtihad.

Dan frasa “dengan cara menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari sumbernya” merupakan bentuk penegasan (penguatan) dari makna mengambil hukum dari dalilnya. Maksudnya adalah seseorang yang sedang mencari hukum tersebut hanya mengetahuinya dengan merujuk pada sumbernya yang asli, bukan dari sumber lain atau bahkan bertaklid pada orang lain.

**Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad saw.
mengandung arti umum, sehingga diperlukan
interpretasi melalui sarana ijtihad. Ijtihad ini sangat
dibutuhkan sesudah meninggal Nabi saw. disebabkan
tidak adanya tempat untuk bertanya atau
berkonsultasi jika mendapatkan suatu masalah yang
tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah.**

Untuk menghadapi persoalan tersebut, maka para ulama mengistimbatkan hukum, mengarahkan segala daya kemampuan untuk berijtihad, sehingga ijtihad itu juga dijadikan landasan pendidikan. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Nabi yang diolah oleh akal yang sehat dari pada ahli pendidikan, ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup pada kondisi dan situasi tertentu (Zakiah Daradjat).

Apabila kita berkaca pada kemajuan pendidikan umat Islam di masa lampau yang telah melahirkan cendekiawan muslim di berbagai bidang, seperti Ibnu Rusydi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi dan lain-lain, merupakan natijah dari adanya peluang untuk berpikir kreatif. Hal ini terutama terkait dengan adanya kebebasan untuk berjihad, di mana Islam tidak menyalahkan seseorang bila salah dalam ijtihadnya. Orang yang salah dalam berjihad diberikan satu pahala, sedangkan yang benar dalam berjihad mendapat dua pahala.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nabi Muhammad bersabda: “Apabila seorang hakim berjihad dan benar, maka baginya dua pahala, tetapi apabila ia berjihad lalu keliru maka baginya satu pahala”. Hadis ini diucapkan Nabi Saw. dalam rangka membenarkan perbuatan `Amru Bin Ash yang shalat tanpa terlebih dahulu mandi, padahal ia dalam keadaan junub; `Amr hanya melakukan tayamum.

Berhubungan dengan hadist diatas dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ankabut ayat 69, yang aratinya “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan- jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” Berdasarkan ayat ini Allah SWT membuka jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh di jalanNya.

Terungkapnya berbagai ilmu pengetahuan di masa lampau dikarenakan mereka telah bersungguh-sungguh dalam menggali ayat-ayat kauniyah yang tertera di alam raya ini. Begitu juga teratasinya berbagai persoalan umat dikarenakan mereka telah bersungguh-sungguh dengan

segenap kemampuannya menggali jalan pemecahannya dengan mengharap bantuan dan petunjuk Allah Swt.

Oleh karenanya ijtihad dalam pendidikan sangat diperlukan untuk mengatasi problematika yang ada nantinya dalam pendidikan agama Islam. Hasil dari ijtihad tersebutlah yang nantinya akan menjadi pedoman dan landasan pendidikan, ijtihad juga dalam aspek pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin penting dan mendesak tidak saja di bidang materi atau isi, tetapi juga dalam bidang sistem dalam makna yang luas.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2014.
- Asse, Ambo. *Ilmu Hadist Pengantar Memahami Hadist Nabi SAW*, (Makasar: Dar al-Hikmah wa al-'Ulum Alauddin Press), 2010.
- Asy'ari, Hasyim. *Risalah ahl al-Sunnah wa al-Jamaah fi Hadits al-Muata wa Asyrath al-Sa'at wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid'ah*.
- Chamisijatin, Lise & Fendy Hardian P. *Telaah Kurikulum*, (Malang: UMM), 2019.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam, Cet. II*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1992.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana), 2014.
- Fitri, Zainul Agus. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam*, (Bandung: Alfabeta), 2013.
- Kholik, Nur. *Mazhab Pendidikan Pembebasan Ulasan Pemikiran Gus Dur*, (Tasikmalaya: Edu Publisher), 2020.
- Muhdor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer; Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksu), 1996.
- Nasution, S. *Asas-asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2014.
- Noelaka, Amos & Amialia A. *Landasan Pendidikan*, (Depok: Kencana), 2017.
- Republik Indonesia "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Saputra, Dani Nur dkk. *Landasan Pendidikan*, (Bandung: Median Sains Indonesia), 2020.
- Yatimah. *Landasan Pendidikan*, "Jakarta: Alungadan Mandiri), 2017.

BAB III

PERAN GURU DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI

Wonadi Idris



A. Pengertian Kurikulum PAI

Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curur* yang artinya pelari dan *currere* yang berarti berpacu. Jadi istilah kurikulum pada awalnya berhubungan dengan kegiatan olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis *finish* (Langgulong, 1986).

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan *manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (*manhaj al-dirasah*) dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan (Langgulong, 1986).

Secara terminologi istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yang mengandung pengertian sejumlah pengetahuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mendapatkan suatu tingkatan atau ijazah (Sudarman, 2019).

Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan tersebut adalah, bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan

peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik, seperti diungkapkan oleh Murray Print (1993) yang mengungkapkan bahwa kurikulum meliputi :

1. *Planned learning experient* (Perencanaan pengalaman pembelajaran).
2. *Offered within an educational institution/program*
3. *Repesented as a document, and*
4. *Includes experintes resulting fromimplementing that documenting*

Print memandang bahwa sebuah kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun (Sanjaya, 2008).

Bagaimana dengan Kurikulum Pendidikan Agama Islam? Pada awalnya orang Islam menganggap kurikulum hanyalah sekumpulan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa. Pengertian sempit ini tidak hanya dianut oleh orang Islam, orang barat (bangsa Eropa & Amerika) pun pernah menganut pandangan ini. Kemudian orang barat memperluas pengertian kurikulum. Ketika konsep-konsep barat itu memasuki dunia Islam di akhir abad-19, dan sudah banyak pula muslim yang mengambil spesialisasi dalam bidang pendidikan modern, maka mulailah muncul kecaman terhadap pengertian kurikulum dalam arti sempit yang masih dianut ketika itu, misalnya oleh Universitas Al Azhar, Universitas Azzaituna di Tunisia dan universitas Al qurawiyin di Maroko. Diantara kritikan yang disampaikan antara lain :

1. Dalam kurikulum arti sempit itu dimasukkan semua pengalaman belajar yang di peroleh siswa sekolah

2. Perhatian hanya terpusat pada penguasaan teori dan menghafal, kurang memperhatikan pengembangan pengaplikasian teori-teori dan hafalan.
3. Terlalu memusatkan perhatian pada mempelajari hal-hal yang telah lalu dan menyiapkan siswa berdasarkan masa lalu tersebut.
4. Kurang memperhatikan kesesuaian materi kurikulum dengan kemampuan, bakat, minat dan kebutuhan siswa
5. Kurang menggugah kreatifitas siswa
6. Pelajaran kadang-kadang berbeda dari kenyataan yang dialami siswa
7. Kurang memperhatikan perbedaan individu siswa, kurikulum cenderung menyamaratakan siswa yang sebenarnya tidak sama.
8. Tidak menggunakan pendekatan multidisiplin dalam memecahkan permasalahan.

Kritikan tersebut diperhatikan oleh para pendidik, lantas mereka mulai mengubah pandangan mereka tentang kurikulum, mereka mengubah pandangannya kepada pandangan pendidikan modern. Menurut As-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menonjolkan mata pelajaran agama dan ahlak yang bersumber pada al Qur'an dan Al hadist serta tauladan dari tokoh terdahulu yang saleh
2. Memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa yaitu aspek jasmani .akal dan ruhani. Untuk pengembangan menyeluruh ini kurikulum harus bersisi mata pelajaran yang banyak, sesuai dengan tujuan

pembinaan setiap aspek itu. Oleh karena itu, di perguruan tinggi diajarkan mata pelajaran seperti ilmu-ilmu Al-Qur'an termasuk *tafsir*, dan *qira'ah*; ilmu-ilmu hadis termasuk *musthalah al hadist*; ilmu fiqh termasuk *ushulfiqh*; tauhid, filsafat, akhlak, nahwu, sharf, 'arudl, linguistik termasuk fonologi, dialek, balaghah, bayan, dan kritik sastra; sejarah islam riwayat tokoh, ilmu alam, kimia, obat-obatan, pengobatan, pembedahan, menggambar, ketrampilan dan sebagainya. Sebagai akibatnya, bidang studi yang seharusnya masuk kurikulum pendidikan islam sangat banyak. Banyaknya bidang studi ini, ditambah dengan adanya kebebasan ilmiah, melahirkan banyak sarjana ensiklopedia yang terkenal karena luasnya pengetahuan mereka seperti Al kindi, Al-farabi, ibn Sina, ibn Rusd, Al-Ghazali, dan Ibn Khaldun.

3. Memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal dan ruhani manusia. Keseimbangan itu tentulah bersifat relatif karena tidak dapat diukur secara objektif.
4. Memperhatikan juga seni halus, yaitu ukir, pahat, tulis indah, gambar dan sejenisnya. Selain itu memperhatikan juga pendidikan jasmani, latihan militer, teknik, ketrampilan, dan bahasa asing sekalipun semuanya ini diberikan kepada perseorangan secara efektif berdasar bakat, minat dan kebutuhan.
5. Mempertimbangkan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang sering teradapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan juga perbedaan zaman.

Sementara itu menurut Al-Abrasyi, dalam merencanakan kurikulum Pendidikan Islam seharusnya dipertimbangkan prinsip-prinsip berikut :

1. *Harus ada mata pelajaran yang ditunjukkan mendidik ruhani atau hati.* Ini berarti perlu diberikan mata pelajaran ketauhidan. Al farabi, sang filosof, telah menempatkan ilmu ketuhanan sebagai pengetahuan tertinggi, pengetahuan lainnya hanyalah berfungsi sebagai penyerta pengetahuan tertinggi tersebut. Ada sarjana lain yang berpendapat bahwa pengetahuan ketuhanan merupakan pengetahuan tertinggi, matematika merupakan pengetahuan menengah, dan fisika merupakan pengetahuan terendah. Al-Namiri Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama membagi pengetahuan (ilmu) menjadi tiga tingkatan, yaitu, pengetahuan tertinggi, pengetahuan menengah, dan pengetahuan terendah. Ilmu tertinggi adalah ilmu ketuhanan, ilmu menengah adalah ilmu pengetahuan mengenai dunia seperti kedokteran dan ilmu ukur, sedangkan pengetahuan terendah adalah pengetahuan praktis seperti bermacam-macam ketrampilan, kesenian, renang, menunggang kuda, menulis indah. Para filosof Muslim berpendapat bahwa ilmu-ilmu keagamaan adalah ilmu tertinggi, dan siswa yang mempelajari ilmu ini hendaknya tidak mempunyai tujuan-tujuan kebendaan. Al-Ghazali membagi pengetahuan: menjadi tiga juga, yaitu pengetahuan tercela seperti sihir, pengetahuan dipuji seperti ilmu dan pengetahuan terpuji seperti pengetahuan mengenai Allah.
2. *Mata pelajaran harus ada yang berisi tuntunan cara hidup, yaitu ilmu fikih dan ilmu akhlak.* Ketinggian fikih tergambar dalam dialog berikut. Salah seorang murid Imam Syafi'i berkata bahwa pada suatu hari ia bertanya kepada sang Imam tentang Ilmu tauhid. Imam menjawab singkat padat. Setelah itu ia mengajukan pertanyaan, Imam berkata "Apakah engkau mau saya tunjukkan ilmu yang lebih baik ? "Ya" jawab sang murid. Maka Imam Syafi'i berkata,

”mengenai ilmu tauhid ini bila engkau benar, engkau tidak akan diberi pahala, bila salah, engkau kafir. Tahukah engkau ilmu yang bila engkau benar engkau diberi pahala, bila salah engkau berdosa? “Sang murid bertanya “ilmu apa itu ?” “Ilmu Fikih”.

3. *Mata pelajaran yang diberikan hendaknya mengandung kelezatan ilmiah, yaitu yang sekarang disebut orang mempelajari ilmu untuk ilmu. Ilmu dipelajari untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada pada setiap manusia.*
4. *Mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan: dengan kata lain, ilmu itu harus terpakai. Nanti manfaatnya adalah menghindarkan kita dari kekeliruan berpikir, ilmu hitung dan ilmu ukur berguna agar siswa terbiasa bersifat teliti dalam berfikir, berbicara, berbuat, ilmu Fikih agar siswa mengetahui cara melakukan ibadah, Nahwu berguna agar siswa terhindar dari kesalahan dalam menulis dan berbicara, ilmu kedokteran dipelajari agar bebas dari penyakit, mata pelajaran ketrampilan berguna bagi siswa dalam mencari penghidupan.*
5. *Mata pelajaran yang diberikan berguna dalam mempelajari ilmu lain : yang dimaksud adalah ilmu alat seperti bahasa dan semua cabangnya (Ahmad Tafsir, 2013).*

B. Ruang Lingkup Materi dalam Kurikulum PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah saat ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan karena dipandang belum dapat menciptakan peserta didik yang shaleh pribadi (beriman) dan shaleh sosial (bertaqwa). Dalam artian Pendidikan Agama Islam masih dipandang belum memberikan kontribusi yang

signifikan dalam mengatasi dekadensi moral dan kelulusan yang berkompeten.

Untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan kurikulum PAI, maka isi materi kurikulum PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok yakni Al Qur'an dan Al Hadist serta diperkaya dengan *istinbath* atau ijtihad para Ulama' sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan mendetail. Dalam pandangan Zakiyah Darajat tentang kurikulum adalah sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu (Daradjat, 1992).

Kurikulum PAI mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, kesesuaian, dan keseimbangan antara :

1. Hubungan manusia dengan Allah SWT. Sebagai hamba Allah SWT sudah sepantasnya bila prioritas utama hubungan manusia dan sang khaliqnya didahulukan. Kurikulum PAI memprioritaskan yang pertama, karena pokok ajaran inilah yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Tujuan kurikuler yang hendak dicapai dalam hubungan Allah SWT ini mencakup segi keimanan, rukun Islam dan Ihsan. Termasuk didalamnya menulis huruf Al Qur'an.
2. Hubungan manusia dengan manusia. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak dapat hidup sendirian pasti saling membutuhkan. Aspek pergaulan hidup manusia dengan sesamanya sebagai ajarn agama Islam yang penting ditempatkan pada prioritas kedua dalam urutan kurikulum PAI. Tujuan kurikuler yang hendak dicapai dalam kurikulum ini mencakup segi kewajiban dan larangan dalam

hubungan dengan sesama manusia segi hak dan kewajiban di dalam bidang pemilikan dan jasa, kebiasaan hidup bersih dan sehat jasmani dan rohani serta sifat-sifat kepribadiannya yang baik.

3. Hubungan manusia dengan alam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan melestarikan alam dan memakmurkan bumi. Agama Islam banyak mengajarkan bagaimana menjaga alam sekitar dari kerusakan. Manusia boleh menggunakan dan mengambil manfaat dari alam menurut garis-garis yang telah ditentukan agama. Tujuan kurikuler yang hendak dicapai dalam kurikulum ini mendorong peserta didik untuk mengenal alam dan mencintainya serta mengetahui keindahan dan kehebatan alam semesta, sehingga peserta didik semakin tebal keyakinnya kepada Allah SWT.
4. Hubungan manusia dengan dirinya. Sebagai manusia perlu saling menghargai diantara sesama termasuk juga menghargai diri sendiri. Penghargaan terhadap diri kita, sangat tergantung kepada sejauh mana kita menghargai atau dengan kata lain berakhlak kepada diri sendiri. Kita sangat dilarang (diharamkan) mencelakakan diri sendiri apa lagi sampai bunuh diri.

Keempat hubungan tersebut di atas, tercakup dalam kurikulum PAI yang tersusun dalam beberapa mata pelajaran, yaitu : Aqidah Akhlaq, Al Qur'an Hadist, Ibadah Syari'ah (Fiqih), Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Mata pelajaran tersebut yang merupakan skop atau ruang lingkup kurikulum PAI yang disajikan pada sekolah-sekolah yang berciri khas agama Islam atau Madrasah. Sementara ruang lingkup kurikulum PAI pada sekolah-sekolah umum adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang bentuk kurikulumnya

broad field atau *all in one system* (Hamdan, 2014). Sementara itu ruang lingkup materi pendidikan agama Islam meliputi :

1. Aqidah atau keyakinan. Aspek ini merupakan bagian yang fundamental, keyakinan dalam ajaran Islam merupakan pintu masuk ke dalam ajaran Islam dan berpengaruh terhadap seluruh perilaku seorang muslim.
2. Syari'at atau Norma hukum. Aspek ini mengajarkan pada aturan perilaku seorang pemeluk agama Islam. Aspek hukum ini mengandung ajaran yang berkonotasi hukum yang terdiri atas perbuatan ajaran yang wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.
3. Akhlaq atau tingkah laku. Aspek ini menggambarkan tentang perilaku yang seyogyannya dimiliki seorang muslim dalam rangka hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam dan hubungan baik terhadap diri sendiri.

C. Fungsi Kurikulum PAI

Kurikulum PAI berbeda dengan kurikulum yang lain, yang memiliki fungsi atau peran yang dimiliki kurikulum PAI, bahkan kemungkinan ada kurikulum yang tidak memiliki fungsi seperti fungsi kurikulum PAI. Oleh karena itu, sebagai guru PAI sepatutnya memperhatikan dan melaksanakan fungsi-fungsi kurikulum ke dalam pembelajaran PAI. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi Pengembangan, karena kurikulum PAI berupaya mengembangkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

2. Fungsi Penyaluran, mengingat kurikulum PAI berfungsi untuk menyalurkan siswa yang memiliki bakat-bakat khusus di bidang keagamaan, agar bakat-bakat tersebut berkembang secara wajar dan optimal, bahkan diharapkan bakat-bakat tersebut dapat dikembangkan lebih jauh sehingga menjadi hobi yang akan mendatangkan manfaat kepada dirinya dan banyak orang.
3. Fungsi Perbaikan, yaitu PAI berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan siswa terhadap keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi keyakinan atau *'aqidah* dan *'ibadah*
4. Fungsi Pencegahan, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam berfungsi untuk melindungi peserta didik dari pengaruh negatif, baik dalam lingkungan terdekatnya maupun dari budaya luar yang dapat membahayakan perkembangannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya..
5. Fungsi penyesuaian, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam bertujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial, dan secara bertahap dapat mengubah lingkungan agar mencerminkan ajaran Islam.
6. Sumber nilai, yang berarti bahwa kurikulum PAI merupakan sumber dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan didunia dan di akhirat kelak.

D. Komponen Kurikulum PAI

Mengingat bahwa fungsi kurikulum PAI dalam proses pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, maka hal ini berarti bahwa sebagai alat

pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Menurut Hasan Langgulung ada 4 (empat) komponen utama kurikulum yaitu :

1. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Dengan lebih tegas lagi orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut.
2. Pengetahuan (*knowledge*), Informasi-informasi, data-data, aktifitas-aktifitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Bagian inilah yang disebut mata pelajaran.
3. Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum
4. Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut (Langgulung, 1988).

Menurut H. Ramayulis, tujuan, yang ingin dicapai meliputi : *Pertama*, Tujuan akhir. *Kedua*, Tujuan umum. *Ketiga*, Tujuan Khusus. *Keempat*, Tujuan sementara. Setiap tujuan tersebut minimal ada tiga domain, yaitu setiap domain kognitif, afektif dan psikomotor.

1. Isi kurikulum, berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Materi tersebut disusun ke dalam silabus dan RPP, setiap materi tersebut harus jelas *scope* dan squencennya.
2. Media (Sarana dan prasarana), sebagai perantara dalam pembelajaran untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih

mudah dipahami oleh peserta didik. Media tersebut berupa benda (materi) atau bukan benda (non materi)

3. Strategi, merujuk pada pendekatan dan metode serta teknik mengajar yang digunakan. Dalam strategi termasuk juga komponen penunjang lainnya, seperti : sistem administrasi, pelayanan BK, remedial, pengayaan, dan sebagainya.
4. Proses pembelajaran, komponen ini sangat penting, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran dituntut sarana pembelajaran yang kondusif, sehingga memungkinkan dan mendorong kreativitas peserta didik dengan bantuan pendidik.
5. Evaluasi, dengan evaluasi dapat diketahui tercapai atau tidaknya tujuan atau kompetensi yang telah dirumuskan (Ramayulis, 2002).

E. Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum PAI

Guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menterjemahkan, menjabarkan dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru PAI dapat melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum. Menurut Wina Sanjaya dalam konteks hubungan guru dan kurikulum. Setidaknya terdapat empat peran yang harus dilaksanakan oleh guru PAI dalam mengembangkan kurikulum, yaitu sebagai *implementer* (pelaksana), sebagai *developer* (pengembang), sebagai *adapter* (penyelaras) dan sebagai *researcher* (peneliti). (Sanjaya, 2009).

1. Kegiatan Guru PAI sebagai Implementer kurikulum

Guru diharapkan berperan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun, misalnya Kurikulum yang diberlakukan seperti Kurikulum 2013 atau Kurikulum Merdeka, maka guru PAI sebagai pelaksana perlu merancang kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif. Kurikulum ini harus diaplikasikan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas.

Peran guru dalam posisi ini adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah, memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode dan teknik yang tepat), mengelola kelas dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan, berkonsultasi dengan kepala madrasah atau pengawas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan membantu kesulitan siswa dalam proses belajar.

Proses implementasi kurikulum untuk semua mata pelajaran, khususnya PAI, selalu menggambarkan keterkaitan proses dengan tujuan dan isi, kejelasan teori belajar, keterkaitan dengan sosial, budaya, teknologi, ketersediaan fasilitas, alokasi waktu, fleksibilitas, peran guru dan siswa, peran evaluasi dan perlunya *feedback*.

2. Kegiatan Guru PAI sebagai developer kurikulum

Guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum. Peran pengembangan kurikulum ini terkait erat dengan karakteristik, visi dan misi sekolah atau madrasah serta pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Sebagai pengembang kurikulum, guru PAI memiliki kewenangan dalam mendesain (makna yang lebih aplikatif dari perencanaan) kurikulum, yaitu menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, menentukan strategi yang akan dikembangkan dan sistem evaluasi yang akan digunakan.

Dalam kaitan posisi guru sebagai *developer* kurikulum, maka guru dituntut aktif, kreatif dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI, seperti mengikuti *in house training* tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum, berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembang kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran, berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL, berperan aktif dalam menyusun Standar Kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta pemetaannya, mengembangkan silabus pembelajaran dan menyusun semua perangkat operasional yang mendukung RPP, seperti Lembar Kerja Siswa atau dan bahan ajar, seperti modul pembelajaran.

3. Kegiatan Guru PAI sebagai adapter kurikulum

Guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan siswa dan daerah. Dalam fase ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dan daerahnya, baru membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal.

Untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah atau sekolah, dimulai dari mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah atau sekolah, kegiatan ini dilakukan untuk menelaah dan mendata berbagai keadaan dan kebutuhan sekitar madrasah yang bersangkutan, data tersebut dapat diperoleh dari berbagai pihak yang terkait di daerah sekitar madrasah yang bersangkutan, seperti masyarakat sekitar madrasah, pemerintah daerah, instansi vertikal terkait, perguruan tinggi, dunia usaha dan potensi daerah yang bersangkutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kekayaan alam.

Keadaan daerah seperti telah disebutkan dapat diketahui antara lain dari : a) Rencana pembangunan daerah bersangkutan termasuk prioritas pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang b) Pengembangan ketenagakerjaan, termasuk jenis kemampuan dan keterampilan yang diperlukan c) Aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya d) Menentukan fungsi dan susunan atau komponen muatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat sekitar (Tim MEDP, 2008).

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan madrasah. Penentuan bahan kajian kebutuhan lokal didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa (b) kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan (c)

ketersediaan sarana dan prasarana (d) tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan (e) kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di madrasah (f) menentukan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat (g) mengembangkan SK, KD dan silabus.

4. Kegiatan Guru PAI sebagai researcher kurikulum

Guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum atau *curriculum researcher*. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi atau model pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan *lesson study*. PTK adalah metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Pada era globalisasi seperti ini, madrasah dengan melibatkan guru, harus melakukan reformasi dan inovasi dalam proses belajar mengajar dan kurikulum secara terus menerus. Untuk dapat melakukan reformasi dan inovasi pendidikan, diperlukan dukungan empirik yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian. Jika tidak, guru akan terisolasi dari pengetahuan dan informasi mutakhir. Tanpa ada

dukungan penelitian, proses pendidikan akan stagnan dan reformasi serta inovasi mustahil dapat dilakukan. Hasil penelitian dapat membantu guru untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat untuk kepentingan proses belajar mengajar dan pembenahan kurikulum. Jika keputusan tersebut dibantu dengan hasil penelitian, proses belajar mengajar dan kurikulum dapat dicapai dengan optimal dan efektif. Pembelajaran yang efektif merupakan hal yang kompleks dan rumit untuk dapat dikonsepsikan dan dibentuk paradigmanya secara tunggal dan universal (Suyanto & Hisyam, 2000).

Siswa adalah insan manusia yang unik. Mereka tidak dapat diperlakukan seperti benda mati yang dapat dikendalikan semauanya oleh semua pihak. Mereka memiliki minat, bakat, keinginan, motivasi dan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini membuat kesulitan dalam merumuskan proses belajar dan mengajar serta penyusunan kurikulum yang ideal. Tanpa dukungan hasil penelitian, guru dapat terjebak pada praktik pembelajaran dan perumusan kurikulum yang menyesatkan dan menjerumuskan siswa dan mematikan kreativitas mereka. Tanpa dukungan penelitian, guru bisa jadi menggunakan cara pembelajaran dan mengajarkan hal yang sama dari tahun ke tahun. Sementara itu, jaman siswa dibesarkan telah berubah amat cepat, sehingga pada gilirannya akan berpengaruh pada sikap dan reaksi terhadap berbagai tuntutan jaman. Disini peran vital guru PAI untuk selalu terus haus sebagai peneliti kurikulum yang mampu memahami kondisi jaman.

F. Guru PAI dan Perubahan Kurikulum

1. Pengertian Guru PAI

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, guru didefinisikan sebagai orang yang diperkerjakan (mata pecahariannya) mengajar. Dengan demikian, orang yang profesinya mengajar disebut guru, baik guru di sekolah maupun di tempat lain. Kata guru yang dalam bahasa arab disebut *mu'allimat* *ustadz* yang artinya orang yang pekerjaannya mengajar (hanya menekankan satu sisi tidak melihat sisi lain sebagai pendidik dan pelatih) (Suprihatiningrum, 2013). Guru disebut pendidik profesional karena guru telah menerima dan memiliki beban dari orangtua untuk ikut mendidik anak.

Guru juga dikatakan sebagai seseorang yang memperoleh surat keputusan (SK), baik dari pemerintah atau swasta untuk melaksanakan tugasnya, karena itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dilembaga pendidik sekolah.

Pendidik dalam ajaran agama Islam kedudukannya sangat dihargai. Sabda Rasulullah SAW, yang artinya : "*Tinta para ulama' lebih tinggi daripada darah syuhada.*" (HR. Abu Daud & Tarmidzi) (Pupuh & Sobri, 2007). Sabda Rasul tersebut menggambarkan tinggi-nya kedudukan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan (pendidik). Hal ini beralasan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada manusia maka diharapkan dapat terlahir teori-teori yang menyokong pada kemaslahatan manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagai pewaris para Nabi, pendidik hendaklah bertolak pada kaidah *amar makruf wa nahyu anil munkar*, yakni menjadikan prinsip tauhid sebagai pusat kegiatan penyebaran misi *Iman, Islam dan Ihsan*. Kekuatan yang dikembangkan oleh pendidik sendiri adalah individualitas, sosial, dan moral (nilai-nilai agama dan moral).

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional itu disebutkan bahwa "Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam hal ini pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengajarkan agama Islam namun juga mengajarkan ilmu umum yaitu dengan tujuan untuk menghormati agama lain dan hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Secara khusus Pendidikan Agama Islam yaitu rangkaian proses sistematis terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada peserta didik, mengembangkan potensi yang ada pada diri anak didik sehingga mampu melaksanakan tugasnya dimuka bumi dengan sebaik-baiknya dengan nilai-nilai Ilahiyah yang didasarkan pada ajaran agama (Al-Qur'an dan Hadits) pada semua dimensi kehidupan (Dakir & Sardimi, 2011).

Jadi, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan pengajaran atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pembelajaran (menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT). Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Atau dengan kata lain guru Pendidikan

Agama Islam (PAI) adalah seseorang yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing serta orang yang memahami tingkat perkembangan intelektual siswa di sekolah dan menanamkan ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam dengan tujuan menyiapkan kader-kader Islam yang mempunyai nilai-nilai keimanan. Dalam pemahaman lain guru pendidikan agama Islam adalah seseorang manusia yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didiknya, baik pendidikan klasikal maupun individu untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.

2. Perubahan Kurikulum PAI

Perubahan kurikulum PAI tentu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang ada dalam lingkup madrasah. Tetapi dalam praktiknya perubahan kurikulum, penambahan kurikulum atau apa pun namanya adalah sebuah fenomena lama. Perubahan dan perkembangan kurikulum terus dilakukan di Indonesia mulai masa kemerdekaan. Kita mengenal adanya rencana pengajaran, Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Kurikulum 84, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), dan ketika masa pandemi Covid-19 Kemendikbud melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada satuan Pendidikan dalam kondisi khusus sempat mengeluarkan kebijakan penyederhanaan kurikulum nasional, yang ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian sekarang akan diberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Kebijakan penyederhanaan kurikulum nampaknya tidak berdiri sendiri dan bersifat sementara karena ia bertautan dengan kebijakan lainnya berupa kebijakan Sekolah Penggerak dan kebijakan rekrutmen Guru Penggerak. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak merupakan bagian dari Program Organisasi Penggerak (POP). Muara dari POP adalah terealisasinya gagasan Merdeka Belajar yang digaungkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Lantas, apa yang sebenarnya menjadi arah kebijakan Kemendikbud soal Sekolah Penggerak ini dan bagaimana kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti (BP)?.

Yogi Anggraena selaku koordinator Pengembangan Kurikulum Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud, dalam kesempatan menjadi narasumber kegiatan Program Pengembangan Guru Master PAI SMA/SMK menyatakan bahwa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Penggerak nantinya ada persamaan dengan kurikulum 2013 namun ada perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama berbasis kompetensi. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengorganisasiannya.

Kurikulum Sekolah Penggerak masih sama dengan kurikulum 2013, yakni berbasis kompetensi. Namun, pengorganisasiannya memang ada yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, menetapkan standar proses kurikulum Sekolah Penggerak meliputi struktur kurikulum, capaian pembelajaran serta prinsip pembelajaran dan asesmennya. Yang paling terlihat berbeda dari kurikulum 2013 adalah capaian pembelajaran sebagai pengganti KI dan KD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar-red). (Kemenag.go.id). Perubahan kurikulum PAI merupakan ikhtiar untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih baik dari sebelumnya. Perubahan kurikulum ini

sebenarnya tidak mengubah isi total seluruh kurikulum sebelumnya. Selain itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Dakir dan Sardimi. 2011. *Pendidikan Islam & ESQ: Komparasi-Integratif Upaya Menuju Stadium Insan Kamil*. Semarang: Rasail Media Group
- Darajat, Zakiyah, dkk. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Fathurrohman, Pupuh & Sutikno, M. Sobry. 2007. *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami*. Bandung: PT Refika Aditama
- Hamdan. 2014. *Pengembangan Kurikulum PAI Teori dan Praktik*, Banjarmasin: IAIN Antasari Pres
- <http://respositorry.ump.ac.id> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007
- Jamil Suprihatiningrum, *Guru Proposional (Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru)*, Ar-Ruzz Media, Jugjakarta, 2013
- Langgung, Hasan. 1986. *Manusia dan Pendidikan Suatu analisa Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Langgung, [Hasan. 1988](#). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna
- Ramayulis. 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Prenadamedia group
- Sudarman. 2019. *Buku Pengembangan Kurikulum Kajian Teori dan Praktik*, Samarinda: Mulawarman University Pres
- Suyanto dan Hisyam, Djihad. 2000. *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* Jakarta: Adicita Karya Nusa
- Tim MEDP. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

BAB IV

PERAN KEPALA SEKOLAH/MADRASAH DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Siti Halimah



A. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. (Poerwadarminto, 1984: 735). Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin di dalam organisasi mempunyai peranan, setiap pekerjaan membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. (Rivai, 2003: 148)

Peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran.

Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial (Walgito, 2003: 3).

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan menjadikan sebuah interaksi antara anggota

masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya suatu interaksi diantaranya mereka ada yang saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. (Mulyasa, 2007: 97)

Berdasarkan pengertian di atas penulis menarik simpulan bahwa apabila dihubungkan dengan kepala sekolah maka peran merupakan usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membangun perbaikan madrasah kearah yang lebih baik. Dalam hal ini, kepala sekolah perlu menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

B. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat menerima dan member pelajaran. Jadi secara umum sekolah atau lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran.

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Berarti secara terminologi Kepala sekolah adalah sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. (Wahjosumidjo, 2007: 83)

Maksud dari kata memimpin adalah *leadership*, yaitu kemampuan untuk mengerakkan sumber daya, baik internal, maupun eksternal, dalam rangka mencapai tujuan sekolah dengan lebih optimal. Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinanannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. (Lazaruth, 1994: 20)

Kepemimpinan atau *leadership* berarti *being a leader power of leading or the quality of leader*. Secara bahasa, makna kepemimpinan itu adalah kekuatan atau kualitas seseorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang di pimpinnya untuk mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan dalam pengertian umum menunjukkan suatu proses kegiatan dalam hal memimpin, membimbing, mengontrol perilaku, perasaan serta tingkah laku terhadap orang lain yang ada di bawah pengawasannya. (Hermino, 2014: 126)

Husaini usman menyatakan bahwa kepala sekolah merupakan manajer yang mengorganisir seluruh sumber daya sekolah dengan menggunakan "*Teamwork*" yaitu rasa kebersamaan (*together*), pandai merasakan (*empathy*), saling membantu (*assist*), saling penuh kedewasaan (*maturity*), saling mematuhi (*willingness*), saling teratur (*organization*), saling menghormati (*respect*) dan saling berbaik hati (*kindness*). (Usman Husaini, 2009: 654)

Menurut E. Mulyasa kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. (Wahyudi, 2012: 48)

Hal tersebut menjadi lebih penting dan sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak semakin maju, sehingga menuntut penguasaan secara profesional.

Oleh karena itu kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan secara profesional.
(Zainal Arifin, 2011: 3)

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah, dan memberikan arahan dan dorongan kepada guru, staf dan peserta didik serta membimbing sekolah dan komponen-komponen yang ada di dalam sekolah tersebut menuju arah yang lebih baik.

C. Ciri-Ciri atau karakteristik Kepala Sekolah

Ciri-ciri kepala sekolah yang profesional harus cerdas dan bijaksana, menurut sanusi beberapa ciri-ciri kepala sekolah yang perlu diperhatikan sebagai berikut: kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya, kemampuan untuk menerapkan keterampilan-keterampilan konseptual, manusiawi dan teknis, kemampuan untuk memotivasi guru, staf, dan pegawai lainnya untuk bekerja, kemampuan untuk memahami implikasi-implikasi dari perubahan sosial, ekonomis, dan politik terhadap pendidik. (Rismi Somad, dkk, 2014: 50)

Secara umum (dalam, Setyorini, 2006: 152) dijelaskan bahwa setidaknya terdapat empat indikator pokok yang dapat dijadikan acuan, yaitu: 1) sifat dan ketrampilan kepemimpinan, 2) kemampuan pemecahan masalah, 3) ketrampilan sosial dan, 4) pengetahuan dan kompetensi profesional. Menurut Schien dalam Yuki bahwa karakteristik kepemimpinan pada budaya organisasi yaitu: 1) perhatian para pemimpin mengkomunikasikan nilai-nilai, dan perhatian baik secara emosional atau dalam rapat-rapat formal kepada para anggota untuk mencapai tujuan organisasi 2) reaksi terhadap krisis pemimpin yang menggunakan pendekatan ini selalu menghadapi krisis dalam organisasi 3) permodelan peran, peran pemimpin dalam mengkomunikasikan nilai-nilai dan harapan-harapan serta banyak memberi tauladan secara pribadi, menunjukkan loyalitas, pengorbanan diri dan pelayanan kepada semua anggota organisasi 4) alokasi imbalan-imbalan kriteria atau imbalan yang diberikan kepada para anggota disamping bersifat peningkatan upah dan promosi juga dilakukan pujian yang bersifat formal dan informal. 5) kriteria menseleksi dan menghentikan para pemimpin dalam mempengaruhi budaya dengan merekrut kriteria anggota atau pegawai yang sesuai dengan nilai-nilai dan promosi yang dimiliki organisasi.

Menurut Mulyana (2003: 126) kriteria kepemimpinan kepala Madrasah yang efektif adalah sebagai berikut:

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik lancar dan produktif.
2. Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara efektif

dalam rangka mewujudkan tujuan madrasah dan pendidikan

4. Berhasil menerapkana prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di madrasah.
5. Mampu bekerja dengan tim manajemen madrasah
6. Berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

D. Syarat Kepala Sekolah

Seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kepribadian yang baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegangnya. Ia hendaknya memiliki sifat-sifat jujur, adil dan dapat dipercaya, suka menolong dan membantu guru dalam menjalankan tugas dan mengatasi kesulitan-kesulitan, bersifat supel dan ramah mempunyai sifat tegas dan konsekuen. Maka syarat seorang Kepala Sekolah menurut M. Dariyanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya.
3. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan.
4. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang- bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya.

5. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. (M. Daryanto, 1996: 92)

Muhamin mengatakan, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Sekolah/madrasah agar bisa menjadi pemimpin yang baik antara lain:

1. Memiliki Visi; untuk memiliki visi yang baik, seorang Kepala Sekolah/Madrasah harus memiliki pikiran yang terbuka, agar ia mampu menerima berbagai hal baru yang mungkin saja selama ini bertentangan dengan apa yang telah diyakininya, sehingga pengalaman tersebut akan memperkaya persepektif pandang Kepala Sekolah/Madrasah tersebut terhadap sesuatu.
2. Keberanian; Kepala Sekolah/Madrasah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi, karena dengan kecintaan terhdap pekerjaannya tersebut berarti ia mengerjakan dengan hati. Dengan keberanian tersebut, pemimpin akan dengan sukarela mengambil berbagai inisiatif untu mencari terobosan-terobosan baru yang kadang kala penuh resiko.
3. Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis. Kepala Sekolah/Madrasah harus mampu membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. Jika kondisi sekolah/madrasah masih belum memiliki sumber daya yang cukup, maka Kepala Sekolah/Madrasah harus mampu menggunakan fasilitas yang ada, dengan tetap mengupayakan perbaikan.
4. Mampu menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin legalitas adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi terhadap manusia. (Muhaimin, 2011: 31-32)

Kepala sekolah merupakan faktor penentu efektivitas sekolah oleh sebab itu seorang kepala sekolah hendaknya memiliki sifat-sifat dibawah ini antara lain:

1. Memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan untuk bertindak dengan keteguhan hati dan melakukan perundingan dalam situasi yang sulit.
2. Memiliki inisiatif dan upaya yang tinggi.
3. Berorientasi kepada tujuan dan memiliki rasa kejelasan yang tajam tentang tujuan intruksional dan organisasional.
4. Menyusun sendiri contoh-contoh yang baik secara sungguh-sungguh.
5. Menyadari keunikan guru dalam gaya, sikap, ketrampilan dan orientasi mereka serta mendukung gaya-gaya mengajar yang berbeda. Kepala madrasah yang efektif sanggup menggabungkan ketrampilan mengajar dengan penataan dan penguasaan mengajar (Sulistyorini, 2009: 195)

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan kepala sekolah benar-benar orang yang terpilih menjadi kepala sekolah, dengan beberapa syarat yang diajukan diharapkan unsur di dalam lembaga pendidikan tersebut dapat lebih meningkat yang akhirnya tujuan pendidikan dapat tercapai.

E. Fungsi Kepala Sekolah

Soewadji Lazaruth menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator pendidikan, supervisor pendidikan, dan pemimpin pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai administrator pendidikan berarti untuk meningkatkan mutu sekolahnya, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan

mengembangkan fasilitas sekolahnya misalnya gedung, perlengkapan atau peralatan dan lain-lain yang tercakup dalam bidang administrasi pendidikan. Lalu jika kepala sekolah berfungsi sebagai supervisor pendidikan berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru- guru dan seluruh staf sekolah, misalnya melalui rapat-rapat, observasi kelas, perpustakaan dan lain sebagainya. Dan kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru bersifat terbuka, kreatif dan memiliki semangat kerja yang tinggi.

**Suasana yang
demikian ditentukan
oleh bentuk dan sifat
kepemimpinan yang
dilakukan kepala
sekolah.
(Soewadji Lazaruth,
1994: 20)**

Senada dengan pendapat E. Mulyasa (2007: 98-122), kepala sekolah mempunyai 7 fungsi utama, yaitu:

1. Kepala Sekolah sebagai *educator* (Pendidik). Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Kepala Sekolah sebagai manajer. Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala

sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: MGMP/MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain.

3. Kepala Sekolah sebagai administrator. Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi guru.
4. Kepala Sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada

sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana disampaikan oleh Sudarwan Danim mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode dan evaluasi pengajarannya, sudah sewajarnya kalau para guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan ini, mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul menguasai tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberikan saran dan bimbingan kepada guru, sementara dia sendiri tidak menguasainya dengan baik.

5. Kepala Sekolah sebagai *leader* (Pemimpin). Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuh- suburkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru? Dalam teori kepemimpinan setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifat sebagai berikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan.
6. Kepala Sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, keteladanan.

F. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki keleluasaan dalam mengatur segenap sumber daya sekolah yang ada, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan mutu dan kinerja sekolah. Kemudian kepala sekolah yang profesional akan mengetahui kebutuhan dunia pendidikan serta kebutuhan sekolah secara spesifik, dengan demikian ia akan melakukan penyesuaian agar pendidikan dan sekolah mampu untuk berkembang dan maju, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu kepala sekolah harus mengetahui tugas-tugas yang harus ia laksanakan.

Tugas pokok kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah:

1. Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
2. Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan

- fungsi masing-masing staf. menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
3. Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
 4. Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
 5. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik. (Hari Sudrajat, 2004: 112)

Tugas kepala sekolah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi tugas kepala sekolah itu memerlukan perhatian, pemikiran dan berbagai kegiatan yang menyita waktu, tenaga, biaya, dan aspirasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Adapun tugas kepala sekolah tersebut, meliputi:

1. Membuat Program Sekolah Salah satu tugas kepala sekolah adalah membuat program sekolah secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam membantu terwujudnya tujuan. Setiap program ataupun konsepsi memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Perencanaan adalah suatu cara meneliti masalah-masalah. Dalam pemecahan masalah itu kepala sekolah merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

2. Pengorganisasian sekolah. Pengorganisasian adalah mengorganisasi semua kegiatan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antar orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian sehingga terciptalah hubungan kerja sama harmonis dan lancar menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Mengkoordinasi Sekolah Adanya bermacam-macam tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh para guru memerlukan adanya koordinasi dari seorang kepala sekolah. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personel dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan.
4. Menjalin Komunikasi Sekolah Dalam melaksanakan program sekolah, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih dari sekadar menyalurkan pikiran, gagasan-gagasan, dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan

pengertian yang jelas dari pada secara tertulis. Demikian pula komunikasi yang dilakukan secara informal dan secara formal mendatangkan hasil yang berbeda pengaruh dan kejelasannya.

5. Menata Kepegawaian Sekolah Kepegawaian merupakan hal yang tidak kalah pentingnyadi sekolah. Karena dalam kepegawaian di sekolah, guru menjadi sumber daya manusia dan menjadi titik penekanan. Aktivitas yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus kepegawaian di sekolah adalah menentukan, memilih, menetapkan, dan membimbing para guru serta staf lainnya di sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.
6. Mengatur Pembiayaan Sekolah Tanpa biaya yang mencukupi, tidak menjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. Demikian pula organisasi seperti halnya sekolah. Setiap kebutuhan sekolah, baik personel maupun materil, semua memerlukan biaya. Itulah sebabnya, masalah pembiayaan ini harus sudah mulai dipikirkan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaannya.
7. Menata Lingkungan Sekolah Kepala sekolah memiliki tugas untuk membina dan menata lingkungan sekolah agar proses belajar di sekolah tercapai dengan baik. Selanjutnya kepala sekolah dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari di sekolah mengemban tanggung jawab yang besar. Agar sekolah yang dipimpin berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, kepala sekolah harus profesional. Artinya, ia memiliki kemampuan menjalankan berbagai aktivitas sekolah, bahkan bertanggung jawab penuh membina dan mengembangkan guru serta tenaga kependidikan lainnya untuk tercapainya tujuan pendidikan. (A. Tabrani Rusyan, 2013: 17)

Selanjutnya A. Tabrani (dalam A. Tabrani Rusyan, 2013: 50) menjelaskan bahwa tanggung jawab kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik Kepala sekolah sebagai pendidik harus menguasai keberadaan sekolah karena sekolah merupakan cara khusus untuk mengatur lingkungan, direncanakan dan diorganisasi. Di sekolah, anak belajar dan guru mengajar. Di sekolah, kepala sekolah dapat menolong guru dan peserta didik menciptakan kehidupan yang harmonis, tenteram, aman, dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran.
2. Kepala Sekolah Sebagai Manajer Sekolah memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah sehingga kepala sekolah dapat memberi sumbangan yang makin meningkat bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja para guru akan berdampak pada semakin baiknya kinerja sekolah dalam menjalankan perannya di masyarakat.
3. Kepala Sekolah Sebagai Administrator Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan di sekolah harus menguasai tentang administrasi sekolah. Karena jika tidak menguasai administrasi pendidikan di sekolah, sudah tentu sekolah yang dipimpinnya tidak berjalan lancar apalagi mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik, kepala sekolah harus memahami administrasi sekolah dan menjalankannya pada proses pendidikan di sekolah.
4. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu

para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, efisien, berhasil guna. Supervisi yang dilaksanakan kepala sekolah bukan hanya sekedar kontrol melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah digariskan, melainkan lebih dari itu. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah mencakup penentuan kondisi-kondisi atau syarat-syarat personel maupun material yang diperlukan untuk terciptanya situasi pembelajaran yang efektif dan upaya memenuhi syarat-syarat itu.

5. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Kepala sekolah sebagai pemimpin akan menampakkan perilaku kepemimpinan ketika berinteraksi dalam format memberi pengaruh kepada para guru. Bahkan dalam kapasitas pribadi pun, kepala sekolah memiliki potensi sebagai pengendali, yang pada intinya memfasilitasi para guru untuk dapat memimpin dirinya sendiri. Oleh karena kepemimpinan itu merupakan sebuah fenomena yang kompleks, sangat sukar untuk membuat rumusan yang menyeluruh tentang arti ciri-ciri kepemimpinan.
6. Kepala Sekolah Sebagai Moderator Bagi dunia pendidikan merupakan suatu keharusan untuk selalu mencermati perubahan-perubahan yang terjadi agar dapat direspons dengan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hubungan ini, inovasi pendidikan menjadi semakin penting terus dikaji, diaplikasikan, dan dikomunikasikan pada seluruh unsur yang terlibat dalam pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap inovatif di lingkungan pendidikan. Karena tanpa inovasi yang signifikan, pendidikan hanya akan menghasilkan lulusan yang tidak mandiri, selalu bergantung

pada pihak lain. Untuk pendidikan harus digunakan sebagai inovasi nasional bagi pencapaian dan unggulan kompetitif selalu dapat dipertahankan.

7. Kepala Sekolah Sebagai Motivator Motivasi adalah dorongan besar yang menggerakkan seseorang bertindak. Dorongan ini berada pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Maka kepala sekolah harus mampu memberi motivasi dan menjadi motivasi bagi orang-orang di lingkungan sekolah baik itu guru, siswa, maupun yang lainnya agar terus meningkatkan kualitas dirinya.
8. Kepala Sekolah Sebagai Evaluator Kinerja kepala sekolah memiliki peran yang besar pada keberlangsungan sekolah dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Setiap sekolah perlu memperhatikan bagaimana upaya untuk terus meningkatkan kinerja para guru agar dapat memberi kontribusi optimal bagi meningkatnya kinerja sekolah. Dengan demikian, perhatian pada kinerja harus menjadi fokus dan semangat sekolah. Untuk itu, sekolah perlu memahami bagaimana kondisi kinerja para guru agar dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan bagi kepentingan sekolah serta diperlukan suatu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja suatu sekolah. Pada tahapan ini dapat diperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan para guru baik itu kebijakan penggajian atau promosi. Adapun tujuan dari penilaian kinerja, bagi kepala sekolah adalah untuk mengetahui kondisi yang ada dari kinerja para guru serta bagaimana meningkatkan kinerja mereka merupakan hal

penting dalam upaya meningkatkan kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan disekolahnya, seorang kepala sekolah mengorganisasikan sekolah dan personilnya yang bekerja didalamnya dalam situasi yang efektif, efisien, demokratis, dan kerjasama tim (team work) dibawah kepemimpinannya, program pendidikan untuk para murid harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi. Dalam pelaksanaan program kepala sekolah harus dapat memimpin secara professional, para staf pengajar, bekerja secara ilmiah, penuh perhatian dan demokratis dengan menekankan pada perbaikan proses belajar mengajar secara terus-menerus.

G. Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan mempengaruhi keberhasilan kerja dan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkan menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Kompetensi kepala sekolah terbentuk atas sejumlah indikator yang komperhensif, saling menunjang dan sinergis yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. (Wahyudi, 2012: 29)

H. Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum

Kepala sekolah mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah, kepala sekolah yang sesungguhnya secara terus menerus terlibat dalam pengembangan dan implementasi kurikulum, memberikan dorongan dan bimbingan kepada guru-guru, walaupun guru dapat mengembangkan kurikulum sendiri. (Mulyasa, 2007: 187)

Pelaksanannya harus selalu didorong dan dibantu oleh kepala sekolah, guru dan kepala sekolah harus bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem pendidikan kepada masyarakat serta mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di kelas. Peranan kepala sekolah ini lebih banyak berkenaan dengan implementasi kurikulum di sekolahnya. Kepala sekolah juga mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya, kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi suasana sekolah dan pengembangan kurikulum. (Hamka Ilyas, 2011: 16)

Baik ketua administrator maupun kepala sekolah, bertindak secara aktif sebagai pemimpin kurikulum atau secara pasif dengan mendelegasikan tanggungjawab kepemimpinan pada bawahan. Pengembangan kurikulum akan hancur menuju kegagalan tanpa dukungan kepala sekolah. Pada saat ini beberapa kepala sekolah mengambil posisi dimana mereka mencoba untuk menjadi para pemimpin instruksional yaitu sebuah penekanan yang terbaru dan terus tumbuh, pengembangan kurikulum dan instruksional tidak memimpin daftar prioritas dan banyak kepala sekolah, bahwa kepala

sekolah terpisah antara peran yang diinginkan sebagai pemimpin instruksional dan peran aktualnya sebagai administrator dan manajer. (Abdul Manab, 2015: 47-48)

Dengan demikian kepala sekolah mungkin menjadi lebih memainkan peran langsung dan utama dalam pengembangan kurikulum. Di masa yang akan datang kepemimpinan kepala sekolah instruksional mungkin menempati bagian teratas daftar tugas yang sebenarnya salah satunya dalam mengembangkan kurikulum. Kepala Sekolah merupakan tokoh kunci dalam mengkoordinasikan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha dalam pengembangan kurikulum sekolah. Dalam aspek perencanaan, kepala sekolah merupakan perilaku yang selalu terlibat dan bahkan sering menjadi tumpuan dalam kegiatan perencanaan dan pengembangan kurikulum, mulai dari konsep hingga hal-hal yang lebih teknis.

Bisa jadi kepala sekolah tidak terlibat secara fisik pada keseluruhan kegiatan perencanaan, namun kepala sekolah terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu.

Kepala sekolah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengelola perubahan di sekolah yang dipimpingnya yaitu melalui beberapa perannya mengelola perubahan secara bertahap dan terencana dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode guna mendorong semua sumber daya yang ada khususnya guru untuk melakukan perubahan cara kerja, membuat rencana, membagi waktu, melaksanakan rencana, melakukan perbaikan dan evaluasi. (Hadi Kuncoro, 2015: 5)

Kepala sekolah memelihara proses pengembangan kurikulum dengan membentuk sebuah iklim dimana para perencana merasa dihargai dan mereka dapat memenuhi, dengan

menggunakan istilah Abraham Maslow yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kepala sekolah harus mendorong memfasilitasi proses. Semenjak kepala sekolah memegang kekuasaan bagi pembuatan keputusan akhir pada sekolah. Kepala sekolah harus memberikan pertimbangan serius atau rekomendasi yang dibuat oleh kelompok studi kurikulum sekolah. Lebih jauh kepala sekolah harus menunjukkan minat yang tulus dalam proses pengembangan kurikulum. (Abdul Manab, 2015: 51)

Kepala sekolah profesional tidak saja dituntut untuk melaksanakan berbagai tugasnya disekolah, tetapi ia juga harus mampu menjalin hubungan/kerja sama dengan masyarakat dalam rangka dalam membina pribadi peserta didik secara optimal. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orangtua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk 1) saling pengertian antara sekolah, orangtua, masyarakat, dan lembaga/lembaga lain yang ada di masyarakat, 2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing. 3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah. (Mulyasa, 2007: 187)

Peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah sangatlah penting, maka dari itu ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut:

1. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah.
2. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa (Wahyosumidjo, 2011: 82)

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat formal, sedangkan dari sisi yang lain seorang kepala sekolah dapat berperan sebagai menejer, pemimpin, pendidik dan yang tidak kalah penting seorang kepala sekolah juga berperan sebagai staf.

Daftar Pustaka

- Arifin, Zainal. 2011. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Daryanto, M. 1996. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Husaini, Usman. 2009. *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Ilyas, Hamka. 2011. *Konsep dan Teori Pengembangan Kurikulum*. Makassar: Alauddin Press
- Kuncoro, Hadi. "Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Kurikulum 2013", *Jurnal Manajemen Mutu Terpadu*, Vol. 3 No. 1, 2015
- Lazaruth, Soewadji. 1994. *Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya*, Cet. Ke-6. Yogyakarta: Kanisius
- Manab, Abdul. 2015. *Manajemen Perubahan Kurikulum*. Yogyakarta: Kalimedia
- Muhaimin, et al. 2011. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rivai, Viethza. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Grafindo Persada
- Rusyan, H. A. Tabrani. 2013. *Profesionalisme Kepala Sekolah*. Jakarta: PT. Pustaka Dinamika
- Somad, Rismi, dkk. 2014. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta

- Sudrajat, Hari. 2004. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bandung: Cipta Cekas Grafika
- Sulistiyorini. 2006. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: ELKAF
- Wahjosumidjo. 2007. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tjauan Teoritik Dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Wahyudi. 2012. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam organisasi Pembelajar*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.

BAB V

PERKEMBANGAN KURIKULUM MADRASAH DI INDONESIA

Mansyur



A. Sejarah Perkembangan Madrasah Di Indonesia

Banyak teori yang berpendapat tentang sejarah munculnya madrasah di Indonesia, tetapi sangat sulit dipastikan kapan istilah madrasah digunakan sebagai salah satu jenis pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Namun dapat dipastikan bahwa madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20 (Manpan Drajat, 2018).

Namun demikian perkembangan madrasah awal abad 20 tidak bisa disamakan dengan perkembangan madrasah di Timur Tengah saat itu yang sama-sama sedang berkembang. Perkembangan madrasah di Timur Tengah sudah memasuki masa modern yang sudah mengadopsi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum (Maksum, 1999). Semen sebelum abad 20 tradisi Pendidikan Islam di Indonesia belum mengenal istilah madrasah, kecuali pengajian Al-Quran, masjid, pesantren, surau, langgar dan tajug.

Dalam praktek pendidikannya tidak menggunakan sistem kelas seperti sekolah modern, namun sistem penjenjangan dilakukan dengan melihat kitab yang diajarkan.

Munculnya madrasah pada abad 20 ini ada juga yang meperkirakan berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Mengapa madrasah muncul pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20, bukan sebelumnya, Ada dua analisis: pertama, karena beberapa kali usulan Volksraad (Dewan Rakyat) agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum selalu ditolak oleh Belanda. Belanda bahkan memberlakukan ordonansi Indische Staatsregeling pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran hanya boleh berlaku di luar jam sekolah (Djaelani, 1982).

Sampai dengan akhir pemerintahan Belanda di Indonesia, pengajaran agama di sekolah umum atau open baar orderwijs tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah di luar kebijakan Belanda yang memberi muatan pelajaran agama Islam lebih, namun berbeda dengan komposisi materi PAI di pesantren dan sejenisnya yang telah ada sebelumnya. Lembaga tersebut adalah madrasah.

Dari berbagai literatur tentang munculnya madrasah di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir di mana banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur-Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air.

Kedua, adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Pemerintah melakukan standar ganda dalam politik etiknya. Pemerintah penjajah hanya mengembangkan pendidikan yang memiliki

manfaat bagi pemerintah penjajah saja. Perbaikan pendidikan berbasis Islam justru mereka khawatirkan berdampak buruk bagi kepentingan penjajah. Pada awalnya pemerintah penjajah agak menggunakan “tradisi Pendidikan” pribumi untuk menerapkan pendidikan dalam rangka politik etiknya akan tetapi hal ini tidak terjadi, hal ini diungkapkan oleh A. Steenbrink yang dikutip oleh H. Maksum (1998:93) dinyatakan bahwa dalam membahas penelitian yang diperintahkan Gubernur Van Der Capellen 1819, seorang sarjana Belanda Brugmen menduga bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan alasan politik asosiasi Hindia Belanda. Tetapi hal ini dalam kenyataannya tidak terbukti.

Hal tersebut tidak terlaksana karena pada tataran teknis usulan tersebut sulit untuk direalisasikan karena, tradisi pendidikan Islam saat itu dianggap tidak layak diadopsi baik dari sisi kurikulum, manajerial atau metodenya. Pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya khususnya dalam rangka misionaris (Maksum: 1999:93).

B. Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia

Sebagian sarjana berasumsi bahwa tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, kecuali hanya menambahkan muatan dan corak ke-Islaman terhadap tradisi pendidikan yang sudah ada, terutama yang bermula dari agama Hindu. IP Simanjuntak berargumentasi misalnya bahwa, “masuknya ajaran Islam tidak merubah hakekat agama yang formil, yang berubah sejak pengembangan agama Islam adalah:

isi agama yang dipelajari, bahasa yang menjadi wahana bagi agama yang dipelajari itu, serta latar belakang pelajar-pelajar". Ditambahkannya lagi, "dalam zaman pengembangannya, agama Islam tidak mengalami perubahan. Yang dimaksudkan dengan kalimat itu, ialah yang berkenaan dengan struktur organisasi pendidikan keagamaan itu. Mengikuti asumsi ini orang tentu akan mudah cenderung beranggapan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi pengembangan pemerintah Hindia Belanda. Mengingat struktur dan mekanismenya yang hampir sama, sekilas dapat diduga bahwa madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah yang hanya diberi muatan dan corak ke-Islaman (Maksum, 1999).

Asumsi seperti itu agaknya tidak sepenuhnya benar, meskipun dalam ukuran tertentu tidak bisa diabaikan bahwa pertumbuhan madrasah itu merupakan respon pendidikan Islam terhadap sistem persekolahan yang sudah menjadi kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda dalam rangka politik etisnya. Latar belakang lain yang layak dipertimbangkan adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan madrasah pada awal abad 21 ini merupakan bagian dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yang memiliki corak cukup intensif dengan gerakan pembaharuan di Timur Tengah (Fauzan & Amiruddin, 2015). Sebagai agama yang universal, Islam membawa peradabannya sendiri termasuk dalam bidang pendidikan yang berakar pada tradisi yang sangat panjang. Sejak masa Rasulullah ketika bersentuhan dengan situasi yang partikular, peradaban Islam itu tetap mempertahankan esensinya, walaupun mungkin secara instrumental menampakkan bentuk-bentuk yang kondisional.

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan madrasah di Indonesia, aspek universal dari tradisi itu tidak bisa dilepaskan karena memang dalam kenyataannya eksistensi lembaga

madrasah Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik, dan bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya.

Senada dengan hal di atas Muhaimin menegaskan bahwa latar belakang lahirnya madrasah di Indonesia adalah:

1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam.
2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah.
3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka.
4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi (Muhaimin & Mujib, 1993).

Dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia, kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam, baik di Jawa, Sumatera maupun di Kalimantan. Bagi kalangan pembaharu, pendidikan agaknya senantiasa dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan ke-Islaman masyarakat.

Dalam kenyataan, pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu ubudiyah. Sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di masjid, surau dan pesantren, pandangan ke-Islaman masyarakat agaknya kurang diperhatikan kepada masalah-

masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu, langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikannya. Dalam konteks inilah agaknya pada awal abad 20 madrasah muncul dan berkembang di Indonesia.

C. Dinamika Eksistensi Madrasah di Indonesia

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa eksistensi madrasah tidak dapat terlepas dari gejolak politik pendidikan yang terjadi di Indonesia. Gejolak politik pendidikan tersebut berupa sejauh mana hubungan Negara dengan agama Islam. Dalam Hal ini eksistensi madrasah merupakan representasi dari kondisi hubungan Negara dan agama Islam. Mengenai hal ini Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arif mengilustrasikan bahwa dalam situasi dimana hubungan Islam dengan Negara mengarah pada konflik. Perkembangan madrasah cenderung terbatas, bahkan mungkin terancam eksistensinya (Dawam & Ta'arif, 2004).

Begitu pun sebaliknya, dalam hubungan Negara dan Islam bersifat integratif, kebijakan orde baru terhadap madrasah tampak sangat positif dengan menempatkan madrasah secara konsisten dalam pendidikan nasional.

Gambaran di atas menerangkan bahwa eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional juga dipengaruhi oleh beberapa kepentingan pemerintah. Terlepas dari beberapa kepentingan pemerintah tersebut, maka selanjutnya akan dipaparkan dinamika eksistensi madrasah yang pembahasannya dibagi kepada: 1) Madrasah di awal kemerdekaan, 2) Madrasah

SKB tiga Menteri, 3) Madrasah dalam UU Sisdiknas No. 2 tahun 1989, dan 4) Madrasah dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

1. Madrasah di Awal Kemerdekaan

Perkembangan pendidikan Islam di awal kemerdekaan Indonesia merupakan pendidikan dengan perjuangan yang panjang dalam mencapai pengakuannya (legal-formal). Dalam hal ini masyarakat muslim saat itu sangat berharap pada Departemen Agama yang diresmikan pada tanggal 03 Januari 1946. Keberadaan Departemen Agama ketika itu merupakan lembaga pemerintahan yang memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya gesekan diantara kecenderungan pengabaian pendidikan Islam dan kecenderungan mempertimbangkan pendidikan Islam tersebut.

Dalam hal ini masyarakat muslim menaruh harapan yang besar terhadap kinerja Departemen Agama, yaitu masyarakat muslim Indonesia yang menjadi mayoritas mengharapkan agar pendidikan Islam diselenggarakan di sekolah, dan sekaligus mengharapkan Departemen Agama untuk mengembangkan eksistensi madrasah, dimana pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia madrasah telah dirintis oleh para pendirinya dengan mengikuti sistem pendidikan modern dengan muatan kurikulum pengajaran agama Islam, akan tetapi tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah belanda saat itu. Dan sesudah Indonesia merdeka sangat wajar rasanya bila masyarakat muslim Indonesia berharap legalitas untuk pendidikan madrasah.

Menyahuti aspirasi masyarakat muslim tersebut, dalam hal ini Departemen Agama memiliki beberapa tugas sebagaimana tertulis dalam sebuah dokumen yang

menyebutkan tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi: pertama, memberi pengajaran agama di sekolah negeri maupun partikuler, kedua, memberikan pengetahuan umum di madrasah, dan ketiga mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) (Steenbrink, 1986).

Dari beberapa tugas bagian pendidikan Departemen Agama tersebut diatas, terlihat bahwa pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama memiliki peranan yang sangat sentral dalam pengembangan pendidikan Islam khususnya pada pengembangan madrasah. Hal inipun terlihat dengan dikeluarkannya peraturan menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama No.7 Tahun 1952. Dimana dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa pemerintahan melalui Departemen Agama akan memberikan bantuan-bantuan kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan. Melalui peraturan menteri tersebut juga dijelaskan ketentuan jenjang pendidikan pada madrasah yang terdiri dari:

- a. Madrasah rendah, sekarang namanya disebut Madrasah Ibtidaiyah.
- b. Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut dengan Madrasah Tsanawiyah.
- c. Madrasah lanjutan atas, sekarang disebut namanya Madrasah Aliyah (Putra Daulay, 2007).

Tidak hanya sebatas memberikan bantuan dan bimbingan kepada madrasah, sebagai upaya peningkatan kualitas madrasah, maka pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, melakukan penegerian terhadap beberapa madrasah yang telah ada saat itu, baik madrasah tersebut yang dikelola oleh pribadi maupun madrasah yang

dikelola oleh organisasi-organisasi ke-Islaman. Dalam hal ini sebagai mana yang ditulis oleh Haidar tercatat ratusan madrasah yang dinegerikan saat itu, yang meliputi semua jenjang mulai dari tingkat Ibtidaiyah dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat Tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) (Hasbullah, 1994).

Mengenai penegerian beberapa madrasah tersebut, Abdul Rahman Shaleh menjelaskan “penegerian madrasah saat itu merujuk kepada Surat Menteri Agama No. 80 Tahun 1967, yaitu dengan menegerikan Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin, Magetan Madiun dan Madrasah Aliyah al-Islam Surakarta. Ia juga mengungkapkan bahwa madrasah negeri muncul sebagai akibat penyerahan 205 buah SRI (Sekolah Rakyat Islam) dari Pemerintahan Daerah Aceh (1946), 19 buah SRI Lampung dari Residen Lampung (1948), 1 Buah Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, warisan Kesunanan (1956).

Penegerian beberapa madrasah tersebut masih menurut Rahman; juga dimaksudkan sebagai percontohan bagi madrasah swasta, sedangkan pembinaan madrasah swasta pada waktu itu diklasifikasikan menjadi status terdaftar dan disamakan. Pada status terdaftar madrasah mengikuti ujian persamaan madrasah negeri dan pada status dipersamakan madrasah mempunyai hak yang sama dengan madrasah negeri (Rahman Shaleh, 2005).

Di awal kemerdekaan Indonesia, Departemen Agama juga pernah melaksanakan sebuah kebijakan yang strategis dalam memperbaharui sistem pendidikan di madrasah. Departemen Agama yang saat itu dipimpin oleh KH. Moh. Ilyas (1953-1959) memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar

(MWB) 8 tahun. Lamanya belajar MWB 8 tahun ini dengan pertimbangan bahwa pada umur 6 tahun anak sudah berhak bersekolah dan pada umur 15 tahun sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku anak telah diizinkan untuk mencari nafkah.

Dilaksanakannya Madrasah Wajib Belajar (MWB) adalah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan namanya, MWB turut berusaha dalam pelaksanaan Undang-undang kewajiban Belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini MWB akan diperlakukan mempunyai hak dan kewajiban sebagai sekolah negeri atau sekolah partikelir yang melaksanakan Wajib Belajar.
- b. Pendidikan Terutama sekali diarahkan kepada pembangunan jiwa bangsa untuk mencapai kemajuan dilapangan ekonomi, industrialisasi dan transmigrasi.

Pengorganisasian dan struktur kurikulum serta sistem penyelenggaraan MWB diatur sebagai berikut:

- a. MWB adalah tanggung jawab pemerintah baik mengenai guru-guru, alat-alat, maupun buku-buku pelajarannya, apabila madrasah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk dijadikan MWB.
- b. MWB menampung murid-murid yang berumur antara 6-14 tahun. Tujuan MWB adalah untuk mempersiapkan mutu murid untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam lapangan ekonomi industrialisasi dan transmigrasi.
- c. Lama belajar MWB adalah 8 tahun.

- d. Pelajaran yang diberikan pada MWB terdiri dari tiga kelompok studi, yaitu pelajaran agama, pengetahuan umum dan pelajaran keterampilan dan kerajinan tangan.
- e. 25% dari jumlah jam pelajaran digunakan untuk pelajaran agama, sedang 75% untuk pelajaran pengetahuan umum dan keterampilan atau kerajinan tangan (Zuhairini, 1986).

Dengan demikian, pelajarannya meliputi:

- a. Pelajaran untuk pengembangan akal disebut kelompok pelajaran pengetahuan alam.
- b. Pelajaran untuk pengembangan perasaan dan kemauan atau hati disebut kelompok pelajaran agama.
- c. Pelajaran untuk pengembangan kecekatan dan keterampilan tangan disebut kelompok pelajaran kerajinan tangan (Soemanto, 1983).

2. Madrasah dalam SKB Tiga Menteri

Usaha peningkatan mutu madrasah tampaknya bergulir terus dan usaha ke kesatuan sistem pendidikan nasional dalam rangka pembinaan semakin ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas dan wewenang Departemen Agama saja, tetapi merupakan tugas pemerintah secara keseluruhan bersama masyarakat.

Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa siswa-siswi madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang

sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Tidak dapat dinafikan, bahwa kelahiran madrasah SKB tiga menteri merupakan kekhawatiran masyarakat muslim Indonesia dengan eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Dengan berlakunya SKB tiga menteri tersebut, maka eksistensi Madrasah lebih nyata dan ini merupakan langkah yang strategis sebagai tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional.

Beberapa diktum yang tercantum dalam SKB tiga menteri tersebut menguatkan eksistensi madrasah, seperti dalam Bab I, pasal 1, ayat 2, yang berbunyi:

- a. Madrasah Ibtidaiyyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
- b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
- c. Madrasah Aliyah, Setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 Menteri tersebut, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh Madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Kurikulum yang dikeluarkan tersebut, juga dilengkapi dengan:

- a. Pedoman dan aturan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah, sesuai dengan aturan yang berlaku pada sekolah-sekolah umum

- b. Deskripsi berbagai kegiatan dan metode penyampaian program untuk setiap bidang studi agama, maupun bidang studi pengetahuan umum.

Dengan diberlakukannya kurikulum standar yang menjadi acuan, maka telah terjadi keseragaman madrasah dalam bidang studi agama, baik kualitas maupun kuantitasnya, kemudian pengakuan dan persamaan yang sepenuhnya antara madrasah dengan sekolah umum sehingga madrasah mampu berpacu dengan sekolah umum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun SKB 3 Menteri tersebut menetapkan:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan nilai ijazah sekolah umum yang setingkat
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas
- c. Siswa madrasah dapat berindah ke sekolah umum yang setingkat (Hasbullah, 1994).

Selanjutnya mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- b. Pembinaan mata pelajaran Agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- c. Pembinaan dan pengawasan mutu Mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Beberapa penjelasan diktum yang terdapat dalam SKB tiga Menteri tersebut, dengan jelas memperlihatkan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang setara

dengan sekolah umum, yaitu lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya sebanyak 30%, di samping mata pelajaran umum.

Mengenai mata pelajaran madrasah SKB tiga Menteri ini, Maksu menjelaskan; sekalipun presentase mata pelajaran agama Islam mencakup sekurang-kurangnya 30%, namun semangatnya tetap 100%. Pengertiannya “mata pelajaran agama tetap 100% diberikan di Madrasah Aliyah sebagaimana yang sudah biasa dilaksanakan selama ini, hanya waktu yang disediakan untuk menyajikan mata pelajaran agama tersebut 30 % dari keseluruhan waktu/jam pelajaran yang ada di madrasah Aliyah (Maksu, 1999). Muhaimin menjelaskan bahwa bahwa porsi 70 % pengetahuan umum dan 30 % pengetahuan agama rupanya dipahami secara simbolik kuantitatif dan bukan substansial kualitatif, sehingga lagi-lagi output-nya menjadi mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanya pun tidak jauh berbeda (Muhaimin, 2004).

Dengan berlakunya SKB tiga Menteri tersebut, maka perombakan kurikulum pada madrasah pun mengalami perubahan. Sehingga dengan SKB tiga Menteri tersebut madrasah memuat mata pelajaran-pelajaran umum dalam jumlah yang sama dengan kurikulum sekolah, sehingga dengan demikian madrasah dengan SKB tiga menteri ini dapat juga disebut dengan sekolah plus agama Islam bila ditinjau secara kelembagaan.

3. Madrasah dalam UU Sisdinas No 2 Tahun 1989

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan Undang-undang yang telah menjadikan madrasah sebagai sub sistem dalam pendidikan nasional. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang ketentuan jalur dan jenis pendidikan, berhubungan dengan madrasah maka dalam undang-undang tersebut madrasah digunakan dengan istilah sekolah keagamaan, hal ini berarti bahwa madrasah merupakan lembaga yang sama seperti sekolah pada setiap tingkat dan jenisnya.

Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat diamati pada kurikulum dari semua jenjang pendidikan madrasah, mulai dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai dengan „Aliyah. Secara umum perjenjangan itu pun paralel dengan perjenjangan pada pendidikan sekolah, mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sampai dengan Sekolah Menengah Umum. Di bawah ketentuan yang terintegrasi itu, Madrasah Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar Berciri Khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Berciri Khas Islam, keduanya-duanya, MI dan MTs, termasuk dalam Kategori pendidikan dasar. Sedangkan Madrasah Aliyah, pada dasarnya dikategorikan sebagai Sekolah Menengah umum Berciri Khas Islam.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut menghendaki persamaan kurikulum pendidikan di antara madrasah dan sekolah umum pada setiap jenis dan jenjangnya. Mengenai kurikulum ini dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam. Adapun kutipan dari Keputusan Menteri Agama tersebut, sebagai berikut: "Isi

kurikulum pendidikan dasar yang berciri khas agama Islam, di samping wajib memuat bahan kajian sebagaimana tersebut di atas, juga wajib memuat bahan kajian sebagai ciri khas agama Islam, yang tertuang dalam mata pelajaran agama dengan uraian sebagai berikut:

- a. Qur'an Hadis.
- b. Aqidah Akhlak.
- c. Fiqh.
- d. Sejarah Kebudayaan Islam, dan
- e. Bahasa Arab yang diselenggarakan dalam iklim yang menunjang pembentukan kepribadian muslim.

Dengan adanya Keputusan Menteri Agama tersebut, maka jelaslah kurikulum madrasah selain memuat mata pelajaran umum sebagaimana yang biasanya termuat dalam kurikulum sekolah pada umumnya, kurikulum madrasah juga memuat pelajaran agama, dan muatan pelajaran agama inilah yang menjadikan madrasah sebagai sekolah berciri khas Islam.

Mengenai keberadaan madrasah Aliyah, pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama melalui menterinya, mengeluarkan Keputusan Menteri agama No. 370 Tahun 1993, di mana dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah adalah sekolah Menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Jika PP No. 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah kepada: pendidikan Menengah Umum, Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Menengah Keagamaan, Pendidikan Menengah Kedinasan, dan Pendidikan Menengah Luar biasa, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut, maka Madrasah Aliyah

dibagi kepada dua macam program pendidikan. Pertama, Madrasah Aliyah yang kurikulumnya dan studinya sama dengan Sekolah Menengah Umum, dan yang kedua merupakan Madrasah Aliyah Keagamaan.

Mengenai kurikulum Madrasah Aliyah dalam Keputusan Menteri tersebut, maka sesungguhnya kurikulum madrasah memuat beberapa mata pelajaran umum, sebagaimana yang ada pada kurikulum Sekolah Menengah Umum, dan juga memuat pelajaran agama (Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab), sama seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah, keberadaan pelajaran agama dalam Madrasah Aliyah menjadikannya sebagai Sekolah Menengah Umum berciri khas agama Islam. sehubungan dengan hal ini, Haidar menyatakan bahwa tujuan Madrasah Aliyah tersebut ada dua, pertama perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa, kedua pelaksanaan ciri-ciri ke-Islamannya (Putra Daulay, 2007).

Mengenai Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), yang merupakan madrasah yang memuat mata pelajaran agama sebesar 70% dan pelajaran umum sebanyak 30% dengan Tujuan dari program madrasah ini adalah menyiapkan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam.

4. Madrasah dalam UU Sisdinas No. 20 Tahun 2003

Pada dasarnya keberadaan madrasah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tidak jauh berbeda dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, namun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 penyebutan madrasah secara nomenklatur telah tertuang

dalam batang tubuh Undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 ayat (2), yang berbunyi: Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Dan pada pasal 18 ayat (3), yang berbunyi: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Penjelasan di atas, menegaskan bahwa keberadaan madrasah semakin kuat dalam integrasi pendidikan nasional. Sehingga eksistensinya sebagai sekolah berciri khas agama Islam semakin kuat dalam pendidikan nasional. Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah bahwa dengan adanya pengakuan yang kuat terhadap eksistensi madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, adalah mengenai kualitas lembaga tersebut dalam mencetak para lulusannya. Tentunya dengan berciri khas agama Islam yang disandarkan pada madrasah, maka lulusan madrasah haruslah lebih unggul dari lulusan sekolah, yaitu lulusan madrasah merupakan lulusan yang tidak hanya qualified dalam pelajaran umum, namun juga qualified dalam pelajaran agama. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah para lulusan madrasah khususnya dan para pihak pengelolanya.

Demikianlah beberapa dinamika yang terjadi pada eksistensi madrasah setelah Indonesia merdeka. Diawali dari hanya sebagai lembaga yang memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, berevolusi sebagai lembaga yang termasuk dalam subsistem pendidikan nasional, hingga akhirnya madrasah menjadi sistem yang

integratif dalam sistem pendidikan nasional, dimana madrasah tersebut merupakan sekolah umum yang berciri khas Agama Islam.

D. Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah

1. Hakikat Kurikulum PAI di Madrasah

Jika dilihat dari pandangan filosofis, hakikat kurikulum ialah seperangkat yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk citra lembaga pendidikan sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dari kurikulum sendiri bersifat fleksibel. Sifat dinamis, aktual, teoritis, dan aplikatif merupakan ciri dan sifat kurikulum yang baik (Basri, 2009). Ada beberapa ciri kurikulum pendidikan Islam yang menurut as Syaibani, berikut penjelasannya:

- a. semua tujuannya mengutamakan tujuan kepentingan agama dan perbaikan akhlak. Di sini, penerapannya pada semua aspek baik kandungan, metode, alat, dan tekniknya mengandung jiwa agama.
- b. dapat merefleksikan semangat, ajaran dalam agama juga pemikirannya yang mencakup seluruh cakupan aspek maupun kandungannya, adalah tujuan disusunnya kurikulum. Semua materi berkembang secara menyeluruh mencakup pengembangan dalam semua aspek pribadi peserta didik baik psikisnya, kognitifnya, spiritual dan juga sosialnya tidak hanya pada penjiwaan agama saja.
- c. keseimbangan dalam pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan individu dan juga dalam aspek sosial memerlukan perhatian khusus, tanpa mengabaikan

penyeimbangan pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum.

- d. dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik memerlukan adanya prinsip menyeluruh yakni penataan dalam seluruh mata pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, seperti pengetahuan dalam bidang seni, bidang bahasa, dan sebagainya.
- e. adanya prinsip kesesuaian baik dalam minat dan bakat dengan alam sekitar, budaya, dan juga sosial masyarakat, dalam penyusunan kurikulum (Sidik, 2016).

Pada suatu lembaga, mencapai tujuan bersama dan sebagai acuan dalam melaksanakan aktivitas pendidikan merupakan fungsi kurikulum sebagai alat. Baik bagi guru maupun kepala sekolah kurikulum berguna sebagai pedoman dalam bekerja. Sedangkan bagi wali murid kurikulum dapat berfungsi sebagai acuan atau gambaran agar wali murid dapat ikut andil dalam mencapai tujuan para peserta didik (Zaini, 2009). Pengaplikasian dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam, melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan dan sikap (Ahmad Taufik, 2019).

Dalam proses untuk mengantarkan peserta didik beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menjadi pribadi yang unggul, menjadi pribadi yang baik, mampu menganalisa kemajuan IPTEK, juga dapat membawa diri dalam masyarakat, bangsa, juga negara merupakan tujuan utama diperlukannya pengembangan kurikulum pembelajaran PAI di madrasah.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah

Menurut Al Syaibani, kurikulum pendidikan agama Islam ada tujuh yakni, *Pertama*, baik dalam nilai dan ajaran harus ada prinsip kesinambungan yang sempurna dengan agama. Maksudnya, semua aspek dalam kurikulum harus bernafaskan agama Islam dan sesuai dengan akhlak agama Islam baik tujuan, metode mengajar, kandungan atau isi, maupun cara-cara berperilaku. *Kedua*, prinsip universal atau menyeluruh yakni pada tujuan dan kandungan dalam kurikulum.

Dalam hal ini, kurikulum PAI dapat membina akidah, akal dan jasmani, akan tetapi dapat juga memberi manfaat dalam semua aspek dan lini kehidupan bermasyarakat baik dalam aspek kemanusiaan, fisik, praktis, bidang spiritual, bidang sosial, bidang ekonomi, politik, ilmu agama, bahasa, dan sebagainya (Irsad, 2016). *Ketiga*, adanya keseimbangan relatif baik dalam tujuan dan kandungan kurikulum, *Keempat*, baik dalam bakat, dalam minat, kebutuhan dan kemampuan pelajar harus berdasar pada prinsip pertautan atau kesinambungan. Hal ini juga berlaku dalam lingkungan peserta didik baik fisik maupun sosial di tempat peserta didik saling berinteraksi. *Kelima*, prinsip pemeliharaan perbedaan dalam masing-masing individu baik dalam minat maupun bakat. *Keenam*, dalam perubahan waktu dan tempat harus berdasarkan pada prinsip penerimaan. *Ketujuh*, dalam berbagai macam disiplin ilmu harus memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dengan aktifitas dan pengalaman dalam prinsip kurikulum (Muhaimin, 2012).

3. Landasan Dalam Mengembangkan Kurikulum PAI di Madrasah

Beberapa faktor yang wajib dipertimbangkan dan diperhatikan ketika menyusun kurikulum dan mengembangkan kurikulum PAI pada sebuah instansi atau lembaga pendidikan (Hamalik, 2008). *Pertama*, yakni landasan agama. Sebagaimana termaktub dalam pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna kepercayaan terhadap Tuhan YME yang sesuai baik dengan agamamaupun dari kepercayaan para pemeluknya dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum. Hal ini mengajarkan agar sifat toleran terhadap perbedaan antara pemeluk agama, perbedaan terhadap kepercayaan menjadi terbentuk pada diri manusia sehingga terbentuk masyarakat yang rukun damai dan tenteram.

Kedua adalah landasan filsafat. Kebutuhan peserta didik dan cita-cita yang ingin dicapai masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi filsafat dalam pendidikan. Cinta akan kebijaksanaan juga merupakan arti dari filsafat. Jika manusia berpengetahuan maka dapat berbuat bijak. Sedangkan berpengetahuan merupakan proses berpikir yang panjang dimulai dari berpikir radikal, logis, sistematis dan mendalam. Dengan berfilsafat segala aspek pengetahuan manusia dapat terpenuhi yakni baik itu meliputi metafisika, aspek epistemologi, aspek aksiologi, etika, estetika, maupun aspek logika maka benar bila filsafat dijadikan sebagai dasar landasan dalam hal ini (Zaini, 2009).

Ketiga landasan dalam psikologi belajar anak. Dalam merumuskan kurikulum yang selaras dengan perkembangan psikis peserta didik, aspek-aspek psikologis ini dapat dijadikan sebagai landasan. Selain memperhatikan kecakapan pemikiran dan toleransi perbedaan individu,

dengan adanya landasan ini juga memperhatikan kesesuaian dengan tahapan kematangan potensi dan bakat peserta didik juga.

Keempat, aspek sosial, penyesuaian dengan budaya sosial keagamaan harus menjadi prinsip dalam pengembangan kurikulum. Hal ini tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa masyarakat memiliki budaya dan tradisi, baik dalam pengetahuan, nilai-nilai ideal, adat kebiasaan, maupun cara

berpikir, dan seni sehingga aspek ini menjadi penting sebab memberikan pandangan bagi kurikulum pendidikan Islam sehingga dapat mengakar terhadap masyarakat, dan perkembangannya adalah harapan dari penerapan kurikulum ini. Dalam referensi yang lain, terdapat landasan lain yang digunakan dalam penyusunan kurikulum yakni landasan IPTEK.

Pendidikan merupakan usaha untuk mempersiapkan anak didik menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman. Harapannya, anak didik saat lulus akan mampu beradaptasi dengan lingkungansekitarnya (Ramayulis & Nizar, 2009).

Daftar Pustaka

- Basri, Hasan. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daulay, Haidar Putra. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Drajat, Manpan. "Sejarah Madrasah di Indonesia", *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.1, January 2018
- Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 1994. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia; Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Irsad, Muhammad. "Pengembangan Kurikulum PAI di Madrasah (Studi atas Pemikiran Muhaimin)". *Jurnal Iqra'* Vol. 2.No. 1. 2016.
- Maksum. 1999. *Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Muhaimin. 2012. *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nizar, Samsul & Ramayulis. 2009. *Filsafat Pendidikan Islam, Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2005. *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sidik, Firman. "Konsep Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam". *Jurnal Irfani*. Vol. 12. No. 1. 2016.

- Soemanto, Wasty. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Steenbrink, Karel A. 1986. *Pesantren Madrasah sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.
- Timur, Djaelani. 1982. *Kebijaksanaan Peminaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: Dirjenaga.
- Zaini, Muhammad. 2009. *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*. Yogyakarta: Teras.
- Zuhairini. 1986. *Sejarah Pendidikan Islam. Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN*. Jakarta. Bumi Aksara

BAB VI

KOMPONEN-KOMPONEN DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

Dedi Eko Riyadi HS



A. Komponen-Komponen Kurikulum

Terdapat banyak pakar dibidang kurikulum yang menyampaikan gagasannya mengenai komponen kurikulum secara. Berikut penulis akan mengutip pemikiran Syaodih Sukmadinata terkait komponen kurikulum secara umum dalam dunia pendidikan, menurutnya dalam unsur atau anatomi tubuh kurikulum yang utama adalah terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut yaitu tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, dan evaluasi. Keempat komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak bias dipisahkan artinya keempatnya akan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Apabila kita menganalisis dengan seksama maka akan dapat dipahami bahwa perkembangan kurikulum juga tak mungkin dipisahkan dari perkembangan komponen-komponen yang mendasari perencanaan dan pengembangan kurikulum. Komponen-komponen itu adalah sebagaimana berikut:

1. Perkembangan tujuan kurikulum
2. Perkembangan materi (bahan) kurikulum
3. Perkembangan alat dan media pendidikan dalam proses belajarmengajar.
4. Perkembangan organisasi kurikulum

5. Perkembangan evaluasi kurikulum sekolah (Hamalik, 2008).

Sedangkan Hamid Syarief menguraikan kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen (Hamid Syarif, 1993), diantaranya:

1. Komponen Tujuan

Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Terkait tujuan pendidikan ini hendaknya disusun secara detail dan benar-benar terkonsep dengan analisis yang mendalam. Dalam hal ini Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Pembahasan lebih lanjut tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN); TPN ini merupakan pedoman atau acuan dan arah pendidikan di Indonesia secara umum. Dengan demikian seluruh lembaga pendidikan di Indonesia akan mengacu ke PTN tersebut. Dengan adanya PTN ini maka setiap setiap madrasah di seluruh Indonesia tidak boleh membuat rumusan tujuan sendiri yang keluar dari koridor Tujuan pendidikan Nasional. Aturan main atau pedoman tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-undang RI terbaru yang telah disahkan oleh anggota DPR RI. Sebagaimana dalam UU RI no. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang SISDIKNAS bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: "Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warg Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

- b. Tujuan Intstitusional (TI) atau lembaga; sudah pasti bahwa setiap lembaga pendidikan antara satu sama lainnya mempunyai tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan kelembagaan dirumuskan oleh masing-masing lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lembaga dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemimpin lembaga pendidikan dimanapun dalam merumuskan Tujuan Isntitusional, tidak boleh asal merumuskan, perlu dilakukan. dengan ilmu yang cukup dan analisis yang mendalam.
- c. Tujuan Kurikuler (TK); pada dasarnya tujuan kurikuler ini adalah seabagai penunjang untuk lebih matang dan maksimalnya tujuan institusional. Karena semua unsur yang disusun dalam tujuan kurikuler adalah mengacu kepada tujuan institusional. Maka tujuan kurikuler ini bisa disebut barometer apakah tujuan institusional sesuai harapan apa tidak. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional.
- d. Tujuan Intruksional atau Tujuan Pembelajaran (TP); tujuan intruksional ini hal yang berbeda dengan tujuan kurikuler karena tujuan intruksional sendiri merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Adapun tujuan pembelajaran merupakan jenis tujuan yang dirancang dan disusun oleh guru dan

tujuan ini harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Guru senantiasa harus melakukan berbagai upaya maksimal agar nantinya setiap sesi pertemuan merupakan bisa mencapai tujuan kurikuler. Berdasarkan pemaparan di atas terutama berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam lembaga memiliki kewenangan dan hak untuk mengembangkan, mengelaborasi, dan menyusun atau memprogram komponen-komponen kurikulum yang berlandaskan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bagi masing-masing sekolah.

2. Komponen Isi

Dalam kurikulum harus ada yang namanya komponen isi, maksud dari komponen ini adalah komponen yang sengaja didesain untuk mencapai komponen tujuan. Di dalam komponen isi terdapat yang namanya komponen materi. Maksud dari komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi tidak boleh dibiarkan apa adanya, melainkan harus dilakukan berbagai upaya untuk mencapai komponen tujuan, oleh karena itu komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya harus disusun dengan serius dan penuh kajian mendalam yang penting juga adalah haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakekatnya materi kurikulum adalah isi kurikulum.

Dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa “Isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional” (Bab IX, Ps. 39). Sesuai dengan rumusan tersebut isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Materi kurikulum. Dalam materi kurikulum ini berisi topic topic pelajaran yang akan menjadi bahan kajian atau pelajaran siswa.
- b. Materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Penting menjadi kesadaran bersama bahwa tujuan satuan pendidikan antara satu sekolah dan sekolah lainnya akan berbeda dan perbedaan ini akan membawa kepada perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran.
- c. Tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai. Oleh karena itu seperti apapun kurikulum disusun, materi kurikulum kurikulum diarahkan hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Materi kurikulum mengandung aspek-aspek tertentu sesuai dengan tujuan kurikulum, yang meliputi :

- a. Teori, ialah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pendapat sistematis tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan-hubungan antara variable-variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

- b. Konsep, ialah suatu abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dan kekhususan-kekhususan. Konsep adalah definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala.
- c. Generalisasi, adalah kesimpulan umum berdasarkan hal-hal yang khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian.
- d. Prinsip, adalah ide utama, pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.
- e. Prosedur, adalah suatu seri langkah-langkah yang berurutan dalam materi pelajaran yang harus dilakukan oleh siswa.
- f. Fakta, adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat, dan kejadian.
- g. Istilah, adalah kata-kata perbendaharaan yang baru yang khusus yang diperkenalkan dalam materi.
- h. Contoh atau ilustrasi, ialah suatu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian.
- i. Definisi, adalah penjelasan tentang makna atau pengertian tentang suatu hal/suatu kata dalam garis besarnya. Preposisi, adalah suatu pernyataan atau theorem, atau pendapat yang tidak diberi argumentasi.

3. Komponen Strategi

Komponen strategi dan metode adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan

utamanya dalam merumuskan kurikulum. Guru dan kepala sekolah harus benar-benar paham akan dua komponen ini yaitu komponen strategi dan komponen metode karena dua komponen ini juga merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Penting untuk dipahami bahwa komponen strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru-siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu guru harus menggunakan segenap kemampuannya agar strategi yang akan dilakukan nantinya akan memudahkan siswa dalam memahami dan mengamalkan materi ajar yang disampaikan guru, tidak hanya itu yang terpenting adalah siswa merasa senang belajar sebab strategi yang digunakan guru tepat dan kreatif serta inovatif. Apabila dilihat dari esensi strategi maka dapat kita pahami bahwa strategi memiliki dua hal yang penting yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.

Strategi menuju pada pendekatan, metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Pada hakekatnya strategi pengajaran bagus tidaknya diantaranya sangat ditentukan oleh guru itu sendiri, apabila guru serius dan total dalam merancang strategi, strategi yang digunakan kreatif dan inovatif, maka bisa dipastikan strategi itu bisa dikatakan dan bagus serta

sukses dalam realitasnya di lapangan. Dengan kata lain mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran.

4. Komponen Evaluasi

Komponen evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat apakah yang direncanakan sesuai dengan harapan atau yang telah direncanakan atau tidak. Evaluasi ini nantinya akan menjadi seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan, karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target (prilaku yang diharapkan) tidak berhak untuk diluluskan.

Guru tidak boleh membiarkan siswa yang tidak lulus begitu saja, guru hendaknya memberikan pelayanan terbaik dalam membimbing dan mengajar siswa yang tidak lulus itu agar layak untuk naik kelas dan mencapai lulus.

Salah satu fungsi evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Berikut adalah macam-macam evaluasi yang dilakukan dalam proses belajar mengajar.

5. Evaluasi hasil belajar mengajar

Substansi dari evaluasi adalah koreksi atau kegiatan yang dilakukan untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan,

diadakan suatu evaluasi. Dalam dunia pendidikan evaluasi ini disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini ada banyak cara yang dilakukan, namun pada umumnya evaluasi dilaksanakan dengan menyusun butir-butir soal dalam rangka mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan. Untuk tiap tujuan khusus minimal disusun satu butir soal. Menurut lingkup luas bahan dan jangka waktu belajar dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

Evaluasi formatif sangat perlu untuk dilakukan oleh guru kepada siswa mengingat evaluasi formatif ini adalah proses penilaian terhadap tugas yang diberikan kepada siswa dalam jangka waktu yang cukup pendek. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah evaluasi formatif digunakan untuk menilai penugasan siswa setelah selesai mempelajari satu pokok bahasan. Guru dalam hal ini selalu memantau hasil yang dicapai siswa setelah materi pelajaran tersampaikan kepada mereka.

Siswa yang satu dengan yang lainnya mempunyai karakter yang berbeda, diantara mereka adalah terbiasa dalam bertanya terkait pelajaran yang tidak mereka pahami, namun sebagian mereka juga ada yang malu untuk bertanya walaupun dirinya tidak paham akan materi pelajaran. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab guru untuk memahami karakter yang berbeda beda. Hasil evaluasi formatif ini terutama digunakan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar siswa. Dengan demikian evaluasi formatif, selain sebagai fungsi menilai proses, juga merupakan evaluasi atau tes diagnostic

Adapun Evaluasi sumatif berbeda dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif lebih pada menilai penguasaan

siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas, sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama, satu semester, satu tahun atau selama jenjang pendidikan. Dari pemahaman ini dapat disimpulkan adalah bahwa evaluasi sumatif mempunyai fungsi yang lebih luas dari pada evaluasi formatif. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, evaluasi sumatif dimaksudkan untuk menilai kemajuan belajar siswa (kenaikan kelas, Kelulusan ujian) serta menilai efektifitas program secara menyeluruh.

6. Evaluasi pelaksanaan mengajar

Penting untuk dipahami bahwa komponen yang dievaluasi dalam pengajaran sangat luas dan menyeluruh yaitu meliputi keseluruhan pelaksanaan pengajaran, yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran (yang menyangkut sekuens bahan ajar), strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri.

Dalam program mengajar komponen-komponen yang dievaluasi meliputi: komponen tingkah laku yang meliputi aspek-aspek (subkomponen):

- a. Kognitif,
- b. Afektif,
- c. Psikomotor;

Adapun komponen mengajar meliputi:

- a. Isi,
- b. Metode,
- c. Organisasi,

- d. Fasilitas,
- e. Biaya;

Adapun komponen populasi mencakup:

- a. Siswa,
- b. Guru,
- c. Administator,
- d. Spesialis pendididkan,
- e. Keluarga, dan
- f. Masyarakat.

Untuk mengevaluasi komponen-komponen dan proses pelaksanaan mengajar bukan hanya digunakan tes tetapi juga digunakan bentuk-bentuk nontes, seperti:

- a. Observasi,
- b. Studi dokumenter,
- c. Analisis hasil pekerjaan,
- d. Angket dan
- e. Checklist.

Evaluasi dapat digunakan oleh guru atau pihak-pihak lain yang berwenang atau diberi tugas, seperti

- a. Kepala sekolah
- b. Pengawas,
- c. Tim evaluasi kanwil atau pusat.

Penting untuk diketahui oleh semua elemen dalam lembaga pendidikan, bahwa evaluasi hakekatnya adalah pencapaian sekolah yang terus berkembang dan berinovasi

demikian pelayanan yang terbaik kepada anak didik. evaluasi dan umpan balik tidak bisa hanya dilakukan satu kali, namun juga diadakan secara terus menerus, walaupun tidak semua komponen mendapat evaluasi yang sama kedalaman dan keluasannya. Karena sifatnya menyeluruh dan terus menerus tersebut maka evaluasi pelaksanaan sistem mengajar dapat dipandang sebagai monitoring.

B. Model Pengembangan Kurikulum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia model adalah pola atau contoh, acuan, ragam dan lain sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Menurut pemahaman penulis model adalah representasi dari suatu objek, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Pada hakekatnya model itu terdiri dari berbagai informasi yang berkaitan dengan suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya. Dalam pemahaman sederhananya model adalah tiruan dari sesuatu baik itu benda, fenomena, sistem atau kejadian yang sesungguhnya dan ini sangat penting untuk diteliti dan ditelaah. Tentunya ada banyak orang atau ahli sesuai bidangnya memberikan pengertian terkait model, namun substansinya sama.

Dalam kamus bahasa Indonesia kata "pengembangan" secara etimologi yaitu berarti proses/cara, perbuatan mengembangkan. Secara istilah, pengembangan adalah suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, dimana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan (Sutopo & Soemanto, 1993). Riset dan inovasi terus dilakukan demi menemukan pola yang layak untuk

digunakan. Apabila proses penyempurnaan sudah dianggap cukup dan maksimal, maka berakhirilah kegiatan pengembangan tersebut

Pada prinsipnya, pengembangan kurikulum berkisar pada pengembangan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diimbangkan dengan perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan terus mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan pendidikan tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi masa kini yang terus berinovasi dan berkembang. Maka menjadi keharusan semua elemen dalam pendidikan, baik itu kepala sekolah, guru bahkan siswa harus terus melek teknologi dan informasi. Karena berkembangnya teknologi juga mengakibatkan berkembang pula media pembelajaran.

Pada dasarnya manusia, sering kali memiliki keterbatasan dalam kemampuan menerima, menyampaikan dan mengolah informasi, karenanya diperlukan proses pengembangan kurikulum yang akurat dan terseleksi serta memiliki tingkat relevansi yang kuat. Dengan dasar inilah diperlukan suatu model pengembangan kurikulum dengan pendekatan yang sesuai (Sukmadinata, 2013).

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik. Dasar dari pengembangan kurikulum ini adalah hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Ahmad, 1998).

Merujuk kepada pengertian ini, dapat dipahami bahwa pengembangan unsur kurikulum terdiri dari beberapa unsur sebagaimana berikut:

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pelaksanaan
- d. Penilaian
- e. Usaha penyempurnaan

Model yang dipergunakan dalam proses pengembangan kurikulum dapat dikemukakan oleh para ahli pendidikan mulai dari suatu model yang sederhana sampai dengan model yang paling sempurna diantaranya adalah:

1. Model Pengembangan Kurikulum Administratif

Model pengembangan kurikulum ini sudah banyak orang yang mengetahuinya karena model paling lama. Model pengembangan kurikulum ini juga disebut model pengembangan kurikulum *line staff* karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi.

Terdapat istilah lain selain yang disematkan terhadap model kurikulum ini selain yang disebutkan di atas diantaranya juga adalah dikenal dengan model garis dan staf atau dikatakan pula sebagai model dari atas ke bawah. Apapun istilah yang digunakan atau disematkan kepada model pengembangan kurikulum ini, pada substansinya model pengembangan kurikulum ini merupakan pengembangan kurikulum dimulai dari pejabat pendidikan yang berwenang membentuk panitia pengarah, yang biasanya terdiri dari pengawas

pendidikan, kepala sekolah, dan staf pengajar kita. Terdapat tanggung jawab besar yang harus dilaksanakan secara total oleh panitia pengarah tersebut, diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a. Merencanakan,
- b. Memberikan pengarahan tentang garis besar kebijaksanaan,
- c. Menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan.

Setelah kegiatan tersebut selesai, dan dirasa cukup serta maksimal dalam pelaksanaannya, maka langkah selanjutnya adalah kemudian panitia menunjuk atau membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan yang para anggotanya biasanya terdiri dari staf pengajar dan spesialisasi kurikulum. Terdapat beberapa tugas pokok yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja tersebut diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a. Menyusun tujuan-tujuan khusus pendidikan,
- b. Menyusun garis besar pengajaran, dan
- c. Menyusun kegiatan belajar,
- d. Hasil kerja kelompok tersebut direvisi oleh panitia pengarah dan kemudian dilakukan uji coba jika dipandang perlu, walaupun ini jarang dilakukan.

Dari hasil analisis di lapangan, terdapat kelemahan dalam model ini yaitu terletak pada kurang pekannya terhadap adanya perubahan masyarakat, di samping juga karena kurikulum ini biasanya bersifat seragam secara nasional. Sehingga kadang-kadang melupakan

atau mengabaikan adanya kebutuhan dan kekhususan yang ada pada tiap daerah (Nurgiyanto, 1988).

2. Model Pengembangan Kurikulum dari Bawah (*Grass Roots*)

Model pengembangan kurikulum dari bawah ini merupakan kebalikan dari model pengembangan kurikulum yang dibahas sebelumnya (model pengembangan kurikulum administratif). Jika pada model administratif kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas, maka model pengembangan kurikulum ini berasal dari bawah, salah satunya adalah dari guru sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan para pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah.

Model ini mempunyai keyakinan bahwa penerapan kurikulum akan menghasilkan capaian yang maksimal serta efektif apabila para pelaksananya di sekolah sudah diikutsertakan sejak semula kegiatan pengembangan kurikulum itu (Nurgiyanto, 1988).

3. Model Pengembangan Kurikulum Hilda Taba

Pada beberapa buku karya Hilda Taba, yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah *Curriculum Development. Theory and Practice* (1962). Dalam buku ini, Hilda Taba sebagaimana yang di kutip oleh Ahmad dalam bukunya yang berjudul "*Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi*" yaitu Pengembangan model ini, teknisnya di lapangan dilakukan beberapa kegiatan pokok diantaranya adalah melakukan percobaan,

penyusunan teori dan kemudian penerapannya (Ahmad, 1998).

Proses ini dilakukan jelas mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu sebuah upaya mempertemukan antara teori dan praktek serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan pada kurikulum yang terjadi tanpa percobaan. Langkah langkah ini juga dimaksudkan agar dalam perakteknya modek pengembangan kurikulum Hilda Taba ini meminimalisir berbagai kendala yang memungkinkan tidak maksimalnya dalam praktek di lapangan atau sekolah. Dalam pekerjaannya itu, Taba memodifikasi model dasar Tyler agar lebih representative terhadap pengembangan kurikulum di berbagai sekolah.

Dalam pendekatannya, Taba menekankan poin penting dalam model pengembangan kurikulum yaitu

- a. Mempunyai informasi tentang masukan (*input*) pada setiap langkah proses kurikulum.
- b. Menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi (organisasi kurikulum yang logis) dan individu pelajar (psikologi organisasi kurikulum).
- c. Semua kurikulum disusun dari elemen-elemen dasar.
- d. Suatu kurikulum biasanya berisi beberapa seleksi dan organisasi isi; itu merupakan manifestasi atau implikasi dari bentuk-bentuk (*patterns*) belajar dan mengajar.
- e. Program evaluasi hendaknya segera ditindak lanjuti untuk lebih matang dalam memperbaiki kekurangan yang ditemukan di lapangan atau sekolah.

Ada lima langkah pengembangan kurikulum model Taba ini:

Langkah pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Ada delapan langkah dalam kegiatan unit eksperimen ini;

- a. Mendiagnosis kebutuhan,
- b. Merumuskan tujuan-tujuan khusus,
- c. Memilih isi,
- d. Mengorganisasi isi,
- e. Memilih pengalaman belajar,
- f. Mengorganisasi pengalaman belajar,
- g. Mengevaluasi,

Langkah kedua, menguji unit eksperimen. Inti dari langkah kedua ini adalah melakukan atau mempraktikkan kurikulum yang sudah dikembangkan, ini dimaksudkan untuk menelaah dan mengetahui berbagai kesahihan dan kelayakan dalam proses belajar mengajar, disinilah para pengembang kurikulum terus menganalisis merivisi hasil uji coba serta kemudian mensosialisasikannya. Langkah ini tidak hanya cukup dilakukan satu kali, namun hendaknya dilakukan berkali kali dan diberbagai tempat.

Langkah ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Maksud dari kegiatan konsolidasi ini adalah penarikan kesimpulan tentang hal-hal yang lebih bersifat umum yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas. Hal itu dilakukan, sebab meskipun suatu unit eksperimen telah cukup valid dan praktis pada suatu sekolah belum tentu demikian juga pada sekolah yang lainnya. Ini disebabkan karena berbeda tempat dan lokasi sekolah akan berbeda juga budaya dan kultur yang ada sekolah

itu. Untuk menguji keberlakuannya pada daerah yang lebih luas perlu adanya kegiatan konsolidasi.

Langkah keempat, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, harus dikaji oleh para ahli kurikulum dan para professional kurikulum lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui konsep-konsep dasar atau landasan-landasan teori yang dipakai sudah masuk dan dipakai. Dalam langkah keempat ini, keterlibatan para pakar sangat perlu dilibatkan bahkan menjadi keharusan. Analisis dan kemampuan para pakar dalam memberikan masukan dan kebijakan-kebijakan adalah salah satu pilar utama pengembangan kurikulum menuju pengembangan kurikulum yang bermutu.

Langkah kelima, implementasi dan diseminasi, yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah atau sekolah-sekolah yang lebih luas. Dalam praktiknya dilapangan tentunya akan menemukan kekurangan dan kendala kendala, maka taba di sini sangat menekankan akan pentingnya menganalisis berbagai kekurangan dilapangan yang nantinya akan dijadikan rujukan dalam perbaikan pengembangan kurikulum kea rah yang lebih baik yairu pengembangan kurikulum yang bermutu. Di dalam langkah ini masalah dan kesulitan-kesulitan pelaksanaan tetapi dihadapi, baik berkenaan dengan kesiapan guru- guru, fasilitas, alat dan bahan juga biaya.

Langkah ke lima ini dalam analisis penulis menunjukkan bahwa taba dalam langkah pengembangan kurikulum sangat layak diapresiasi karena beberapa hal di bawah ini:

- a. Taba sangat sistematis dan mempunyai pendekatan yang logis terhadap pengembangan kurikulum.

- b. Taba secara teguh menempatkan kerasionalan atau tujuan dari kurikulum dalam rangkaian model kurikulum, meskipun dalam hal ini Taba lebih luas dari pada Tyler.
- c. Pendekatannya lebih menitikberatkan pada anak didik, yang muncul dari interaksinya dengan sekolah-sekolah di California. Selama bekerja dengan para pendidik,
- d. Model kurikulum Tyler dan Taba dikategorikan ke dalam *Rational Model* atau *Objectivis Model* .

4. Model Pengembangan Kurikulum D.K Wheeler

Salah satu buku karya D.K **Wheeler** yang sangat berpengaruh dan sering dijadikan bahan kajian oleh pakar atau praktisi pendidikan yang konsen di wilayah pengembangan kurikulum adalah berjudul *curriculum process*.

Adapun analisis penulis akan pemikiran D.K **Wheeler** (1967) dalam bukunya *curriculum process* terkait pengembangan kurikulum adalah sebagaimana berikut:

- a. Mempunyai argument tersendiri agar pengembang kurikulum (*curriculum developers*) dapat menggunakan suatu proses melingkar (*a cycle process*), yang mana setiap elemen saling berhubungan dan saling bergantung.
- b. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum suatu langkah

tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan (Abdullah, 2014).

Daftar Pustaka

- Abdullah, H. Idi. 2014. *Pengembangan Kurikulum; Teori Dan Praktik*. Jakarta;PT Raja grafindo persada.
- Ahmad, HM. Dkk. 1998/*Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Nurgiyanto. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: BPFEE.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakaya.
- Sutopo, Hendayat. 1993. *Westy Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sebagai Substansi Problem Administrasi Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarif, A. Hamid. 1993. *Pengembangan Kurikulum* (Surabaya: Bina ilmu.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.

BAB VII

DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Moh Yasin



A. Pengertian Desain Kurikulum

Desain kurikulum mengandung arti sebagai pengaturan (*arrangement*) komponen atau elemen-elemen atau anatomi kurikulum yang meliputi tujuan, isi/materi, aktivitas pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan fokus permasalahan dari desain kurikulum adalah berkenaan dengan persoalan *scope*, *sequence*, *continuity*, dan *curriculum integration* (Sabda, 2016).

Desain kurikulum berkaitan dengan kemasakan atau penyusunan empat komponen kurikulum sehingga merupakan suatu kesatuan yang integral untuk membuahkan pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan pendidikan tertentu. Keempat komponen itu diantaranya terkait tujuan pendidikan yang akan dicapai (*goals & objectives*), pengalaman belajar dengan materi pelajaran yang perlu diberikan, susunan materi & pengalaman belajar & Evaluasi terkait informasi seberapa jauh tujuan pendidikan yang telah tercapai (Ansyar, 2021).

Menurut Zais, desain kurikulum dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal yakni terkait permasalahan *sequence* dan *continuity*, atau berkenaan dengan penyusunan sistematika bahan/isi kurikulum berdasarkan tingkat kesulitannya, misalnya dari yang mudah ke yang sulit atau sebaliknya. Dapat pula berdasarkan tingkat kesiapan siswa (kematangan usia ataupun intelektual) dalam

menerima materinya memiliki tingkat kesulitan yang bertingkat dan berkelanjutan atau memiliki *sequence* dan *continuity*. Adapun dimensi horizontal yakni terkait pada permasalahan *scope* dan *integration* atau berkenaan dengan penyusunan isi kurikulum yang sering diintegrasikan dalam suatu proses pembelajarannya, misalnya pengintegrasian beberapa materi yang sama dalam kegiatan pembelajaran bersama (Sabda, 2016).

Desain kurikulum dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang disengaja tentang suatu pemikiran, perencanaan dan penyelesaian bagian-bagian, teknik, dan prosedur yang mengatur suatu tujuan. Jika telah selesai tahapan-tahapan tersebut, maka selesailah dalam mendesain sebuah kurikulum. Tugas selanjutnya adalah melaksanakan kurikulum tersebut di sekolah-sekolah dan tentunya melaksanakan *monitoring* dalam pelaksanaannya.

B. Prinsip-Prinsip Desain Kurikulum

Saylor (Hamalik, 2007) terdapat delapan prinsip ketika akan mendesain kurikulum, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar, sesuai dengan hasil yang diharapkan.
2. Desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru.
3. Desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam

memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah.

4. Desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dalam kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa.
5. Desain harus mendorong guru dalam mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh diluar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah.
6. Desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan, agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya.
7. Kurikulum harus di desain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokratis yang menjiwai kultur budaya kita.
8. Desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima oleh semua kalangan.

C. Model Desain Kurikulum

Dalam mendesain kurikulum, minimal terdapat dua model desain kurikulum, yaitu *The Areas Of Living Design, and The Core Design*.

1. *The Areas of Living Design*

Perhatian terhadap bidang-bidang kehidupan sebagai penyusunan kurikulum telah dimulai oleh Hebert Spencer pada abad 19, dalam tulisan yang berjudul *what knowledge is of most worth? areas of living design* seperti *leaner centered*

design menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah.

Dalam prosedur belajar ini tujuan yang bersifat proses (*process objectives*) dan yang bersifat isi (*content objectives*) diintegrasikan. Penguasaan informasi-informasi yang bersifat pasif tetap dirangsang. Ciri lain yang menggunakan pengalaman dan situasi-situasi dari peserta didik sebagai pembuka jalan dalam mempelajari bidang-bidang kehidupan.

Dalam *the areas of living* hubungannya sangat besar sekali. Tiap pengalaman peserta didik sangat erat hubungannya dengan bidang-bidang kehidupan sehingga dapat dikatakan suatu desain merangkumkan pengalaman-pengalaman sosial peserta didik. Dengan demikian, desain ini sekaligus menarik minat peserta didik dan mendekatkannya pada pemenuhan hidupnya dalam masyarakat.

Desain ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya :

- a. *The areas of living design* merupakan the subject matter design tetapi dalam bentuk yang terintegrasi. Pemisahan antara subject dihilangkan oleh problema-problema kehidupan sosial.
- b. Karena kurikulum diorganisasikan di sekitar problema-problema peserta didik, maka kurikulum ini menggunakan prosedur pemecahan masalah.
- c. Menyajikan bahan ajar yang relevan, untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan.
- d. Menyajikan bahan ajar dalam bentuk yang profesional.
- e. Motivasi belajar dari peserta didik.

Sedangkan kekurangan dari desain ini antara lain:

- a. Penentuan lingkup dan sekuens dari bidang-bidang kehidupan yang sangat esensial sangat sukar.
- b. Lemahnya integrasi kurikulum.
- c. Desain ini mengabaikan warisan budaya.

2. *The Core Design*

The core design timbul sebagai reaksi utama sebagai reaksi utama kepada *separet subject design*, yang sifatnya terpisah-pisah. Dalam mengintegrasikan bahan ajar, mereka memilih mata pelajaran tertentu sebagai inti (*core*). Pelajaran lainnya dikembangkan disekitar *core* tersebut. Menurut konsep ini inti baan ajar dipusatkan pada kebutuhan individu dan sosial. *The core design* biasanya juga disebut *the core curriculum*.

Terdapat banyak variasi pandangan tentang *the core design*. Mayoritas memandang *core curriculum* sebagai suatu model pendidikan atau program pendidikan yang memberikan pendidikan umum. Pada beberapa kurikulum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, *core curriculum* disebut kelompok mata kuliah atau pelajaran dasar umum, dan diarahkan pada pengembangan kemampuan-kemampuan pribadi dan sosial. Kalau kelompok mata pelajaran/kuliah spesialisasi diarahkan pada penguasaan keahlian/kejuruan tertentu, maka kelompok mata pelajaran ini ditujukan pada pembentukan pribadi yang sehat, baik, matang, dan warga masyarakat yang mampu membina kerja sama yang baik pula.

The core curriculum diberikan guru-guru yang memiliki penguasaan dan berwawasan luas, bukan spesialis. Di

samping memberikan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan sosial, guru-guru tersebut juga memberikan bimbingan terhadap perkembangan sosial pribadi peserta didik.

Ada beberapa variasi desain *Core Curriculum* yaitu :

- a. *The separate subject core*. Salah satu usaha untuk mengatasi keterpisahan antar mata pelajaran, beberapa mata pelajaran yang dipandang mendasari atau menjadi inti mata pelajaran lainnya dijadikan *core*.
- b. *The correlated core*. Model desain ini pun berkembang dari *the separate subject design*, dengan jalan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yang erat hubungannya.
- c. *The fused core*. Kurikulum ini juga berpangkal dari *separate subject*, pengintegrasianannya bukan hanya antara dua atau tiga pelajaran tetapi lebih banyak. Sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, ekonomi dipadukan menjadi studi kemasyarakatan. Dalam studi ini dikembangkan tema-tema masalah umum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.
- d. *The activity/experience core*. Model desain ini berkembang dari pendidikan progresif dengan *learner centered design*-nya. Seperti halnya pada *learner centered*, *the activity/experience core* dipusatkan pada minat-minat dan kebutuhan peserta didik.
- e. *The areas of living core*. Desain model ini berpangkal juga pada pendidikan progresif, tetapi organisasinya berstruktur dan dirancang sebelumnya. Berbentuk pendidikan umum yang isinya diambil dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Bentuk desain ini

dipandang sebagai *core design* yang paling murni dan paling cocok untuk program pendidikan umum.

- f. *The social problems core*. Model desain ini merupakan produk dari pendidikan progresif. Dalam beberapa hal model ini sama dengan *the areas of living core*. Perbedaannya terletak pada *the areas of living core* didasarkan atas kegiatan-kegiatan manusia yang universal tetapi tidak berisi hal yang kontroversial, sedangkan *the social problems core* didasarkan atas problema-problema yang mendasar dan bersifat kontroversial. Beberapa contoh masalah sosial yang menjadi tema model *core design* adalah kemiskinan, kelaparan, inflasi, radikalisme, perang senjata nuklir dan masih banyak lagi yang lainnya.

Hal-hal diatas adalah sesuatu yang mendesak untuk dipecahkan dan berisi suatu controversial yang bersifat pro dan kontra. *The areas of living core* cenderung memelihara dan mempertahankan kondisi yang ada, sedangkan *the social problems core* mencoba memberikan penilaian yang sifatnya kritis dari sudut system nilai-nilai sosial dan pribadi yang berbeda.

Sementara menurut Hery Listiyana, Berdasarkan model apa yang menjadi fokus pengajaran sekurang-kurangnya dikenal tiga model desain kurikulum yaitu (Listiyana, 2016):

1. *Subject Centered Curriculum*

Pada *subject centered curriculum* bahan atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, misalnya: mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, kimia, fisika, berhitung dan lain sebagainya (Sanjaya, 2013). Mata pelajaran-pelajaran itu tidak berhubungan satu sama

lain pada pengembangan kurikulum didalam kelas atau pada kebiasaan belajar-mengajar, setiap guru hanya bertanggung jawab pada mata pelajaran yang diberikannya. Kalaupun mata pelajaran itu diberikan oleh guru yang sama, maka hal ini juga dilaksanakan secara terpisah-pisah. Oleh karena organisasi bahan atau isi kurikulum berpusat pada isi/materi pelajaran, maka kurikulum ini juga dinamakan *subject centered curriculum*. *Subject centered curriculum* berkembang dari konsep pendidikan klasik yang menekankan pengetahuan, nilai-nilai, dan berupaya untuk mewariskannya kepada generasi berikutnya.

Karena mengutamakan isi atau bahan-bahan ajar atau subject matter, maka desain kurikulum ini disebut juga subject academic curriculum (Sukmadinata, 2005).

Tylor dan Alexander menyebutkan bahwa kurikulum ini digunakan dengan School Subject. (objek sekolah) & sejak beberapa abad hingga saat ini pun masih banyak adalah anak didik harus menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ditentukan secara logis, sistematis, dan mendalam (Abdullah Idi, 2010). Walaupun bertitik tolak yang sama, dalam satupola desain terdapat beberapa variasi desain kurikulum. Dan subject centered dikenal ada 3 bentuk yaitu: *The Subject Design*, *The Disciplines Design*, dan *The Broad Fields*.

a. *The subject design*

The subject design curriculum merupakan bentuk desain yang paling murni dari subject centered design mata pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. model desain ini telah ada sejak lama. Orang-orang Yunani dan kemudian Romawi mengembangkan Tivium dan Quadrivium.

Tivium meliputi gramatika, logika, dan retorika, sedangkan Quadrivium, Matematika, Geometri, Astronomi, dan Musik. Pada saat itu pendidikan tidak diarahkan pada mencari nafkah, tetapi pada pembentukan pribadi dan status sosial. Pendidikan hanya diperuntukan bagi anak-anak golongan bangsawan yang tidak usah bekerja mencari nafkah (Sukmadinata, 2005).

Pada abad ke-19 pendidikan tidak lagi diarahkan pada pendidikan umum tetapi pada pendidikan yang lebih yang bersifat praktis, berkenaan dengan mata pencaharian (pendidikan vokasional). Pada saat itu mulai berkembang mata-mata pelajaran fisika, kimia, biologi, Bahasa yang masih bersifat teoritis, juga berkembang mata-mata pelajaran praktis seperti pertanian, ekonomi, tata buku, kesejahteraan keluarga, keterampilan, dan lain-lain. Isi diambil dari pengetahuan, dan nilai-nilai yang telah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya. Para siswa dituntut untuk menguasai semua pengetahuan yang diberikan, apakah mereka menyenangi atau tidak, membutuhkannya atau tidak. Karena pelajaran-pelajaran tersebut diberikannya secara terpisah-pisah, maka siswapun menguasainya terpisah-pisah pula. Tidak jarang siswa menguasai bahan hanya pada tahap hafalan, bahan dikuasai secara verbalistis didapatkan diberbagai lembaga pendidikan. Kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran-pelajaran yang tujuan pelajarannya.

b. The disciplines design

Bentuk ini merupakan pengembangan dari subject design, keduanya masih menekankan pada isi atau materi kurikulum. Walaupun bertolak dari hal yang sama tetapi antara keduanya terdapat perbedaan, pada subject design belum ada kriteria yang tegas tentang apa yang disebut subjected (ilmu). Belum ada perbedaan antara matematika, psikologi, dengan teknik atau cara Mengemudi, semua disebut subjected. Pada disciplines design kriteria tersebut telah tegas yang membedakan apakah suatu pengetahuan itu ilmu atau subject dan bukan adalah batang tubuh keilmuannya (Sukmadinata, 2005).

Perbedaan lain adalah dalam tingkat penguasaan disciplines tidak seperti subject design yang menekankan penguasaan fakta-fakta dan informasi tetapi pada pemahaman. Proses belajarnya tidak lagi menggunakan pendekatan ekspositori yang menyebabkan peserta didik lebih banyak pasif, tetapi menggunakan pendekatan Inkuiri dan diskoveri.

c. The broad field design

Kurikulum ini merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut. Dalam model ini mereka menyatukan beberapa mata pelajaran yang berdekatan atau berhubungan menjadi satu bidang studi seperti Sejarah, Geografi dan Ekonomi digabung menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial. Aljabar, Ilmu Ukur, dan berhitung menjadi Matematika dan sebagainya. Tujuan pengembangan kurikulum broad field adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam

dunia informasi yang sifatnya spesialisasi, dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh.

Bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, di Sekolah Menengah Atas penggunaannya agak terbatas apalagi di Perguruan Tinggi sedikit sekali. Kurikulum broad fields kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan The Broad Field Of Subject Matter. Broad fields menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran (subject matter) yang berhubungan erat

2. Learner Centered Design

Desain kurikulum ini sebagai penyempurna dari beberapa kelemahan Subject Center Design yang kemudian berkembang menjadi Learner Centered Curriculum. Ada dua ciri utama yang membedakan desain model Learner Centered dan Subject Centered. Pertama, Learner Centered Design mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik dan bukan dari isi. Learner Centered bersifat Not Preplanned (kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya) tetapi dikembangkan bersama antara guru dengan siswa dalam penyelesaian tugas-tugas pendidikan. Beberapa variasi model desain kurikulum ini antara lain:

- a. The activity atau experience design adalah dalam perencanaan kurikulum, kebutuhan anak-anak merupakan perhatian utama. Kurikulum pengalaman akan terjadi jika hanya mempertimbangkan keberadaan anak didik dengan menggunakan pendekatan social function.

- b. Humanistik design. Desain kurikulum ini adalah desain yang berorientasi pada siswa, yang muncul sebagai reaksi terhadap proses pendidikan yang hanya mengutamakan segi intelektual. Kurikulum humanistik sangat menekankan pada adanya hubungan emosional yang baik antara guru dengan siswa. Guru harus mampu membangun suasana yang hangat dan akrab yang memungkinkan siswa dapat mencurahkan segala perasaannya dengan penuh kepercayaan (Sanjaya, 2013).

3. Problem Centered Design

Problem centered design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia (Man Centered). Berbeda dengan Learner Centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual, Problem Centered Design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok yaitu kesejahteraan masyarakat. Kurikulum mata pelajaran dapat menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dikuasai anak sehingga anak didik bisa naik kelas. Biasanya bahan pelajaran dan Text Book merupakan alat dan sumber utama pelajaran. Dalam desain kurikulum Subject merupakan himpunan pengalaman dan pengetahuan yang diorganisasikan secara logis dan sistematis oleh pakar ahli kurikulum (expert).

Daftar Pustaka

- Ansyar, Mohammad. "Pengembangan Kurikulum dari Materi Pelajaran ke Pengalaman Belajar", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Februari 2021, Jilid 8 No. 1
- Hasyim, Farid, 2013. *Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Filosofi Pengembangan Kurikulum Transformatif Antara KTSP dan Kurikulum*. Malang: Madani.
- Idi, Abdullah. 2010. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Listiyana, Heni. 2016. *Pengembangan Kurikulum*, Surabaya: Intiyaz
- Sabda, Syaifuddin. 2016. *Pengembangan Kurikulum (Tinjauan Teoritis)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sanjaya, Wina. 2013. *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Kencana Media Prenada Group
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Pengembangan Kurikulum teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

BAB VIII

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI PESANTREN, SEKOLAH DAN MADRASAH

Badrut Tamam



A. Pengertian dan Anatomi Pengembangan Kurikulum

Adanya kurikulum menjadi sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan. Oleh karenanya setiap satuan lembaga pendidikan memiliki kepentingan yang cukup signifikan untuk mengetahui objektifikasi konsep kurikulum serta anatomi proses pengembangan kurikulum. Satuan lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana tujuan didirikannya tentu saja diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaiknya dalam pengembangan sumber daya manusia, untuk itu diperlukan berbagai kesiapan sumber tenaga pengajar yang potensial guna mengarahkan proses pembelajaran yang baik, efektif dan efisien.

Pertanyaan dasar yang diharapkan diketahui dan dimafhumi oleh setiap tenaga pengajar di setiap satuan pendidikan yakni apa yang harus diajarkan (*what to teach?*) bagaimana cara mengajar (*how to teach?*), kapan mau diajarkan (*when to teach?*) serta apa dampak dari pembelajaran yang dilakukan (*what is the impact of teaching?*). Dengan mengetahui pertanyaan dasar tersebut tenaga pengajar diharapkan mampu mensinergikan tujuan dari didirikannya lembaga pendidikan dengan tujuan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya pertanyaan dasar tersebut bila dielaborasi dan dikembangkan lebih lanjut dengan kaitannya kurikulum maka

akan berdampak pada tingkat efektifitas pengaplikasian kurikulum seperti hal apa saja yang menarik untuk disuguhkan kepada peserta didik, bagaimana proses objektifikasi dan aktifasi yang memungkinkan guna menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. sehingga peserta didik dapat memperoleh hasil, pengalaman dan nilai (*values*) (Wijayanti, 2013) dari proses pembelajaran.

Tidak hanya itu, dengan landasan pertanyaan tersebut maka tenaga pendidik diharapkan mampu menentukan arah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mengetahui gaya belajar peserta didik dan pandai menentukan model evaluasi yang akan diaplikasikan di akhir pembelajaran.

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam satuan pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau pondasi yang kuat, melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam.

Pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen kurikulum suatu lembaga pendidikan dapat diidentifikasi dengan cara mengkaji buku kurikulum lembaga pendidikan. Dari buku kurikulum tersebut kita dapat mengetahui fungsi suatu komponen kurikulum dan relevansinya terhadap komponen kurikulum yang lain.

Proses pengembangan kurikulum memang merupakan sesuatu yang kompleks. Hal ini dikarenakan pengembangan kurikulum tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan secara teknis namun juga menuntut penguasaan pengembangan berbagai komponen kurikulum dari para pengembang

kurikulum. Selain itu kecakapan lain yang tidak kalah pentingnya yakni bagaimana para pengembang kurikulum mampu mengantisipasi berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Kurikulum sebagaimana dipaparkan Nasution memiliki makna bahwa ia adalah seperangkat rencana yang disusun guna memberikan penguatan pengetahuan dan kematangan berfikir yang menyangkut ranah afektif, psikologis, kognitif dan psikomotorik di bawah koordinasi dan pengawasan lembaga pendidikan (Nasution, 2010). Muara dari adanya kurikulum tersebut yakni mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan beberapa aspek kebutuhan seperti kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan akan perkembangan teknologi dan informasi, dan kesesuaian dengan berbagai kebutuhan psikologis, afektif dan psikomotorik dari satuan pendidikan.

Pendapat berikutnya disampaikan M. Arifin yang mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan seluruh bahan pembelajaran yang harus disuguhkan pada proses pendidikan dalam satuan pendidikan. pernyataan di atas diperkuat dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ralph W. Tyler dalam *Basic Principles of Curriculum and interaction* yang menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang diformulasikan guna memenuhi kebutuhan peserta didik yang diarahkan oleh satuan pendidikan guna mencapai tujuan Pendidikan (Tyler, 1949).

William B. Ragan dengan tegas menyatakan bahwa kurikulum merupakan program kehidupan dalam situasi sekolah yang memuat perangkat pengalaman peserta didik. Menurutnya kurikulum bukan hanya tentang bahan pelajaran dan metode mengajar saat di kelas tapi rangkaian keseluruhan dari formasi

kehidupan sosial peserta didik. Pendapat ini searah dengan pendapat J. Gallen Saylor dan Willian Alexsander yang mengungkapkan bahwa kurikulum ialah seluruh usaha sekolah guna memberi aktivasi peserta didik di ranah sekolah.

Kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bernomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa ia adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk beberapa tujuan tertentu (*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 2003*). Dari beberapa definisi tentang kurikulum diatas maka dapat dilihat bagaimana gambaran tentang perencanaan yang sistematis dan pengembangan tujuan dalam konteks pengembangan isi dan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat diklasifikasikan dalam anatomi kurikulum seperti tujuan, isi, cara atau metode, pengorganisasian dan evaluasi serta media pembelajaran. Pengalaman belajar yang disusun secara sistematis diharapkan dapat mempermudah proses pencapaian tujuan yang selaras dengan proses evaluasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum secara komprehensif tidak ditemukan perbedaan pengertian dari sudut satuan lembaga pendidikan. maka secara umum kurikulum dapat dimaknai sebagai sebuah perangkat rencana yang sistematis mengenai tujuan, ruang lingkup isi, bahan ajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan berorientasi pada pemenuhan proses pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan metode yang sesuai dan tepat guna mencapai tujuan yang diinginkan sebagaimana terdapat dalam visi misi satuan pendidikan.

Pada masa saat ini, kurikulum dituntut terbuka atas perkembangan jaman. William B Ragan mengemukakan

pendapatnya bahwa kurikulum saat ini harus mampu menyentuh setiap aspek kebutuhan manusia beserta jaman yang melingkupinya. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk transformasi kebutuhan manusia yang diharapkan mampu diakomodasi dalam satuan kurikulum. Terdapat beberapa pemahaman dikalangan ahli tentang kurikulum seperti kurikulum sebagai sebuah produk dan pengalaman peserta didik, sebagai sebuah rancangan program, dan kurikulum sebagai hal yang dapat dipelajari oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu(Arbain & Tamam, 2017).

Pembahasan tentang kurikulum pendidikan Islam maka akan identik dengan Islam sebagai sebuah pandangan dan tuntunan hidup. Kaitannya dengan kurikulum maka Abdurrahman An Nahlawi mengungkapkan beberapa ciri kurikulum yang melingkupi kurikulum pendidikan Islam antara lain kurikulum berkembang sesuai fitrah kaum muslimin, kurikulum difokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan Islam, Kurikulum memperhatikan jangka , fase dan periode perkembangan peserta didik, kurikulum memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan ruhul Islam, pengorganisasian kurikulum selaras dan bersinergi dengan perintah Allah SWT, Kurikulum bersifat realistik dan dapat diaplikasikan, nilai Islam dalam kurikulum hendaknya diaplikasikan dalam metode pembelajaran. Memperhatikan efisiensi dan efektifitas kurikulum.

Untuk itu dalam proses penyusunan kurikulum pendidikan Islam maka prinsip-prinsip seperti di bawah ini hendaknya diperhatikan dengan baik oleh pengembang kurikulum seperti kurikulum hendaknya memiliki keterhubungan yang komprehensif dengan tujuan dan nilai agama Islam, prinsip rahmatan lil alamin tercermin dan dalam tujuan kurikulum. Prinsip keseimbangan dan sinergitas antara tujuan Islam dengan

kandungan kurikulum. Memperhatikan bakat, minat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik serta memperhatikan lingkungan sosialnya. Memperhatikan perbedaan individu yang meliputi bakat, minat, kemampuan serta memperhatikan perbedaan kelainan antar individu. Mempertikan prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber, falsafah, prinsip dan dasar kurikulum. Keterkaitan antara mata pelajaran, pengalaman, dengan muatan yang ada dalam kurikulum.

Dengan melihat fenomena tersebut di atas maka dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan serta anatomi yang kuat guna melakukan pengembangan kurikulum satuan pendidikan baik di Pondok Pesantren, Sekolah maupun Madrasah.

B. Pengembangan Kurikulum Pesantren

Berkaca dari beberapa literasi tentang hakikat kurikulum pendidikan di atas maka dapat diperoleh pengertian bahwa pengembangan kurikulum pesantren merupakan perangkat dokumen kurikulum yang dikonstruksi dan dikembangkan oleh pesantren tertentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam dan bersinergi dengan standar nasional pendidikan seperti standar kompetensi lulusan atau tujuan, standar isi dan bahan ajar, standar ruang lingkup materi, standar proses dan standar penilaian sebagaimana juga terakomodir dalam Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan yang menyuguhkan kontribusi manajerial yang tergolong unik (Soebahar, 2013) di antara sistem lembaga pendidikan di tanah air. Peran nyata pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia memiliki penciri khas berkarakter. Termasuk saat

pesantren mengimplementasikan manajemen pengembangan kurikulum.

Keunikan pendidikan pesantren dalam Undang-Undang Pesantren Tahun 2019 tidak hanya berasal dari asal-usulnya saja. Namun, lebih dari itu pendidikan khas Indonesia ini memiliki sistem pembelajaran yang sangat berkarakter(Mastuhu, 1994).

Dari segi praktik pendidikan, di pesantren tidak hanya sekedar belajar ilmu dan teori namun juga dilangsungkan dengan praktik. Praktik pendidikan ala pesantren seperti ini sangat khas dan berbeda. Itulah kelebihan sistem pendidikan pesantren. Teori dan praktik diintegrasikan dengan sangat baik dan berlangsung 24 jam dengan iklim yang kondusif.

Posisi penting disertai keunikan inilah yang saat ini banyak dimanfaatkan kalangan pesantren untuk berbenah guna menjadi lembaga yang ideal dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses berbenah itu secara intens pesantren membangun pola komunikasi melalui jalan pendidikan, dakwah dan pemberdayaan kepada masyarakat baik di kalangan internal maupun eksternal. Hal ini semata-mata demi mendukung tercapainya misi dan visi pesantren.

Dalam undang-undang Pesantren disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan beriman dan berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam negara kesatuan republic Indonesia.

Pesantren yang akrab disebut Dayah (Marhamah, 2018), Surau, Meusanah dan lainnya merupakan lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT memegang teguh ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah dan keteladanan serta pemberdayaan masyarakat. pendidikan sebagaimana dikembangkan pesantren mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.

Didalam sistem pendidikan pesantren ditemukan beberapa lembaga yakni Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang merupakan kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi (Helmiyah, 2022). Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren Yang diselenggarakan Pada jalur pendidikan Formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur (Nursyamsiyah, 2019). Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren Yang diselenggarakan Pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning Secara berjenjang dan terstruktur (Mastur, 2022).

Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di Lingkungan Pesantren Dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur (Permana, 2019).

Seorang pengembang kurikulum pesantren diharapkan mampu memetakan beberapa hal terkait kebutuhan santrinya seperti bagaimana akan dibentuk, apa saja yang menjadi isi kurikulum serta bagaimana proses untuk menyampaikan isi kurikulum kepada seluruh santri.

Bila dilihat dari ruang lingkupnya maka pesantren saat ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning disebut pesantren salaf; Pesantren Yang menyelenggarakan Pendidikan dalam Bentuk Dirasah Islamiah Dengan Pola Pendidikan Muallimin disebut pesantren modern dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum disebut pesantren terintegrasi.

Adapun lima unsur yang setidaknya terdapat dalam batang tubuh pesantren yakni kiai, santri yang bermukim, pondok atau asrama, masjid atau musalla dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin(*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, 2003*).

Isi kurikulum pada zaman kenabian sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rosul Muhammad SAW di masa setidaknya dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal dan hal tersebut dapat menjadi ruang orientasi dalam mengisi kurikulum pendidikan Islam masa kini, antaranya: pasca Nabi Muhammad SAW hijrah ke Kota Madina maka nabi membangun masjid yang menjadi pusat dakwah Islamiyah. Pada masa itu isi dan materi utama yang dilakukan baginda Nabi adalah pendidikan persatuan dan mengikis perbedaan suku dan memberantas pertikaian antara Muhajirin dan Anshar. Pengokohan ekonomi seperti berdagang dan bertani diperkuat. Salat, puasa, haji dan zakat dielaborasi kepada masyarakat dengan contoh dan

tauladan serta etika adab yang baik. selain itu nabi juga menganjurkan dengan seksama tentang pengolahan kekuatan jiwa raga seperti pembelajaran memanah, menunggang kuda, berenang, membaca alQuran, keimanan dalam rukun iman, Ibadah (rukun Islam), akhlak mulia, dasar perekonomian, dasar politikan, kesehatan dan olahraga, membaca dan menulis.

Berkiblat dari pemahaman unsur diatas maka pengembang kurikulum pesantren setidaknya memahami dengan bagitu baik akan hal yang mendasari dalam penetapan sebuah isi serta model kurikulum yang akan digunakan. Interpretasi terhadap konsepsi kurikulum tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dari pengembang kurikulum yang kemudian berimplikasi pada muatan serta isi dan struktur dari kurikulum yang dikembangkan.

Dalam beberapa literasi, konsepsi seperti ini dibedakan ke dalam beberapa hal di antaranya landasan ideologis, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan teknologis.

Salah satu tokoh yang mengupas tentang landasan kurikulum ini antaranya Murray Print yang membagi tiga landasan utama dalam pengembangan kurikulum pesantren yang selanjutnya dapat diadopsi dan diealaborasi dalam sistem pendidikan pesantren. Ketiga landasan yang dimaksud adalah *philosophical sources*, *sociological sources*, *psychological sources* (Murray, 1993).

Pertama, landasan filosofis landasan filosofis; yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Kajian-kajian filosofis kurikulum menjawab permasalahan-permasalahan berkisar: (1) Bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan, (2) isi atau materi

pendidikan yang bagaimana seharusnya diajarkan kepada siswa, (3) metode pendidikan apa yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik.

Kedua, landasan teologis (agama); landasan agama merupakan pijakan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Karena tujuan dari pengembangan kurikulum PAI adalah penanaman nilai-nilai yang terdapat pada Alquran dan Assunah yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan agama Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama yaitu Alquran dan Hadis.

Ketiga, landasan psikologis; adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum yaitu (1) psikologi perkembangan (Karakteristik perilaku/pola-pola perkembangan untuk menyesuaikan apa yang dididik dan bagaimana cara mendidik), dan (2) psikologi belajar (Perkembangan belajar melalui proses peniruan, pengingatan, latihan, pembiasaan, pemahaman, penerapan, pemecahan masalah). Teori-teori dalam psikologi belajar antara lain: Behaviorisme, Psikologi Daya, Perkembangan Kognitif, Teori Lapangan (Gestalt) dan Teori Kepribadian.

Berikutnya landasan sosiologis; adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Tugas para pengembang kurikulum adalah: (1) mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat seperti dirumuskan dalam undang-undang, peraturan, keputusan pemerintah dan sebagainya; (2) menganalisis masyarakat tempat sekolah berada; (3) menganalisis syarat dan tuntutan terhadap tenaga kerja; (4)

menginterpretasi kebutuhan individu dalam rangka kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pesantren, paling tidak terdapat lima hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya pengembangan kurikulum dengan elaborasi landasan psikologis ini antaranya Tujuan pendidikan. Memahami psikologi pendidikan yang akan membantu pengembang kurikulum dalam menemukan dan mengungkap tujuan yang jelas dan sesuai dengan karakteristik santri. Selain itu, melalui pemahaman tersebut, para pengembang kurikulum dapat menentukan tujuan yang pantas sesuai dengan tingkat perkembangan santri. Karakteristik peserta didik atau santri di pesantren. Memahami sifat dan karakteristik alami peserta didik/ santri, perbedaan individual dan personality akan sangat membantu pengembang kurikulum untuk menentukan pilihan yang sesuai dalam mengambil keputusan kurikulum Proses pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana manusia belajar juga merupakan salah satu kajian psikologi yang pada akhirnya sangat berperan bagi pengembang kurikulum. Metode pengajaran. Psikologi membuat kontribusi yang sangat besar dalam menyeleksi pengalaman belajar dan metode pengajarannya di kelas. Dalam proses seleksi metode, pengembang kurikulum memperhitungkan teori-teori belajar. Prosedur penilaian. Psikologi juga membantu pengembang kurikulum dalam memahami secara langsung bagaimana mengevaluasi santri dan ustadz.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengembangan kurikulum pesantren merupakan dokumen

kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh pesantren dengan mengacu pada nilai-nilai atau values Islam dengan memperhatikan standar pendidikan nasional yang meliputi pengembangan tujuan, isi dan bahan ajar, proses dan penilaian sebagai pedoman penyelenggara pesantren dengan mencapai tujuan pendidikan.

C. Manajemen Prosedur Pengembangan Kurikulum Pesantren, Sekolah dan Madrasah

Landasan kegiatan studi manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan berkesinambungan kurikulum (Stoner & Wankel, 1990).

Manajerial perencanaan dan pengembangan kurikulum berpijak pada interpretasi bahwa problematika dan kebutuhan sumber daya manusia di satuan lembaga pendidikan telah tersedia sehingga bisa dijadikan titik pijak dalam pengembangan kurikulum. Kemudian manajerial pelaksanaan kurikulum berasaskan pada landasan bahwa kurikulum yang telah direncanakan secara baik tersebut dapat dilaksanakan secara terstruktur dan aplikatif. Manajerial evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan kurikulum dan perkembangan jaman.

Perbaikan secara berkesinambungan sebagaimana diadopsi dari teori Deming tersebut dilakukan sesuai siklus yang melingkupinya. Sehingga berbagai persoalan yang dihadapi dapat ditemukan jalan perbaikannya secara bertahap dan berkesinambungan.

Ruang lingkup kajian manajemen kurikulum perspektif Oemar Hamalik(Hamalik, 2006) antaranya:

1. Manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum.

Perencanaan yang baik akan menentukan proses aplikasi serta hasil yang diharapkan. Dalam proses perencanaan sebagaimana manajemen kurikulum ini berafiliasi dengan model manajemen yang dipilih, model pengembangan yang dipilih hingga konsep yang dikehendaki.

2. Manajemen pelaksanaan kurikulum.

Dalam konteks manajerial pelaksanaan dan pengimplementasian kurikulum dalam satuan pendidikan, manajemen pelaksanaan ini akrab disebut dengan proses pengalaman belajar. Oleh karenanya ujung tombak dari prosedur pelaksanaan dan manajerial implementasi kurikulum ini adalah para pendidik dan para pengembang kurikulum.

3. Supervisor pelaksanaan kurikulum.

Manajerial supervise dalam kajian ini erat kaitannya dengan upaya pengembangan personal pendidik yang memiliki dedikasi dan integritas memadai dalam proses pelaksanaan sehingga perbaikan berkelanjutan melalui tahap supervise dapat dilakukan dengan tanggungjawab penuh oleh pengembang kurikulum dan para pendidik.

4. Evaluasi dan pengawasan kurikulum.

Tahapan evaluasi dan pengawasan dalam proses pengembangan kurikulum menawarkan beberapa hal prinsipil terkait model yang digunakan dan bagaimana

pengawasan dari model yang telah diimplementasikan dalam beberapa waktu tertentu. Tahapan evaluasi berafiliasi dengan bagaimana perencanaan yang baik dilakukan. Setelah diketahui dalam proses evaluasi dan pengawasan maka selanjutnya dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan guna menghasilkan kurikulum yang efektif dan efisien.

Terdapat dua macam model pengelolaan kurikulum yang dipaparkan Nana Syaodih tentang pengembangan kurikulum antaranya (Syaodih, 2006):

1. *Centralized Curriculum Management.*

Manajemen kurikulum seperti ini biasanya telah matang disusun dan dikonstruksi oleh pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kurikulum terpusat sebagaimana jenis ini merupakan kurikulum nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah atau sekolah. Kurikulum terpusat seperti ini masih berafiliasi dengan kurikulum yang memiliki keseragaman baik dalam tujuan, isi, pembelajaran maupun evaluasi. Tidak hanya itu kelender pengajarannya pun diseragamkan, dan ujian bersifat nasional sebagaimana dilakukan di tiap tahunnya.

2. *Decentralized Curriculum Management.*

Desentralisasi pengelolaan kurikulum seperti ini adalah kurikulum yang dikonstruksi dan disusun serta dikelola oleh daerah, kurikulum daerah, lokal, sekolah/madrasah yang berlaku di daerah atau sekolah tertentu, tujuan, isi, pembelajaran, evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan setempat dan

kelender pengajaran berbeda, ujian bersifat daerah atau lokal.

Model yang kedua di atas dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah pengembangan kurikulum berbasis madrasah. Pengembangan kurikulum berbasis madrasah dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan *bottom up or school based curriculum* yang memberi peluang secara utuh kepada madrasah untuk melakukan pengembangan kurikulum.

Pendekatan tersebut merupakan lawan dari pendekatan *centre based or top down* yang sedikit sekali melibatkan madrasah dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum.

Pendapat lain mengemukakan pengertian Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah sebagai suatu proses yang dilakukan oleh beberapa atau keseluruhan anggota masyarakat madrasah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian terhadap satu atau beberapa aspek kurikulum. Hal tersebut dilakukan dengan selektif, adaptif dan kreatif.

Pengembangan kurikulum di sekolah dan madrasah diharapkan agar setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulumnya dengan mengikuti prosedur pengembangan kurikulum. Prosedur yang dimaksud termuat dalam petunjuk teknis akreditasi sekolah/madrasah dengan tujuh langkah pengembangan kurikulum.

Ketujuh langkah yang dimaksud adalah pelibatan tim pengembang kurikulum seperti para guru mata pelajaran, para guru bimbingan konseling, kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah.

Tentu saja mengacu pada dan disesuaikan dengan SK kepala sekolah/madrasah dan melakukan analisis konteks (ada dokumen hasil analisis konteks) dilakukan melalui workshop; kegiatan review dan revisi; menghadirkan narasumber (ahli pendidikan, praktisi pendidikan, dewan pendidikan, kemendikbud/kemenag, dan pemda); tahap finalisasi; pemantapan dan penilaian dokumen Kurikulum oleh tim pengembang.

Maka dipahami bahwa Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah atau *School Based Curriculum Development* melibatkan beberapa hal yaitu:

1. Dalam proses pengembangan kurikulum, para guru dilibatkan dalam bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum madrasah.
2. Melibatkan seluruh komponen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staff, masyarakat, siswa dan lain.
3. Pengembangan kurikulum bersifat selektif, adaptif dan kreatif. Ketiga sifat inilah yang membedakan konsep pengembangan kurikulum sebelumnya misalnya dengan konsep sebelumnya. Meskipun Beberapa penulis menganggap bahwa kegiatan seleksi, adaptasi dan kreasi yang dilakukan oleh seorang guru tidak termasuk dalam kategori Pengembangan Kurikulum Berbasis Madrasah seperti yang terlihat pada gambar di atas.
4. Adanya pergeseran tanggung jawab pengambilan keputusan kurikulum dengan tidak memutuskan garis hubungan sekolah dengan pusat.

5. Bersifat terus menerus dan dinamis yang secara ideal melibatkan guru, tenaga kependidikan lainnya, masyarakat, orang tua dan peserta didik.
6. Melibatkan kebutuhan dukungan struktur yang bervariasi.
7. Adanya sebuah perubahan peran guru yang bersifat tradisional yang hanya bertugas sebagai pengajar menjadi peneliti dan pengembang kurikulum.

Goodlad dan Richter menyebutkan tiga level di mana terjadi pengambilan keputusan kurikulum. 1) Level Sosial. Personal yang terlibat dikenal dengan *man's funded knowledge* atau *man's conventional wisdom*. 2) Level Institusional dengan personal yang terlibat di antaranya Dewan Pendidikan (*board of education*) atau grup lainnya pada level ini. dan 3) Level Pembelajaran. Personal yang terlibat adalah guru. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dimensi perencanaan kurikulum seharusnya memiliki tiga level. Hilda Taba mengakui dan menjelaskan beberapa prosedur pengembangan kurikulum yang dapat diterima secara umum yaitu proses penentuan tujuan, seleksi isi dan pengembangan prosedur evaluasi. Langkah yang disarankan untuk pengembangan unit belajar mengajar adalah: 1) diagnosa kebutuhan, 2) formulasi khusus, 3) seleksi isi, organisasi isi, 4) seleksi dan organisasi pengalaman belajar dan 5) evaluasi dan pengecekan *sequen* dan keseimbangan.

Daftar Pustaka

- Arbain, M., & Tamam, B. (2017). REORIENTASI KURIKULUM PAI DI MADRASAH: STUDI ANALISIS LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Reflektika*, 12(1), 38–55.
- Hamalik, O. (2006). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Rosda Karya.
- Helmiyah. (2022). *Konsep Pola Pendidikan Muallimin yang Tertuang pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2019 | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
<https://jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/689>
- Marhamah, M. (2018). Pendidikan Dayah dan Perkembangannya Di Aceh. *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 71–92.
- Mastuhu, M. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Perpustakaan Nasional.
- Mastur, A. (2022). Integrasi Kurikulum di Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Wustho Al Fithrah Surabaya. *TARBAWI*, 10(2), 2. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v10i2.215>
- Murray, P. (1993). *Curriculum Development and Design*. Allen and Unwim.
- Nasution, S. (2010). *Kurikulum dan Pengajaran*. Bumi Aksara.
- Nursyamsiyah, S. (2019). Penguatan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Mu'adalah di Era Globalisasi (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Baitul Arqom Balung Kabupaten Jember). *TARLIM: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i1.2067>
- Permana, F. (2019). *Pendidikan Ma'had 'Aly Sebagai Pendidikan Tinggi Bagi Mahasantri | Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3310>

- Soebahar, A. H. (2013). *Moderasi Pesantren: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan Sistem Pendidikan Pesantren*. LKiS.
- Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (1990). *Manajemen. Dalam Alih Bahasa: H. Buchari Zainun* (Edisi Ketiga). Penerbit s.n.
- Syaodih, N. (2006). *Pengembangan kurikulum: Teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Tyler, R. W. (1949). *Basic Principles of Curriculum and Interaction*. The University of Chicago Press.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003*. (2003).
- Wijayanti *, A. T. (2013). Implementasi Pendekatan Values Clarification Technique (Vct) dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21831/socia.v10i1.5343>

BAB IX

PRAKTIK PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

Muhammad Arbain



A. Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan

Kurikulum merupakan ikhtisar dari pendidikan itu sendiri, di mana dalam pendidikan akan terjadi interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Interaksi pendidikan dapat berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orangtua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik. Interaksi ini berjalan tanpa rencana tertulis. Orang tua sering tidak memiliki rencana yang jelas dan rinci ke mana anaknya akan diarahkan, dengan cara apa mereka akan didik, dan apa isi pendidikannya. Semua itu berjalan secara alamiah tanpa perhitungan dan persiapan dengan tujuan dan target tertentu.

Sebaliknya, pendidikan di lingkungan sekolah lebih terencana dan sistematis. Guru sebagai pendidik telah dipersiapkan secara formal melalui lembaga pendidikan guru. Mereka dibekali dengan berbagai kompetensi seperti kompetensi: kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogis yang memang sangat diperlukan oleh seorang guru. Di sekolah guru melaksanakan fungsi sebagai pendidik secara sadar dan terencana berdasarkan kurikulum yang telah disusun sebelumnya. Dalam lingkungan masyarakat pun terjadi proses pendidikan dengan berbagai bentuk. Ada yang dilakukan secara

formal seperti kursus atau pelatihan; dan ada pula yang tidak formal seperti ceramah-ceramah, sarasehan, atau pergaulan hidup sehari-hari. Gurunya juga bervariasi mulai dari yang berpendidikan formal guru sampai dengan mereka yang menjadi guru hanya karena pengalaman (Sukmadinata, 1997).

Dari perbandingan di atas, bahwa pendidikan formal mempunyai beberapa karakteristik. *Pertama*, memiliki kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. *Kedua*, pelaksana kegiatan pendidikan telah dipersiapkan secara formal sebagai pendidik yang telah dibekali dengan berbagai macam kompetensi. *Ketiga*, kegiatan pendidikan dilaksanakan secara formal, terencana, dan diakhiri dengan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilannya. *Keempat*, interaksi berlangsung dalam situasi dan lingkungan tertentu dengan dukungan berbagai fasilitas yang diperlukan.

Dengan demikian, dibandingkan dengan pendidikan informal dan nonformal, pendidikan formal memiliki sejumlah kelebihan. Dari segi isi, pendidikan formal memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan masalah pembinaan moral saja, tetapi juga ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dari segi fungsi, pendidikan formal memiliki peran untuk membantu keterbatasan pendidikan anak dalam mempersiapkan masa depan mereka. Dari sisi penyelenggaraan, pendidikan formal memiliki dasar, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil yang lebih terencana, sistematis, dan jelas.

Melihat perbandingan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan kurikulum dalam pendidikan merupakan konstruksi untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan, yang merupakan sebuah jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan dan untuk mengembangkan kehidupan masa depan

serta sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu sebagaimana termaktub dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 (Widyastono, 2015).

Setiap praktik pendidikan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, apakah berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, pengembangan pribadi, kemampuan sosial, ataupun kemampuan bekerja. Untuk menyampaikan bahan pelajaran, ataupun mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut diperlukan metode penyampaian serta alat-alat bantu tertentu. Untuk menilai hasil proses pendidikan, juga diperlukan cara-cara dan alat-alat penilaian tertentu pula. Keempat hal tersebut adalah komponen utama kurikulum.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Pendidikan memiliki peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan manusia, perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia. Kalau bidang-bidang lain seperti ekonomi , pertanian, arsitektur dan sebagainya berperan menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan manusia, pendidikan berkaitan langsung dengan pembentukan manusia. Pendidikan “menentukan” model manusia yang akan dihasilkan.

Kurikulum sebagai sebuah rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum maka tidak dapat dilakukan secara serampangan atau sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang

kokoh yang didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.

Terkait konstruksi kurikulum tersebut dapat diilustrasikan melalui sebuah bangunan gedung. Jika landasan pembuatan sebuah gedung tidak kokoh yang akan ambruk atau roboh adalah gedung tersebut, tetapi kalau landasan pendidikan khususnya kurikulum yang lemah maka yang akan ambruk tidak hanya pendidikan tersebut tetapi juga manusianya (Sukmadinata, 1977). Maksudnya kurikulum yang lemah akan melahirkan kualitas manusia yang rendah pula. Akan tetapi jika landasan kurikulum itu kokoh maka akan berkualitas pula manusianya dan sistem pendidikannya dapat dikatakan sukses menciptakan kurikulum kehidupan bagi manusia. Kalau kita renungi bahwa kurikulum kehidupan tersebut bahkan dalam ajaran agama telah berabad-abad lalu dikemukakan untuk dapat menjadikan setiap manusia sebagai insan pembelajar yang senantiasa menuntut ilmu sepanjang hayat (*long life education*).

1. Landasan Teologis

Landasan teologis (agama) merupakan nilai-nilai yang terdapat pada Alquran dan Assunah yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Prinsip dalam pendidikan agama Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitannya dengan sumber pokok agama yaitu Alquran dan Hadis (Amirulloh Syarbini dan Muhammad Arbain, 2014). Prinsip yang ditetapkan Allah dan diperintahkan Rasulullah sebagaimana diterangkan dalam Alquran dan Hadis Nabi berikut ini dapat dijadikan pegangan dasar kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah ayat dalam Alquran Surah Al Mujadalah ayat 11 yang

terjemahannya: *“Allah (Tuhan) akan mengangkat derajat seseorang karena keimanannya dan karena ilmunya.* Maksudnya setiap manusia di dunia tentu meyakini akan hakikat ketuhanan, dan dengan ilmu ia akan mampu menguasai berbagai urusan baik duniawi maupun ukhrawi.

Hal ini pula dikuatkan dalam sebuah hadist nabi yang berbunyi: “Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, hendaklah ia menguasai ilmunya, barang siapa yang menghendaki keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu keduanya (H.R Turmudzi).

Melihat konsepsi ini, landasan teologis merupakan konstruksi penting dalam membangun kurikulum dalam pendidikan. Dan dalam setiap agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebijaksanaan hidup dan penuh akan ajaran nilai-nilai kebaikan. Yang di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

2. Landasan Filosofis

Seorang pengembang kurikulum dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum harus memperhatikan

falsafah, baik falsafah bangsa, falsafah lembaga pendidikan dan falsafah pendidik. Ada tiga cabang besar filsafat, yaitu metafisik yang membahas segala yang ada dalam alam ini, epistemologi yang membahas kebenaran dan aksiologi yang membahas nilai. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum.

Kedudukan Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah, sasaran dan target dari proses pendidikan. Landasan ini digunakan untuk melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah. Filsafat adalah cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam (Socrates) atau suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sampai ke akar-akarnya. Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Berfikir secara mendalam tentang permasalahan yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan merupakan target dari kajian filsafat.

Proses pendidikan yang berlangsung pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran hasil filsafat yang diketemukan oleh para ahli. Menurut Redja Mudyahardjo (1989), terdapat tiga sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan, yaitu Idealisme, Realisme, dan Pragmatisme. Filsafat idealisme berpandangan bahwa realitas yang ada ini terdiri dari ide-ide yang sudah dilahirkan, filsafat realisme malah kebalikan dari filsafat idealisme yaitu lebih mengandalkan pada realitas indrawi yang didasarkan pada pengalamannya, sedang filsafat Pragmatisme aliran filsafat yang berorientasi pada hasil yang bersifat praktis dan mengandung manfaat bagi kehidupan.

Kajian filsafat pada awalnya mempersoalkan hakikat manusia, siapa manusia itu ? apa tugas dan kewajiban manusia ? darimana manusia berasal ? mau kemana setelah hidup ini ?. Berangkat dari hakikat manusia ini maka muncul berbagai kajian yang dilahirkan dari pemikiran filsafat, seperti manusia itu adalah makhluk beragama, makhluk sosial, makhluk dan berbudaya. Sebagai pengantar untuk mengkaji hakikat manusia tersebut maka muncullah tentang hakekat benar-salah yang diwadahi oleh ilmu (logika), hakekat baik-buruk yang diwadahi oleh (etika), dan hakekat indah jelek yang diwadahi dalam ilmu (estetika). Ketiga ilmu ini mencerminkan pandangan hidup yang berhubungan dengan manusia, sehingga ketiga aspek tersebut sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan strategi, arah dan tujuan pendidikan. Berawal dari logika yang mempertanyakan keabsahan atau kebenaran sesuatu, diikuti dengan prinsip apakah sesuatu itu berguna bagi kehidupan dan mengandung keindahan (Masykur, 2019).

3. Landasan Ideologis

Ideologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gagasan. Gagasan tersebut berupa gagasan yang masih murni sehingga dapat menjadi landasan atau pedoman bagi kehidupan masyarakat. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk masyarakat untuk menuju cita-citanya. Ideologi juga merupakan suatu sistem kepercayaan. Dalam ideologi harus memiliki harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menjadikan masa depan seperti yang dicitacitakan oleh masyarakat.

Landasan ideologi dan filsafat memiliki keterkaitan, sebelum lahirnya sebuah ideologi maka ada filsafat terlebih dahulu. Filsafat berubah menjadi ideologi setelah filsafat tersebut digunakan untuk cita-cita dan dikerjakan atau dipatuhi oleh manusia tersebut. Filsafat sebagai pandangan hidup pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini sehingga menjadi dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar dan pedoman bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh hidup dan kehidupan. Filsafat dalam pengertian ini menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakinan-keyakinan (*belief system*) yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bidang kehidupan. Hal itu berarti filsafat telah beralih dan menjelma menjadi ideologi (Kaelan, 2002).

4. Landasan Psikologis

Terjadinya interaksi antar-individu manusia dalam proses pendidikan, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antar peserta didik dengan orang lain. Hal ini menyebabkan pentingnya seseorang memahami karakteristik perkembangan psikologis orang lain, karena setiap individu berbeda dengan individu lainnya. Manusia juga berbeda dengan benda atau tanaman, karena benda atau tanaman tidak mempunyai aspek psikologis. Manusia juga lain dari binatang, karena kondisi psikologisnya jauh lebih tinggi tarafnya dan lebih kompleks dibandingkan dengan binatang. Berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks inilah sesungguhnya manusia lebih maju, lebih banyak memiliki kecakapan,

pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan dengan binatang.

Kondisi psikologis setiap individu berbeda, karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial-budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari lahir. Kondisi ini pun berbeda pula pada konteks, peranan, dan status individu di antara individu-individu yang lainnya. Interaksi yang tercipta dalam situasi pendidikan harus sesuai dengan kondisi psikologis para peserta didik maupun kondisi pendidiknya. Jadi, sesuai dengan yang dikemukakan Sukmadinata bahwa minimal terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu: (1) psikologi perkembangan, dan (2) psikologi belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menetapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006).

5. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan pewarisan budaya dari generasi ke generasi selanjutnya dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia, baik sebagai individu, kelompok masyarakat, maupun dalam konteks yang lebih luas yaitu budaya bangsa. Oleh karena itu anak didik dihadapkan pada

budaya, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya.

Pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa, dan rasa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi, yaitu manusia yang berbudaya. Semakin meningkatnya perkembangan sosial budaya manusia, akan menjadikan tuntutan hidup manusia semakin tinggi pula, untuk itu diperlukan kesiapan lembaga pendidikan dalam menjawab segala tantangan yang diakibatkan perkembangan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, sebagai antisipasinya lembaga pendidikan harus menyiapkan anak didik untuk hidup secara wajar sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakatnya, untuk itu diperlukan inovasi-inovasi pendidikan terutama menyangkut kurikulum (Syafuruddin Nurdin, 2005).

6. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan (*technology is application of science*). Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Produk teknologi tidak selalu berbentuk fisik, seperti komputer, televisi, radio, dan lain sebagainya, tetapi ada juga non fisik, seperti prosedur pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar dan sebagainya. Produk teknologi tersebut banyak digunakan

dalam pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan (Zainal Arifin, 2014).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung menuntut perkembangan pendidikan. Pengaruh langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memberikan isi, materi, atau bahan yang akan disampaikan dalam pendidikan. Pengaruh tak langsung adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan perkembangan masyarakat, dan perkembangan masyarakat menimbulkan problema-problema baru yang menuntut pemecahan masalah dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan baru yang dikembangkan dalam pendidikan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006). Pembangunan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mempercepat terwujudnya ketangguhan dan keunggulan bangsa. Di sisi lain, perkembangan IPTEK itu sendiri berlangsung semakin cepat, bersamaan dengan persaingan antar bangsa semakin meluas, sehingga diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan IPTEK (Oemar Hamalik, 2010).

Dalam hal ini, implikasi IPTEK dalam pengembangan kurikulum, antara lain: 1) Pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. 2) Pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu

sendiri (Zainal Arifin, 2014) Perkembangan IPTEK berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Dalam setiap perkembangan atau kemajuan, pasti selalu ada dampak yang timbul, baik itu dampak positif maupun negatif. Begitu juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap pengembangan kurikulum.

7. Landasan Organisatoris

Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau diproseskan kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah suatu faktor yang penting sekali dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum menentukan isi bahan pelajaran dan cara menyajikannya.

Landasan ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori psikologi Gestalt yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran (Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakkir. 2006)

Apabila mengikuti model *separated subject curriculum*, maka mata pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah

seperti Nahwu, Sharaf, thabah, dan seterusnya. Apabila mengikuti model *correlated curriculum*, maka bisa dalam bentuk penggabungan mata pelajaran yang tersebut di atas menjadi Bahasa Arab, atau penggabungan antara Alquran dan Hadis, Aqidah Akhlak, Sejarah Islam, Fiqh menjadi Pendidikan Agama Islam (PAI) atau memilih tema tertentu yang dibahas dalam perspektif ilmu tertentu (Agus Zainul Fitri, 2013).

Apabila mengikuti model *integrated curriculum*, maka dalam praktiknya menghilangkan batasan-batasan mata pelajaran dengan menentukan topik bahasan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Semua model organisasi kurikulum tersebut tentu memiliki kelebihan di samping kelemahan masing-masing. Tetapi suatu sekolah dapat mnegadobsi dan menggabungkan semua model tersebut, untuk mengeliminir kelemahan atau kekurangan yang ada pada satu model, sehingga menjadi suatu bentuk kurikulum komprehensif, yang diharapkan semua pihak.

Pemahaman terhadap landasan-landasan tersebut bagi para pengembang kurikulum sangat penting dan amat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan suatu bentuk kurikulum ideal yang diharapkan oleh semua pihak. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu Pancasila, relevan dengan kebutuhan, minat, psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan keanekaragaman budaya (multikultural) serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memilih organisasi kurikulum yang sesuai dengan latar belakang anak, materi pelajaran, dan jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Dalam hal ini, para pengembang kurikulum harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu kekinian, berorientasi masa depan, dan kepentingan

satuan pendidikan (S. Adiwikarta, 2011). Kurikulum yang dikembangkan harus aktual dan tidak ketinggalan zaman serta relevan dengan kondisi masyarakat sekitar. Mampu mengantisipasi tantangan masa depan yang kompetitif-global serta menjamin kepentingan dan mendukung keberlangsungan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholders*) (Arbain dan Tamam, 2020).

C. Praktik Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Dalam praktiknya, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum ini tidak hanya karena derasnya arus intervensi politik penguasa melainkan juga karena tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan kurikulum tersebut dapat dinamis dengan kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan praktik perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa.

1. Kurikulum 1947 (Rencana Pembelajaran 1947)

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda "*leer plan*" artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih populer dibanding istilah "*curriculum*"³ (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan "Rencana Pelajaran 1947", yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: (1)

daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; (2) garis-garis besar pengajaran.

Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai *development conformism* lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah: pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani (Alhamuddin, 2014).

2. Kurikulum 1952 (Rencana Pembelajaran Terurai 1952)

Setelah "Rencana Pelajaran 1947", pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama "Rencana Pembelajaran Terurai 1952". Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu

mata pelajaran, (Djauzak Ahmad, Dirpendas periode1991-1995).

3. Kurikulum 1964 (Rencana Pendidikan 1964)

Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana (Omar Hamalik, 2004), yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/ artistik, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebut Panca wardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

4. Kurikulum 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan

struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Djauzak (1991) menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. "Hanya memuat mata pelajaran pokok saja,". Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat (Alhamudin, 2014).

5. Kurikulum 1975

Menurut Omar Hamalik (2004), Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efektif dan efisien. latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu," Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yang dikenal dengan istilah "satuan pelajaran", yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi : tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975

banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

6. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang Disempurnakan)

Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut "Kurikulum 1975 yang disempurnakan". Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan.

7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil. Sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan

kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja.

8. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Tahun 2004

Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004, yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) (Wina Wijaya, 2005). Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu: pemilihan kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi; dan pengembangan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut : Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa

ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?” (Alhamuddin, 2014).

9. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006

Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004.

Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat (Alhamuddin, 2014).

10. Kurikulum 2013

Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 2004 (*curriculum based competency*). Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan; pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan.

Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkatan kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing (Mulyasa, 2013).

Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur

pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan (Alhamuddin, 2014).

11. Kurikulum Merdeka Tahun 2021

Setelah dampak pandemi *Corona Virus Diseases* (Covid-19) melanda dunia dan bangsa Indonesia tidak hanya mendisrupsi ketahanan negara dan perekonomian bangsa melainkan telah merambah pada sendi kehidupan dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang dalam praktik kurikulumnya melakukan berbagai pembelajaran secara tertulis dan tatap muka (face to face) semenjak pandemi Covid-19 sistem pembelajaran berubah drastis dari sistem pendidikan tradisional menuju pendidikan modern yang menggunakan berbagai aplikasi digital dan kekuatan daya dukung internet sebagai respons perubahan akibat dampak darurat bencana non alam. Dengan demikian sistem pendidikan di Indonesia.

Awalnya sebelum terjadi pandemi, sistem pendidikan Indonesia memang telah mengarahkan sistem pendididkannya ke penggunaan media teknologi pendidikan dengan sistem pembelajaran *blended learning* untuk menyambut revolusi industri 4.0, digitalisasi dan bonus demografi. Akan tetapi dengan adanya disrupsi pandemi maka penggunaan *blended learning* kian marak digunakan karena desakan darurat PSBB sehingga seluruh lembaga pendidikan ditutup dan sistem pendidikan beralih menggunakan *virtual learning* (online) menggunakan berbagai aplikasi seperti Edmodo, Google Classroom, Zoom dan lain sebagainya.

Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta dan data bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapat

capaian belajar yang lebih baik daripada yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio ekonominya. Survey yang dilakukan pada 18.370 siswa kelas 1-3 SD di 612 sekolah di 20 kab/kota dari 8 provinsi selama kurun waktu bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan hasil belajar yang signifikan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat. Selisih skor literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 482 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi siswa pengguna Kurikulum 2013 memperoleh skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum darurat dengan skor 570 (Kemendikbud, 2021).

Pada tahun 2022, Kemendikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran. Kemendikbudristek memberikan tiga opsi kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan konteks masing-masing satuan pendidikan. Tiga opsi tersebut adalah menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, menggunakan kurikulum darurat, dan menggunakan kurikulum merdeka.

Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga

pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dimana dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

Inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah (Kemdikbud, 2021). Penerapan kurikulum Merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan Angket Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.

Daftar Pustaka

- Alhamuddin Sejarah Kurikulum di Indonesia, *Jurnal Nur El Islam*,
Volum 1, Nomor 2, Oktober 2014.
- Arbain, Muhammad dan Badrut Tamam. Inklusifitas
Pengembangan Kurikulum Agama Islam Berbasis Pesantren,
Jurnal Misykat Al Anwar, Volume 3 Nomor 2, 2020.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*,
Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Kemdikbud. *Buku Saku Tanya Jawab Merdeka Belajar*, Jakarta:
Kemdikbud, 2021.
- Masykur. *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, Bandar
Lampung: AURA, 2019.
- Mudyahardjo, *Peranan SKB di Dunia Pendidikan*, Jakarta: Media
Karya, 1998.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Yusuf . *Ilmu Pendidikan Islam*,
Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulyasa, E. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nurdin, Syafruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*,
Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodah. *Pengembangan Kurikum; Teori dan
Praktek*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Sukmadinata, Nana Syaodah. *Pengembangan Kurikum; Teori dan
Praktek*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2006.

Syarbini, Amirulloh dan Muhammad Arbain. *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widyastono, Hery. *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dar Kurikulum 2004, 2006 ke Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Zainal Arifin. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014.

BAB X

SUMBER DAYA PENDUKUNG KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Ahmad Abrar Rangkti



A. Hakikat Kurikulum

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan berlangsung secara bersamaan. Berbicara tentang proses pendidikan sudah tentu tidak dapat dipisahkan dengan semua upaya yang harus dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, sedangkan manusia yang berkualitas itu, dilihat dari segi pendidikan, telah terkandung secara jelas dalam tujuan pendidikan nasional. (Hamalik, 2008: 1).

Teori pendidikan menjelaskan interaksi-interaksi edukatif yang terlibat dalam menangani isi atau konten untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditentukan (Uljen dan Ylimaki, 2017: 4).

Keberhasilan pemenuhan praktik pendidikan, apakah dalam bentuk pengajaran, kepemimpinan pendidikan, maupun kebijakan dalam berbagai tingkat dipandu oleh kerangka konsep dan teori yang berlaku, yang mendominasi kebijakan, budaya, dan tradisi sejarah. Teori pendidikan modern merupakan sebuah respons terhadap bagaimana mengorganisasikan pendidikan

dalam sebuah masyarakat plural dalam kerangka kehidupan religius dan kelas sosial yang diberikan.

Rumusan definisi kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Nasional Pendidikan bab I, pasal 1, ayat (19). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa peran kurikulum dalam konteks pendidikan sangat menentukan kelangsungan dan mutu lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan tujuan akhir kurikulum adalah ketercapaian tujuan pendidikan.

Di sisi lain, satuan pendidikan sebagai penyelenggara program pendidikan dipersyaratkan memiliki mutu. Mutu lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan dalam sembilan dimensi, yaitu: 1) kurikulum/proses belajar mengajar; 2) manajemen sekolah; 3) organisasi/kelembagaan sekolah; 4) sarana dan prasarana; 5) ketenagaan; 6) pembiayaan; 7) peserta didik; 8) peran serta masyarakat; dan 9) lingkungan/kultur sekolah. Setiap dimensi dari kesembilan dimensi mutu sekolah berbeda-beda sifatnya, bila dikaitkan kedudukannya dalam penilaian dalam rangka akreditasi sekolah. Sifat-sifat dari masing-masing dimensi itu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: 1) kegiatan atau layanan inti; 2) sumber daya pendukung; 3) kegiatan atau layanan pendukung; 4) kepemimpinan dan manajemen sekolah, dan 5) hasil pendidikan sekolah.

Dalam konteks penilaian mutu, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia menjelaskan sifat-

sifat dari semua dimensi ini dapat dipandang sebagai komponen penilaian mutu sekolah. Atas dasar ini maka pengelompokan dimensi berdasarkan komponen penilaian mutu tersebut yaitu: 1) sumber daya pendukung meliputi dimensi tenaga (tenaga pendidik dan staf administrasi), pembiayaan, dan sarana dan prasarana; 2) kegiatan atau layanan pendukung meliputi dimensi pembinaan organisasi dan kelembagaan pendidikan dan pembinaan peran serta masyarakat; 3) kepemimpinan dan manajemen lembaga pendidikan meliputi dimensi kepemimpinan lembaga pendidikan dan manajemen lembaga pendidikan; 4) kegiatan atau layanan inti meliputi dimensi implementasi kurikulum dan proses belajar mengajar dan penciptaan lingkungan/kultur sekolah; dan 5) hasil pendidikan sekolah meliputi dimensi kompetensi peserta didik yaitu moralitas, akademik, vokasional, dan sosial pribadi (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007:362).

Lebih lanjut terkait dengan sumber daya pendukung kurikulum, hasil penelitian Gibson menunjukkan bahwa tenaga pendidik membutuhkan sumber daya pendukung kurikulum yang *adaptable* (sesuai kebutuhan tenaga pendidik, kelas, peserta didik, kelompok dan berdiferensiasi), *cost-effective* (berorientasi kepada anggaran yang terbatas), *complementary* (melengkapi tujuan kurikulum nasional dan sangat mendorong kemampuan berpikir dan inkuiri peserta didik), *visually engaging* (menarik secara visual, seperti diagram, gambar, dan warna), *written and developed by peers/practitioners* (disusun oleh teman sejawat atau praktisi yang memahami latar sekolah yang mendukung munculnya kemampuan peserta didik) (Gibson, 2018: 43).

Dari uraian di atas, identifikasi sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum meliputi tiga hal yaitu: 1) tenaga (tenaga pendidik dan staf administrasi), 2) pembiayaan, dan 3) sarana dan prasarana. Sementara secara prinsip,

identifikasi sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum diekstrak menjadi tiga prinsip utama, yaitu: 1) adaptif, 2) efektif, dan 3) komplementer.

Telaah tentang sumber daya pendukung kurikulum tidak terbatas pada tiga hal di atas, karena terdapat berbagai variabel pendidikan yang dapat menjadi sumber daya pendukung implementasi kurikulum. Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal penting untuk menggerakkan lembaga pendidikan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Begitu juga kurikulum selalu bersinggungan dengan pemanfaatan media, sumber belajar, dan strategi pembelajaran. Hal-hal yang disebut terakhir merupakan variabel pendidikan yang juga menjadi sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum.

B. Implementasi Kurikulum

1. Konsep Implementasi kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan sebuah bagian dari proses atau tahapan pemberlakuan sebuah kurikulum, khususnya terhadap kurikulum baru atau yang telah diperbarui (inovasi) serta juga dapat diberlakukan terhadap kurikulum yang dikembangkan. Sebuah kurikulum khususnya kurikulum baru harus melewati beberapa tahapan sampai dimana kurikulum tersebut dapat diimplementasikan sampai dengan dievaluasi tahapan dalam proses adanya kurikulum baru, yaitu: orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi (Kusumawati & Rulviana, 2017: 95).

Keberhasilan implementasi kurikulum memerlukan manajemen yang baik. Ada beberapa aspek manajemen yang

penting untuk memperkuat implementasi kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, dan kegiatan monitoring dan evaluasi (Wathoni, 2018: 239).

Miller & Seller sebagaimana dikutip oleh Kusumawati dan Rulviana mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga pandangan tentang implementasi kurikulum, yaitu:

a. Implementasi kurikulum sebagai sebuah *event* (kejadian)

Implementasi kurikulum sebagai sebuah *event* memandang bahwa implementasi kurikulum adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika para pengembang kurikulum mengembangkan atau memproses sebuah kurikulum baru hingga pengembangan kurikulum baru tersebut lengkap, dan selanjutnya mengharap kepada para tenaga pendidik dapat mengajar sesuai dengan program baru tersebut.

b. Implementasi kurikulum sebagai proses interaksi antara pengembang kurikulum dan tenaga pendidik

Implementasi kurikulum sebagai proses yaitu kurikulum merupakan sebuah proses interaksi antara para pengembang kurikulum dengan para tenaga pendidik. Dalam hal ini pengembang kurikulum bekerja dengan input dari para tenaga pendidik yang mengajarkan program mata pelajaran yang dikembangkan atau menyiapkan gambaran rinci dari metode-metode pembelajaran terbaru. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut para pengembang kurikulum selanjutnya melakukan desain pendekatan

baru, menguji sumber-sumber baru, atau mengintegrasikan konten materi baru ke dalam program yang ada. Selanjutnya, tenaga pendidik diminta untuk mencoba revisi tersebut. Ketika revisi dilakukan pada program baru, maka implementasi dinyatakan telah lengkap.

c. Implementasi kurikulum sebagai sebuah komponen yang terpisah dari rangkaian kurikulum

Implementasi berdasarkan pandangan tersebut menjelaskan bahwa implementasi merupakan kegiatan yang menyertai pengembangan dan adopsi program atau kurikulum baru, dalam bentuk sebuah perencanaan untuk memperkenalkannya. Ketika perencanaan selesai, implementasi dinyatakan telah lengkap (Kusumawati & Rulviana, 2017: 96).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep implementasi kurikulum tidak sama dengan istilah pelaksanaan kurikulum *an sich*; karena implementasi kurikulum merupakan istilah teknis dalam ilmu pendidikan. Hal ini kemudian mensyaratkan adanya langkah-langkah dan peran yang dilakukan terkait dengan implementasi kurikulum. Artinya, implementasi kurikulum tidak dapat disederhanakan dengan tugas tenaga pendidik yang hadir di ruang kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar bersama peserta didik.

2. Model implementasi kurikulum

Untuk mencapai efektivitas dalam implementasi kurikulum diperlukan model-model implementasi kurikulum. Miller & Seller mengemukakan tiga model implementasi kurikulum, yaitu:

a. *Concern-Based Adoption Model (CBAM)*

CBAM merupakan suatu model implementasi kurikulum yang mengidentifikasi berbagai tingkatan perhataan tenaga pendidik terhadap suatu pembaharuan dan bagaimana tenaga pendidik mengadakan pembaharuan di dalam kelas. Model ini bersifat deskriptif, tetapi dapat membantu pengembang kurikulum dan para tenaga pendidik mengembangkan strategi-strategi implementasi. Model CBAM mampu menghadirkan dimensi untuk menggambarkan perubahan: 1) tingkat perhatian terhadap inovasi yang menggambarkan perasaan para tenaga pendidik terhadap perubahan, dan 2) tingkat penggunaan perubahana yang menggambarkan performa tenaga pendidik dalam menggunakan sebuah program atau kurikulum baru.

b. *The Innovation Profile Model*

The Innovation Profile Model merupakan proses mengurangi jurang pemisah (*gap*) antara berbagai hal yang diharapkan atau dibayangkan dan berbagai pencapaian (*outcome*). Jurang pemisah diasumsikan sebagai apa yang terdapat antara tujuan-tujuan umum (*goals*) yang diharapkan oleh masyarakat dan pencapaian-pencapaian yang didapat oleh peserta didik.

Tujuan dari diperkenalkan program-program baru ke dalam sebuah sekolah yaitu berfungsi sebagai alat untuk menyempitkan jurang pemisah tersebut.

c. *Trust Opening Realization Interdepending (TORI) Model*

TORI memfokuskan pada perubahan pribadi dan sosial. Model TORI memberikan skala yang membantu para tenaga pendidik mengidentifikasi seberapa besar lingkungan sekolah dapat menerima dan mengimplementasikan suatu inovasi serta memberikan panduan untuk memudahkan implementasi perubahan. Dalam model TORI, pengembang kurikulum berfokus kepada pengembangan personal dan organisasi, yang menyediakan kondisi-kondisi yang penting untuk sebuah perubahan yang positif. Tenaga pendidik dan pengembang kurikulum menggunakan model ini untuk mengidentifikasi keberadaan mereka pada skala *environmental quality* dan dimana keberadaan mereka sebagai sebuah kelas, sekolah atau sistem (Kusumawati & Rulviana, 2017: 100-101).

Ketiga model tersebut di atas menjelaskan tentang identifikasi tantangan dan peluang implementasi kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Selain itu, model-model implementasi tersebut menunjukkan kurikulum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis karena dapat dikembangkan dan disempurnakan.

3. Keterampilan Tenaga Pendidik dalam Implementasi Kurikulum

Menurut Dunkin sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, ada sejumlah aspek yang dapat memengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor tenaga pendidik, yaitu: *teacher formative experience, teacher training experience, and teacher properties*.

Teacher formative experience meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup tenaga pendidik yang menjadi latar belakang sosial mereka. Hal-hal yang termasuk dalam aspek ini di antaranya tempat asal kelahiran tenaga pendidik termasuk suku, latar belakang budaya dan adat istiadat, keadaan keluarga dari mana tenaga pendidik berasal, misalkan apakah tenaga pendidik itu berasal dari keluarga yang tergolong mampu atau tidak; apakah mereka berasal dari keluarga harmonis atau tidak.

Teacher training experience meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan tenaga pendidik, misalnya pengalaman latihan profesional, tingkatan pendidikan, pengalaman jabatan, dan lain sebagainya. *Teacher properties* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki tenaga pendidik, misalnya sikap tenaga pendidik terhadap profesinya, sikap tenaga pendidik terhadap siswa, kemampuan atau intelegensi tenaga pendidik, motivasi dan kemampuan mereka, baik kemampuan dalam pengelolaan belajar termasuk di dalamnya kemampuan dalam merencanakan dan evaluasi pembelajaran maupun kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran (Sanjaya, 2008: 198).

Dengan demikian, keterampilan tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum melibatkan banyak faktor. Ada faktor yang berhubungan dengan latar belakang, pengalaman, sifat, sikap, wawasan, dan tingkat ilmu pengetahuan tenaga pendidik yang menjadi daya dorong tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum.

C. Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Implementasi Kurikulum

Pada prinsipnya kegiatan manajemen kurikulum dititikberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar mengajar di lembaga pendidikan agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan dua hal, yaitu: pertama kegiatan yang erat kaitannya dengan tugas tenaga pendidik. Kegiatan ini meliputi pembagian tugas mengajar, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan koordinasi penyusunan persiapan mengajar. Kedua, kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar mengajar. Kegiatan ini meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program atau rencana berdasar satuan waktu tertentu, pengisian daftar kemajuan peserta didik, laporan hasil evaluasi, dan kegiatan bimbingan penyuluhan.

Dalam kurikulum terdapat sejumlah hal yang mendukung proses manajemen kurikulum, antara lain adalah faktor peserta didik. Faktor ini dikembangkan dan didesain sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, maka pola yang digunakan berpusat pada bahan ajar berupa isi atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Faktor sosial budaya dalam manajemen kurikulum karena kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan tekanan serta kebutuhan masyarakat yang

berbeda. Faktor politik dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang berpengaruh karena politik yang melandasi arah kebijakan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Faktor ekonomi dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang memiliki pengaruh yang cukup besar karena faktor ekonomi yang dapat mengembangkan sekaligus mendorong pola pengembangan kurikulum mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, mulai dari pelaku kebijakan sampai pada pelaku di lapangan. Faktor perkembangan teknologi dalam manajemen kurikulum karena perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung dalam kurikulum disebabkan pola masyarakat semakin kompleks sehingga dituntut untuk dapat melihat dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (Rusdiana dan Ratnawulan, 2022: 28-29).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam konteks mutu lembaga pendidikan dan kurikulum maka sumber daya pendukung meliputi dimensi tenaga (tenaga pendidik dan staf administrasi), pembiayaan, dan sarana dan prasarana (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan, 2007:362). Namun, uraian yang lebih komprehensif mengenai sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum dijelaskan oleh Rusman yang menyebutkan bahwa sumber daya pendukung yang dimaksud meliputi manajemen sekolah, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, penggunaan strategi dan model pembelajaran, kualitas kinerja tenaga pendidik, dan monitoring pelaksanaan kurikulum (Rusman, 2008:121).

Dalam pembahasan ini, kedua pendapat tersebut dielaborasi sehingga menemukan penjelasan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum adalah sebagai berikut.

1. Manajemen Sekolah

Manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada sekolah. Model ini juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai standar mutu yang berkaitan dengan kebutuhan sarana prasarana, fasilitas sekolah, peningkatan kualitas kurikulum, dan pertumbuhan jabatan tenaga pendidik.

Keputusan sekolah yang diambil harus melibatkan secara langsung semua warga sekolah, yaitu tenaga pendidik, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orangtua peserta didik, dan masyarakat yang berhubungan dengan program sekolah. Keputusan seperti ini disebut keputusan partisipatif. Keputusan ini dapat membangun rasa memiliki bagi setiap warga sekolah dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan dedikasi warga sekolah. Untuk menggerakkan manajemen sekolah lebih otonom dan memberdayakan semua unsur terkait dalam bentuk partisipatif, maka kepemimpinan kepala sekolah harus kuat. Kepemimpinan yang kuat itu adalah menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif yaitu memberdayakan semua komponen dalam komunitas sekolah.

Kepemimpinan kepada sekolah yang kuat tampak pada kemampuan profesionalnya dan keberaniannya mengambil keputusan dengan pertimbangan yang cermat, dan keputusan itu mendapat dukungan komunitas sekolah (Sagala, 2004: 133).

Dalam konteks pendidikan, kegiatan manajemen pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut.

- a. Administrasi material, yaitu kegiatan yang menyangkut bidang-bidang materi seperti ketatausahaan sekolah, administrasi keuangan, gedung, dan alat-alat perlengkapan sekolah, dan lain-lain.
- b. Administrasi personel, yaitu kegiatan yang mencakup di dalamnya administrasi personel tenaga pendidik, dan pegawai sekolah, juga administrasi murid. Dalam hal ini masalah kepemimpinan dan supervisi memegang peranan penting.
- c. Administrasi kurikulum, seperti tugas mengajar tenaga pendidik, penyusunan silabus, persiapan harian, mingguan, dan sebagainya (Rusman, 2008: 127).

2. Pemanfaatan Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang membantu proses belajar mengajar. Sumber belajar tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian ataupun keseluruhan. Pendidikan konvensional memiliki paradigma bahwa tenaga pendidik adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga dianggap orang yang paling memiliki pengetahuan. Paradigma itu kemudian bergeser menjadi tenaga pendidik lebih dahulu tahu.

Namun, sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja pengetahuan tenaga pendidik bisa sama dengan peserta didik, bahkan murid bisa lebih dahulu tahu daripada tenaga pendidiknya. Itu semua dapat terjadi akibat perkembangan media informasi di sekitar kita sehingga pada saat ini tenaga pendidik bukan

lagi satu-satunya sumber belajar, melainkan tenaga pendidik memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai penyedia fasilitas belajar agar peserta didik mau belajar.

Ada beberapa fungsi sumber belajar. Beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan pedoman agar sumber belajar dapat berfungsi dengan optimal untuk memecahkan permasalahan pembelajaran adalah apa masalah pembelajaran yang dihadapi, bagaimana sumber belajar dapat membantunya, bagaimana sumber belajar itu dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan tenaga pendidik, berapa lama dapat digunakan, apa alat/sarana yang diperlukan dalam penggunaannya, bagaimana dapat ditemukan mutunya, apakah sumber belajar dapat diganti, dan bagaimana cara memerolehnya (Rusman, 2008: 135).

Menurut Satori, sebenarnya kita sering melupakan sumber belajar mengajar yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Setiap sekolah, bagaimanapun kecil atau terpercilnya, paling kurang memiliki empat sumber bahan pelajaran yang sangat kaya dan sangat bermanfaat, yaitu: 1) masyarakat desa di sekeliling sekolah; 2) lingkungan fisik di sekitar sekolah dan kehidupan anak; 3) bahan mengajar alamiah di tempat-tempat tertentu yang dapat dikumpulkan dan dapat dipakai secara cuma-cuma seperti batuan, ranting, kerang, daun-daunan dan sebagainya; dan 4) bahan-bahan sisa dari took-toko atau industri kecil seperti potongan kayu, kotak kosong, tutup botol, potongan kain, dan sebagainya (Satori, 2016 : 260).

Secara garis besar, sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang atau *learning resources by design*, dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau *learning resources by utilization*. Sumber belajar yang dirancang yaitu sumber belajar yang secara

husus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang ada di masyarakat, seperti museum, pasar, toko, tokoh masyarakat, dan lainnya yang ada di lingkungan sekitar (Rusman, 2008: 135-137).

3. Penggunaan Media Pembelajaran

Media pembelajaran mengandung makna wadah yang berisi pesan yang berpijak pada kaidah ilmu komunikasi. Dalam proses pembelajaran terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu: 1) tingkat pengolahan informasi; 2) tingkat penyampaian informasi; 3) tingkat penerimaan informasi; 4) tingkat pengolahan informasi; 5) tingkat respons dari peserta didik; 6) tingkat diagnosis dari tenaga pendidik; 7) tingkat penilaian; dan 8) tingkat penyampaian hasil. Oleh karena itu, terjadinya pengalaman belajar yang bermakna tidak terlepas kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran memiliki kegunaan untuk memperjelas pesan agar tidak verbalistik, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, menimbulkan gairah belajar, memungkinkan peserta didik belajar mandiri, dan memberi rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pemilihan media pembelajaran yaitu: 1) ketepatan dengan tujuan pembelajaran artinya media pembelajaran dipilih atas

dasar tujuan pembelajaran; 2) dukungan terhadap isi materi pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami; 3) kemudahan mendapatkan media, artinya media yang diperlukan mudah diperoleh; 4) keterampilan tenaga pendidik menggunakan media; 5) tersedia alokasi waktu untuk mempergunakan media; 6) memilih media pembelajaran harus sesuai taraf berpikir dan perkembangan peserta didik (Rusman, 2008: 155).

Kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan banyak sekali ragamnya. Mulai dari kegiatan yang paling dasar, seperti membaca, mendengarkan, menulis sampai kepada kegiatan-kegiatan yang jauh lebih kompleks yang mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dasar tersebut, seperti mengerjakan tugas, sajian kelas, membuat laporan, diskusi, dan seterusnya. Tersedianya media penting sekali untuk merangsang kegiatan belajar peserta didik. Kehadiran tenaga pendidik untuk mengarahkan kegiatan belajar; buku teks, sebagai sumber informasi; proyektor untuk menampilkan film dan media-media lain amat diperlukan untuk merangsang kegiatan belajar peserta didik (Degeng, 1989:150).

4. Penggunaan Strategi dan Model Pembelajaran

Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada tenaga pendidik, dan pendekatan yang

berpusat pada peserta didik. Pendekatan yang berpusat pada tenaga pendidik menurunkan strategi pembelajaran langsung (*direct instruction*), pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sementara itu, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurunkan strategi pembelajaran *inquiry*, dan *discovery* serta pembelajaran induktif. Model-model pembelajaran disusun berdasarkan berbagai prinsip atau teori pengetahuan. Para ahli menyusun model pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung (Rusman, 2008: 193).

Strategi pengelolaan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana menata interaksi antara peserta didik dengan strategi pengajaran lainnya yaitu strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian pengajaran. Reigeluth dan Merrill mengemukakan paling tidak ada tiga hal yang menjadi urusan strategi pengelolaan, yaitu: 1) penjadwalan penggunaan strategi pengajaran; 2) pembuatan catatan kemajuan belajar peserta didik; dan 3) pengelolaan motivasional. Selain itu, Degeng menambahkan satu aspek dari tiga aspek yang dikemukakan oleh Reigeluth dan Merrill, yaitu aspek kontrol belajar.

Kontrol belajar penting sekali untuk mempreskripsikan strategi pengelolaan karena hal ini secara langsung dapat memberi petunjuk bagaimana sebaiknya menata hubungan antara setiap peserta didik dengan pengajaran (Degeng, 1989: 153).

Sebelum menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih strategi

pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian sosial, dan kemampuan vokasional. Kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pelajaran, apakah materi pelajaran berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu. Ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik, apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik. Keempat, pertimbangan lainnya yang bersifat nonteknis, apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu strategi. (Rusman, 2008: 195).

5. Kualitas Kinerja Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan. Salah satu unsur tenaga kependidikan adalah tenaga pendidik/tenaga pengajar yang tugas utamanya adalah mengajar. Karena tugasnya mengajar, maka tenaga pendidik harus memiliki wewenang mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar.

Sebagai tenaga pengajar, setiap tenaga pendidik/pengajar harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang proses belajar mengajar atau pembelajaran. Dengan kemampuan itu, tenaga pendidik dapat melaksanakan perannya, yaitu: 1) sebagai fasilitator, yang menyediakan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan belajar; 2) sebagai pembimbing, yang

membantu peserta didik mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran; 3) sebagai penyedia lingkungan belajar, yang berupaya menciptakan lingkungan yang menantang peserta didik agar melakukan kegiatan belajar; 4) sebagai komunikator, yang melakukan komunikasi dengan peserta didik dan masyarakat; 5) sebagai model yang mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik agar berperilaku baik; 6) sebagai evaluator, yang melakukan penilaian terhadap kemajuan peserta didik; 7) sebagai inovator, yang turut menyebarluaskan usaha-usaha pembaruan kepada masyarakat; 8) sebagai agen moral dan politik, yang turut membina moral masyarakat, peserta didik, serta menunjang upaya-upaya pembangunan; 9) sebagai agen kognitif, yang menyebarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dan masyarakat; 10) sebagai manajer, yang memimpin kelompok peserta didik dalam ruang kelas sehingga proses pembelajaran berhasil (Hamalik, 2008: 9).

Tenaga pendidik sebagai bagian dari sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum dapat dilihat dari pandangan tenaga pendidik terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Hal ini dikarenakan pandangan tenaga pendidik terhadap mata pelajaran yang diajarkan memengaruhi proses pembelajaran. Tenaga pendidik yang menganggap mata pelajaran IPS sebagai mata pelajaran hafalan, misalnya akan berbeda dalam pengelolaan pembelajarannya sebagai mata pelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir; demikian juga dengan mata pelajaran matematika, banyak tenaga pendidik yang menganggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Pandangan yang demikian dapat memengaruhi cara penyajian mata pelajaran tersebut di dalam kelas (Sanjaya, 2008: 199).

6. Pembiayaan

Secara umum, dipahami bahwa salah satu aspek pendint dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah masalah pembiayaan pendidikan. Konsep pembiayaan pendidikan pada dasarnya memiliki asas yang berbeda dengan pembiayaan sektor non-pendidikan. Jika seseorang membiayai sistem pendidikan tentu tidaklah serta merta dia harus mentenaga pendidiksi atau memengaruhi penyelenggaraan dan administrasinya. Kedua fungsi ini dapat dilakukan pemerintah dalam batas-batas yang dimungkinkan sebagai tanggung jawab pemerintah membiayai pendidikan sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai pelindung masyarakat.

Meskipun demikian, manajemen sekolah yang otonom juga harus menjadi perhatian dan di sinilah pemberdayaan sekolah dan masyarakat diperlukan (Sagala, 2004: 173).

Pembiayaan pendidikan diartikan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan lembaga pendidikan. Ini berarti bahwa manajemen dituntut mampu menghimpun dana (*fund rising*) dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan lembaga pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konsep dasar biaya pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya satuan pendidikan (*unit cost*) (Baharuddin & Makin, 2010: 116).

Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan

penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pentenaga pendidikan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik (Wahyudin, 2021: 1).

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yaitu: 1) menginventarisir program atau kegiatan sekolah selama satu tahun mendatang; 2) menyusun program atau kegiatan tersebut berdasarkan jenis kerja dan prioritas; 3) menghitung volume, harga satuan, dan kebutuhan dana untuk setiap komponen kegiatan; 4) membuat kertas kerja dan lembaran kerja, menentukan sumber dana dan pembebanan anggaran serta menuangkannya ke dalam format baku RAPBS/RAPBM; dan 5) menghimpun data pendukung yang akurat untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan (Syafaruddin dan Nurmawati, 2011: 246).

Dalam setiap lembaga pendidikan, faktor *budgeting* (anggaran pendanaan) merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan *budgeting* yang sistematis dan tepat guna, supaya dana yang ada dikelola secara efektif dan efisien, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap personil yang ada dalam lembaga pendidikan. Dengan demikian, identifikasi terhadap pembiayaan pendidikan perlu dilakukan.

Adapun hal-hal yang termasuk pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji tenaga pendidik, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orangtua, maupun peserta didik. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di lembaga pendidikan, misalnya biaya hidup peserta didik, biaya transportasi ke sekolah/madrasah, biaya jajan, dan harga kesempatan (*opportunity cost*).

Kedua, biaya pribadi dan biaya sosial. Biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau pengeluaran rumah tangga. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah/madrasah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Ketiga, *monetary cost dan non-monetary* yaitu biaya dalam bentuk uang dan bukan uang. Keempat, biaya rutin dan biaya modal. Biaya rutin (*recurring cost*) adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (tenaga pendidik dan non tenaga pendidik) serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran.

Biaya modal (*capital cost*) atau disebut juga biaya pembangunan mencakup biaya untuk pembangunan fisik, pembelian tanah, dan pengadaan barang-barang lainnya yang didanai melalui anggaran pembangunan. Contoh biaya pembangunan adalah biaya pembelian atau pengembangan

tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya barang-barang yang tidak habis pakai (Baharuddin & Makin, 2010: 133).

7. Sarana dan prasarana

Manajemen sarana dan prasarana merupakan satu bidang manajemen pendidikan di lembaga pendidikan. Karena itu manajemen sarana dan prasarana atau perlengkapan lembaga pendidikan merupakan salah satu bagian kajian dalam manajemen pendidikan tentang bagaimana memberikan layanan profesional bidang perlengkapan dan fasilitas sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi serta kinerja lembaga pendidikan. Dengan kata lain, manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses-proses belajar mengajar.

Intinya, manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien (Syafaruddin dan Nurmawati, 2011: 247-248)

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pendidikan yang perlu dikelola adalah sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pendidikan diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, yaitu: ruang belajar, perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Sedangkan klasifikasi yang kedua adalah prasarana lembaga pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tetapi secara

langsung sangat menunjang terjadinya kegiatan pembelajaran. Prasarana yang terkait dengan kegiatan yang dimaksud adalah kantor, kantin, tanah, jalan menuju lembaga pendidikan, kamar kecil, unit usaha kesehatan, ruang tenaga pendidik, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan (Syafaruddin dan Nurmawati, 2011: 248).

Pada dasarnya sarana menjamin adanya kemudahan dalam interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik. Sarana berfungsi memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Oleh karena itu hendaknya dipilih sarana yang memiliki ciri-ciri, yaitu: 1) menarik perhatian dan minat peserta didik; 2) meletakkan dasar-dasar untuk memahami sesuatu hal secara konkrit yang sekaligus mencegah atau mengurangi verbalisme; 3) merangsang tumbuhnya pengertian dan atau usaha pengembangan nilai-nilai; 4) bernilai dan berfungsi ganda; dan 5) sederhana, mudah digunakan dan dirawat, dapat dibuat sendiri oleh tenaga pendidik atau diambil dari lingkungan sekitar (Yulaelawati, 2007: 158).

Daftar Pustaka

- Baharuddin & Makin, Moh. 2010. *Manajemen Pendidikan Islam: Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*. Malang: UIN Maliki Press.
- Cooper Gibson Research. 2018. *Use and Perceptions of Curriculum Support Resources in Schools*. United Kingdom: Department for Education.
- Degeng, I Nyoman Sudana. 1989. *Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kusumawati, Naniek & Rulviana, Vivi. 2017. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar*. Magetan: AE Media Grafika.
- Rusdiana, A. & Ratnawulan Elis. 2022. *Manajemen Kurikulum: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya di Sekolah/Masyarakat*. Bandung: Arsad Press.
- Rusman. 2008. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sagala, Syaiful. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Nimas Multima.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Satori, Djam'an. 2016. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin dan Nurmawati. 2011. *Pengelolaan Pendidikan: Mengembangkan Keterampilan Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif*. Medan: Perdana Publishing.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 2*. Bandung: Imperial Bhakti Utama.

- Uljen, Michael & Ylimaki, Rose M (eds.). 2017. *Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory And Didaktik: Non-affirmative Theory of Education*. Switzerland: Springer Open.
- Wahyudin, Undang Ruslan. 2021. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas*. Sleman: Depublish Publisher.
- Wathoni, Lalu Muhammad Nurul. 2018. *Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Pemikiran Filosofis Kurikulum 2013*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yulaelawati, Ella. 2007. *Kurikulum dan Pembelajaran: Filosofi, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Pakar Raya.

BAB XI

PENGEMBANGAN TUJUAN DAN KONTEN KURIKULUM

Istifadah



A. Merumuskan Maksud, Tujuan dan Sasaran Kurikulum

Dalam *Curriculum Foundation, principles and issues*, Allan C. Ornstein & Francis P. Hunkins (2018:224) mengatakan bahwa, “*curriculum development begins with a realization of the major challenges involved*”. Langkah awal pengembangan kurikulum dimulai dengan realisasi tantangan utama yang terlibat. Dengan demikian kurikulum harus melibatkan potensi tantangan kontemporer yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Untuk itu tantangan global yang ditandai dengan perubahan sosial, budaya, dan kemajuan teknologi merupakan isu-isu faktual sebagai aktualisasi pengembangan tujuan dan konten kurikulum.

Kurikulum harus memungkinkan siswa untuk mencapai pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta memajukan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat baik dalam perspektif lokal maupun global.

Pengembangan kurikulum pada dasarnya mengacu pada dua bidang pengetahuan: desain kurikulum dan desain instruksional. Pada umumnya kurikulum sekolah terus melakukan modifikasi, tetapi praktik pengajaran tampaknya tidak banyak berubah. Program harus memberikan perhatian

lebih tentang tujuan, bagaimana konten baru akan diajarkan. dan bagaimana lingkungan pembelajaran akan diatur. Dengan demikian, pihak yang bertanggung jawab dengan pengembangan tujuan dan konten kurikulum harus mengacu pada keahlian spesialis desain instruksional dengan memulai langkah-langkah berikut.

1. Merumuskan Maksud Kurikulum

Diskusi tentang maksud sangat penting untuk pengembangan kurikulum pendidikan. Maksud memberikan jawaban mengapa kita menganut keyakinan terhadap tindakan tertentu dan memberikan arahan dan mencerminkan penilaian nilai kita. Ralph Tyler di dalam Ornstein & Hunkins (2018) memberikan ringkasan maksud kurikulum sebagai berikut; a) mengembangkan realisasi diri, b) membuat individu melek huruf, c) mendorong mobilitas sosial, d) memberikan keterampilan yang produktif, e) melengkapi peralatan mengenai jasa material dan non material, dan f) menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pembelajaran berkelanjutan.

Pendapat Tyler di atas masih relevan hingga saat ini. Namun, Noddings di dalam Ornstein & Hunkins (2018) berpendapat bahwa pendidikan, hari ini mengabaikan pertanyaan pada diri sendiri mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Pendidikan saat ini bukan hanya untuk mendidik atau melatih siswa untuk menjadi roda penggerak mesin industri. Namun pendidikan yang memungkinkan siswa untuk menjadi individu yang utuh secara: sosial, sipil, pribadi, artistik, profesional, etika-moral, dan spiritual. Pada praktiknya, maksud kurikulum tidak akan tercapai sepenuhnya, namun menekankan pada proses perjalanan kemajuan menuju pencapaian. Maksud kurikulum berharap siswa memperoleh pemahaman yang diperlukan untuk

perjalanan pembelajaran dan tindakan yang bermakna serta memiliki sensitifitas terhadap zaman di mana mereka belajar.

Dinamika kehidupan akan menghadapkan pendidikan dengan persoalan-persoalan yang memerlukan penyesuaian secara khusus dalam kurikulum. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus menjadi dasar pijak dalam merumuskan maksud kurikulum. Kurikulum harus mengembangkan rumusan maksud pendidikan yang berbicara dengan hubungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat global.

2. Merumuskan Tujuan Kurikulum

Langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum adalah merumuskan tujuan. Siswa berpikir kritis, tanggung jawab, pembelajaran mandiri merupakan tujuan umum dari kurikulum pendidikan. Tujuan dan standar tampaknya telah menyatu dalam dialog pendidikan sebagaimana pandangan Diane Ravitch di dalam Ornstein & Hunkins (2018) yang mengatakan bahwa, standar adalah tujuan dan juga tolok ukur kemajuan dalam mencapai hasil belajar. Disamping sebagai bagian dari pengembangan kurikulum diskusi tentang tujuan dan standar dengan pertimbangan strategi pengajaran, khususnya bagaimana metode pengajaran dapat mencapai, atau memotivasi siswa untuk mencapai standar tertentu.

Tujuan kurikulum harus dirancang oleh pendidik yang memiliki pengetahuan tentang sekolah, teori kurikulum, pengembangan kurikulum, dan evaluasi kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2018:226). Ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Alasan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, tujuan erat

kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dengan demikian perumusan tujuan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum.

Kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan tujuan yang jelas dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang harus dipelajari, menentukan metode dan strategi pembelajaran, menentukan alat, media, dan sumber pembelajaran, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa.

Ketiga, tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai control dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran. Artinya, melalui penetapan tujuan, para pengembang kurikulum termasuk guru dapat mengontrol sampai mana siswa telah memperoleh kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lebih jauh dengan tujuan dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah.

a. Klasifikasi Tujuan

Menurut Bloom, dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives* yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain (bidang), yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor.

1) Domain Kognitif.

Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu: a) Pengetahuan (knowledge), b) Pemahaman, c) Penerapan, d) Analisis, e) Sintesis, dan f) Evaluasi.

2) Domain Afektif.

Domain kognitif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krathwohl, dkk. (1964), dalam bukunya *Taxonomy of Educational Objectives: Affective Domain*, domain afektif memiliki tingkatan yaitu: a) Penerimaan, b) Merespons, c) Menghargai, d) Mengorganisasi, dan e) Karakterisasi nilai.

3) Domain Psikomotor.

Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada enam tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini, yaitu: a) Gerak reflek, b) Keterampilan dasar, c) Keterampilan perseptual,

d) Keterampilan fisik, e) Gerakan keterampilan, dan f) Komunikasi non diskusi.

Dengan bahasa lain, ketiga domain tersebut (kognitif, afektif, dan psikomotor) dapat digambarkan dalam “3H”, yaitu Head, Heart, dan Hand”. Head yaitu pengembangan bidang intelektual (kognitif), Heart yaitu pengembangan sikap (afektif), dan Hand yaitu pengembangan keterampilan (psikomotor). Dalam setiap rumusan tujuan pembelajaran, idealnya ketiga domain itu harus berjalan, secara seimbang. Terlalu menekankan kepada salah satu domain saja, seperti misalnya pengembangan intelektual saja, atau sikap saja, tidak akan dapat membentuk manusia yang berkembang secara utuh seperti yang digambarkan dalam pendidikan nasional. Pencapaian ketiga domain secara seimbang harus menjadi acuan dan target setiap guru dalam proses pembelajaran.

b. Hirarki Tujuan

Secara hirarkis, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Tujuan pendidikan dari yang bersifat umum sampai kepada tujuan khusus itu dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN)

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang sarat dengan muatan filosofis suatu bangsa. TPN merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan,

artinya setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. TPN merupakan sumber dan pedoman dalam usaha penyelenggaraan pendidikan.

2) Tujuan Institusional (TI)

Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, seperti misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi.

3) Tujuan Kurikuler (TK)

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan

sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional.

4) Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran (TP)

Dalam klasifikasi tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran atau yang disebut juga dengan tujuan instruksional, merupakan tujuan yang paling khusus. Tujuan pembelajaran adalah kemampuan (kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. Hal ini seperti yang dikemukakan Dick and Carey (1995), *The instructional goal is statement that describes what it is that student will be able to do after they have completed instruction*. Karena hanya guru yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, maka menjabarkan tujuan pembelajaran ini adalah tugas guru. Sebelum guru melakukan proses belajar mengajar, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak didik setelah mereka selesai mengikuti pelajaran.

Untuk dapat mengetahui cara merumuskan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar, maka ada empat komponen pokok yang harus nampak dalam rumusan indikator hasil belajar seperti yang digambarkan dalam pertanyaan berikut:

- a) Siapa yang belajar atau yang diharapkan dapat mencapai tujuan hasil belajar itu?
- b) Tingkah laku atau hasil belajar yang bagaimana yang diharapkan dapat dicapai
- c) Dalam kondisi yang bagaimana hasil belajar itu dapat ditampilkan?
- d) Seberapa jauh hasil belajar itu bisa diperoleh?

Pertanyaan pertama berhubungan dengan subjek belajar. Rumusan indikator hasil belajar sebaiknya mencantumkan subjek yang melakukan proses belajar, misalnya siswa, peserta belajar, peserta penataran, dan lain sebagainya. Penentuan subjek ini sangat penting dalam menentukan sasaran belajar. Pertanyaan kedua, berhubungan dengan tingkah laku yang harus muncul sebagai indikator hasil belajar setelah subjek mengikuti atau melaksanakan proses pembelajaran. Ada dua hal yang harus diperhatikan dengan rumusan tingkah laku ini. Pertama, rumusan tingkah laku yang berorientasi pada hasil belajar yang lebih rasional sebagai dampak dari suatu proses pembelajaran.

3. Merumuskan Sasaran Kurikulum

Dalam konteks tujuan, perlu untuk merumuskan sasaran yang lebih spesifik. Apabila tujuan bersifat jangka panjang, maka sasaran bersifat jangka pendek. Secara umum terdapat beberapa tipologi sasaran dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut;

a. Sasaran Perilaku (*behavioral objective*)

Sebagian besar pendidik berpendapat bahwa sasaran harus dituangkan terkait dengan pencapaian yang dapat diamati atau diukur. Perilaku sebagai sasaran kurikulum dapat menunjukkan bahwa siswa telah memperoleh keterampilan tertentu atau mencapai standar pengetahuan. Mager di dalam Ornstein & Hunkins (2018) berpendapat bahwa sasaran kurikulum harus menggambarkan; 1) perilaku yang menunjukkan seorang pembelajar telah mencapai tujuan, 2) kondisi atau situasi yang dikenakan pada pembelajar ketika ia menunjukkan prestasi, dan 3) tingkat kemahiran standar minimal yang dapat diterima.

b. Sasaran Non-perilaku (*nonbehavioral general objectives*)

Sasaran kurikulum non perilaku menggunakan narasi kata-kata seperti menghargai, mengetahui, dan memahami dalam setiap tujuan kurikulum. Menyatakan sasaran terlalu spesifik dianggap terlalu membatasi pembelajaran untuk pencapaian yang terukur.

c. Sasaran Kognitif (*cognitive objectives*)

Taksonomi sasaran pendidikan diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 yang membagi

pembelajaran kognitif menjadi; 1) pengetahuan, 2) pemahaman, 3) penerapan, 4) analisis, 5) sintesis, dan 6) evaluasi. Sasaran kognitif kurikulum menekankan kepada kemampuan proses kognitif siswa yang ditujukan untuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.

d. Sasaran Afektif (*affective objectives*)

David Krathwohl di dalam Ornstein & Hunkins (2018) telah memecah sasaran afektif menjadi lima tingkat pencapaian sebagai berikut; menerima sasaran, menanggapi sasaran, menilai sasaran, mengelola sasaran, dan karakterisasi sasaran. Mempertimbangkan sasaran afektif membutuhkan kesadaran untuk mendorong batas-batas dimensi pengetahuan, dimensi proses kognitif, dan dimensi emosional.

e. Sasaran Psikomotor (*psychomotor objectives*)

Ranah psikomotorik kurang mendapat penekanan dibanding dengan sasaran kognitif dan afektif. Anita Harrow di dalam Ornstein & Hunkins (2018) membagi sasaran psikomotor menjadi enam level sebagai berikut; gerakan refleks (*segmental* dan *intersegmental*), gerakan dasar (berjalan, berlari, melompat, mendorong, menarik, dan memanipulasi), persepsi (kinestetik, visual, auditori, dan koordinasi), kemampuan fisik (daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, kelincahan, reaksi, dan ketangkasan), gerakan terampil (permainan, olah raga, tarian, dan seni), gerak non diskursif (postur, gestur, ekspresi, dan gerak kreatif (Ornstein & Hunkins, 2018:232).

B. Menentukan Konten Kurikulum

Dalam sejarah perkembangannya, konten kurikulum merupakan komponen yang paling sengit diperdebatkan. Ketika masyarakat berubah, dari lokal menjadi global dan dari analog menjadi digital, maka hal ini merupakan tantangan faktual yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Menghadapi kenyataan ini, pertanyaan penting yang harus diperhatikan bagi kurikulum adalah menentukan dan memilih pengetahuan apa yang dibutuhkan siswa agar berhasil dalam mengarungi tantangan. Sejauh mana siswa harus 'menguasai' terhadap pengetahuan yang dipilih?. Pertanyaan mendasar ini membawa pada masalah standarisasi, bahwa pengetahuan yang dipilih untuk kurikulum harus memiliki standar dan memperhatikan dua hal; a) pengetahuan yang bermanfaat secara budaya dan historis, dan b) tingkat keterampilan untuk menggunakan pengetahuan yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan individu.

Tantangan global dan era digital memberikan tantangan bagi kurikulum untuk memilih konten dari dua dunia: dunia nyata dan dunia virtual. Harus dipahami kenyataan bahwa dunia nyata dan dunia virtual pada dasarnya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda. Fakta hari ini, kehidupan sebagai penghuni dunia virtual telah menjadi familiar di seluruh belahan dunia. Saat ini hampir seluruh kegiatan fisik dunia nyata dapat dilakukan dengan transaksi dunia virtual. Hal ini harus diantisipasi dan ditindaklanjuti sebagai kendaraan untuk kemajuan pendidikan formal. Jika seorang siswa berminat pada bidang tertentu, maka ia dapat melakukan perjalanan ke perpustakaan virtual di seluruh dunia sesuai dengan minatnya.

Dalam banyak kasus, kemajuan teknologi menyebabkan banyak gaya belajar dan bidang pengetahuan bermetamorfosis karena membuat jarak dan waktu menjadi tidak relevan. Di

dunia virtual, kurikulum tidak hanya harus memilih konten yang melayani siswa dengan baik, tetapi konten yang dipilih juga harus 'hidup'. Hal ini senada dengan apa yang ditegaskan oleh Alfred North Whitehead dalam esai *The Aims of Education*, Whitehead mengkritik para pendidik yang mengabaikan kepentingan siswa, karena memilih konten dan menyajikannya dengan cara-cara yang membuatnya "mati", karena konten kurikulum terputus dari kenyataan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Tantangan pendidikan abad ini adalah menjaga agar pengetahuan tetap 'hidup' dan memiliki *ability* terhadap tantangan perubahan. Ketika memilih konten kurikulum, apa dan bagaimana siswa belajar harus menjadi pertimbangan utama.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih materi pengembangan tujuan dan konten kurikulum sebagai berikut;

1. Konsepsi konten kurikulum

Desain kurikulum harus memilih konten kurikulum dan pengalaman yang memungkinkan siswa untuk belajar maksimal. Materi yang dipilih harus tidak terbatas dan multi dimensi, namun holistik. Satu-satunya batasan ruang lingkup materi hanyalah imajinasi pendidik dan imajinasi siswa.

2. Mengelola konten kurikulum

Perancang kurikulum harus menggunakan orientasi logis untuk mengatur konten kurikulum menurut aturan dan konsep tertentu, berdasarkan pertimbangan kepraktisan dalam arti kemampuan untuk melaksanakan, dan efisiensi biaya penataan atau penyampaian materi pelajaran dengan metode tertentu.

3. Kriteria memilih konten kurikulum

Terlepas dari preferensi dan orientasi filosofis, pengembangan desain kurikulum harus menetapkan kriteria dalam memilih konten kurikulum.

- a. *Self Sufficiency*, konten kurikulum harus memenuhi kriteria kecukupan diri (*self sufficiency*) yang dipertimbangkan secara mendalam. Konten kurikulum tidak hanya sekedar mengejar pengetahuan dan keterampilan, namun juga melengkapi pengalaman belajar secara intelektual, emosional, dan spiritual.
- b. *Significancy*, konten kurikulum harus memiliki signifikansi sejauh mana akan memberi kontribusi pada ide dasar, konsep, prinsip, dan generalisasi dari keseluruhan tujuan pembelajaran dan pengembangan kemampuan, proses, dan pembentukan sikap.
- c. *Validity*, ditengah derasnya arus informasi, konten kurikulum yang dipilih harus memenuhi kriteria validitas keasliannya. Validitas harus diverifikasi secara berkala selama durasi program kurikulum untuk menentukan validitasnya.
- d. *Interest*, minat merupakan salah satu kriteria dan sumber utama yang harus dipenuhi dalam memilih dan menentukan materi kurikulum.
- e. *Utility*, daya guna konten kurikulum juga harus dipertimbangkan sebagai kriteria, karena hal ini menyangkut kegunaan materi kenapa harus dipelajari.
- f. *Ability*, konten kurikulum harus berada dalam jangkauan pengalaman siswa sehingga tidak kesulitan untuk dipelajari.

- g. *Feasibility*, konten kurikulum yang dipilih harus memenuhi kriteria kelayakan dalam arti pertimbangan waktu yang tersedia, sumber daya manusia, payung hukum, dan daya dukung biaya yang tersedia (Ornstein & Hunkins, 2018:238).

Pada umumnya konten kurikulum yang harus dipelajari siswa terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum, dan keterampilan. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda, yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indra. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data yang spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang dapat diuji atau diobservasi. Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep.

Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep yang lain. contoh, anak laki-laki merupakan suatu konsep, yang memiliki atribut tertentu yang berbeda dengan atribut yang dimiliki oleh konsep anak perempuan.

Hubungan antara dua atau lebih konsep yang sudah teruji secara empirik dinamakan generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik ke dalam prinsip.

Materi pelajaran tentang prinsip akan lebih sulit dibandingkan dengan fakta, atau konsep. Sebab, seorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami berbagai fakta dan konsep yang relevan. Ada juga yang lebih tinggi dari generalisasi atau prinsip, yaitu yang dinamakan teori. Menurut Goetz dan Lacomte, teori adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah proposisi atau

generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Teori merupakan pengetahuan taraf tinggi dari pengembangan suatu ilmu. Melalui teori, dapat menerangkan dan meramalkan perilaku manusia atau kejadian-kejadian tertentu.

Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Keterampilan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu keterampilan intelektual dan keterampilan fisik. Keterampilan intelektual adalah keterampilan berpikir melalui usaha menggali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi, baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. Contohnya adalah keterampilan menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang sistematis, keterampilan mengevaluasi suatu program atau mengevaluasi suatu objek, keterampilan menyusun program kegiatan, keterampilan membuat perencanaan, dan lain sebagainya. Keterampilan fisik adalah keterampilan motorik seperti keterampilan mengoperasikan computer, keterampilan mengemudi, dan lain sebagainya. Secara umum ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan materi kurikulum, khususnya ditinjau dari sudut siswa, yaitu: a) Tingkat kematangan siswa, b) Tingkat pengalaman anak, dan c) Taraf kesulitan materi.

4. Proses memilih konten kurikulum

Konten kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Muatan kurikulum akan berhubungan dengan pertanyaan: apakah yang harus diajarkan dan dipahami siswa? Masalah ini tentu saja erat kaitannya dengan konten

kurikulum apa saja yang harus dirancang. Secara proses, pemilihan konten kurikulum melewati beberapa tahap sebagai berikut; a) Identifikasi kebutuhan (*need assessment*), b) Mendapatkan bahan kurikulum (*Assess the curriculum materials*), c) Analisis bahan (*analyze the materials*), d) Penilaian bahan kurikulum (*appraisal of curriculum materials*), dan e) Membuat keputusan mengadopsi bahan (*make an adoption decision*).

a. Identifikasi kebutuhan (*need assessment*).

Kebutuhan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dengan demikian, penentuan bahan atau materi kurikulum harus dimulai dari penilaian apakah bahan yang ada sudah cukup memadai untuk mencapai tujuan atau tidak. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, tujuan kurikulum tidaklah statis akan tetapi dinamis. Artinya tujuan yang harus dicapai harus senantiasa diperbarui sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, yang berarti penyusunan bahan kurikulum pun harus mengalami penyesuaian.

b. Mendapatkan bahan kurikulum (*Assess the curriculum materials*)

Mendapatkan bahan kurikulum yang sesuai dengan tujuan bukanlah perkara mudah. Proses pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang matang serta motivasi dan keseriusan yang sungguh-sungguh. Hal ini dimaksudkan agar bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan validitasnya.

c. **Analisis bahan (*analyze the materials*)**

Analisis bahan kurikulum diperlukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan menilai terhadap bahan kurikulum baik dilihat dari sudut kelengkapan, maupun keakuratannya dapat mengakibatkan rendahnya kualitas kurikulum. Menganalisis materi kurikulum dapat dilakukan dengan melihat informasi tentang bahan yang bersangkutan. Disamping itu, analisis bahan dapat dilakukan dengan mencermati isi kurikulum itu sendiri, misalnya menguji validitas fakta, konsep, generalisasi atau keterampilan yang ada dalam bahan kurikulum itu.

d. **Penilaian bahan kurikulum (*appraisal of curriculum materials*)**

Manakala bahan kurikulum telah dianalisis keakuratannya, maka selanjutnya diberi penilaian, apakah bahan itu layak digunakan atau tidak, sesuaikah dengan tuntutan kurikulum atau tidak. Dalam menentukan keputusan tersebut, perlu juga diuji *scope* dan *sequence*-nya. Apakah tingkat kedalaman serta urutan bahan sesuai dengan tarap perkembangan siswa atau tidak, dan apakah urutannya sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah atau tidak.

e. **Membuat keputusan mengadopsi bahan (*make an adoption decision*).**

Membuat keputusan apakah bahan layak untuk diadopsi atau tidak merupakan tahap terakhir menyeleksi bahan. Tahap ini merupakan tahap yang

penting dan biasanya cukup sulit dilakukan, oleh karena adanya kemungkinan perbedaan pendapat dari para pengembang materi kurikulum. Penentuan kelayakan ini harus dilakukan secara objektif. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum perlu bekerja secara hati-hati serta menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan subjektif.

C. Representasi Pengembangan Tujuan dan Konten Kurikulum

Dalam konteks kurikulum pendidikan nasional, tujuan dan konten kurikulum telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan berubahnya tantangan global dan munculnya paradigma baru dalam dunia pendidikan. Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pengembangan dari kurikulum 2013 adalah jawaban sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi era *new normal*. Dalam UU Nomor 56/M/2022 (Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, 2022) tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran menyebutkan bahwa, “Pemerintah menetapkan tema-tema utama untuk dirumuskan menjadi topik oleh satuan pendidikan sesuai dengan konteks wilayah serta karakteristik peserta didik”. Dengan demikian, pengembangan tujuan dan konten kurikulum harus merujuk pada tema-tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sebagai berikut.

1. Gaya Hidup Berkelanjutan.

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum harus mendorong peserta didik untuk memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun

lingkungan sekitarnya. Desain tujuan dan konten kurikulum menekankan pada peserta didik untuk membangun kesadaran bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

2. Kearifan Lokal.

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan untuk mendorong peserta didik dalam membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Tujuan dan konten kurikulum juga diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk mempelajari bagaimana dan mengapa masyarakat lokal/daerah berkembang seperti yang ada, konsep dan nilai-nilai dibalik kesenian dan tradisi lokal, serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

3. Bhinneka Tunggal Ika

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan untuk mendorong peserta didik untuk mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Tujuan dan konten kurikulum juga diharapkan dapat merangsang

peserta didik untuk mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaan, secara kritis dan reflektif menelaah berbagai stereotip negatif dan dampaknya terhadap terjadinya konflik dan kekerasan. Tema ini ditujukan untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

4. Bangunlah Jiwa dan Raganya

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan mendorong peserta didik untuk membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Tujuan dan konten kurikulum juga diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri (*wellbeing*), perundungan (*bullying*), serta berupaya mencari jalan keluarnya.

Disamping itu tujuan dan konten kurikulum juga mengharapkan peserta didik untuk menelaah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, termasuk isu narkoba, pornografi, dan kesehatan reproduksi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan sederajat.

5. Suara Demokrasi.

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan mendorong peserta didik untuk menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta

tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan/atau dalam dunia kerja. Tema ini ditujukan untuk jenjang SMP, SMA, SMK dan sederajat.

6. Rekayasa dan Teknologi.

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan mendorong peserta didik untuk melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Peserta didik dapat membangun budaya smart society dengan menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat sekitarnya melalui inovasi dan penerapan teknologi, mensinergikan aspek sosial dan aspek teknologi. Tema ini ditujukan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat.

7. Kewirausahaan.

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuhkembangkan. Tujuan dan konten kurikulum juga diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Tema ini

ditujukan untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan sederajat. Karena jenjang SMK/MAK sudah memiliki mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan, maka tema ini tidak menjadi pilihan untuk jenjang SMK.

8. **Kebekerjaan.**

Pengembangan tujuan dan konten kurikulum diharapkan mendorong peserta didik untuk menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Tujuan dan konten kurikulum juga diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk mengasah kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Tema ini ditujukan sebagai tema wajib khusus jenjang SMK/MAK.

Daftar Pustaka

- Anwar, Rusliansyah. 2020. Sejarah Perjalanan Kurikulum Indonesia. *Artikel*: Binus University Character Building Development Center.
- Kattington, E. Limon Ed. 2010. *Handbook of Curriculum Development, Education in a Competitive and Globalizing Word*. New York: Nova Science Publishers, Inc.
- Kelly, A. V. 2004. *The Curriculum Theory and Practice, Fifth Edition*. London: SAGE Publications Limited.
- Kemendikbud Republik Indonesia. 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Ornstein, C. Allan & Hunkins, P. Francis. 2018. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 7th edition*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Rawung, Willem Hanny. Katuuk, Deitje A. N.J. Rotty, Viktory. S.J. Lengkong, Jeffry. 2021. Kurikulum dan Tantangannya pada Abad 21. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*. Volume 10 Nomor 1 Tahun 2021, pp 29-34.
- Sanjaya, Wina. 2010. Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Schreiber, Jörg-Robert and Siege, Hannes. 2016. *Curriculum Framework Education for Sustainable Development*. Bonn: Engagement Global gGmbH.
- Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development Theory and Practice*. San Diego: Harcourt, Brace & World.
- Tyler, R. W. 1949. *Basic principles of curriculum and instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

BAB XII

PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER

Jakaria Umro



A. Hakekat, Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

1. Hakekat Pendidikan Karakter

Menurut Muhamimin Azzet (2014: 37) pendidikan karakter merupakan suatu sistem dalam penanaman nilai-nilai karakter yang baik kepada seluruh siswa sekolah sehingga memiliki pengetahuan dan tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan. Selanjutnya Menurut Samani dan Hariyanto (2013: 45) dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian keteladanan kepada siswa untuk menjadi insan seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga serta rasa dan karsa. Sedangkan pendidikan karakter menurut Salahudin dan Alkrienciehie (2013: 42) dapat dimaknai sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan setiap harinya.

Selanjutnya menurut Wibowo (2013: 40) pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan karakter kepada anak didik, sehingga mereka memiliki karakter yang luhur setelah memiliki maka dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah maupun

masyarakat. Menurut Ratna Megawangi (2013: 5) Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik pada anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.

Selanjutnya pendidikan karakter menurut Zubaedi (2012: 19) yaitu segala perencanaan usaha yang dilakukan oleh pendidik yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didiknya dalam memahami, membentuk, dan memupuk nilai-nilai etika secara keseluruhan. Sedangkan menurut Zusnani (2012: 155) pendidikan karakter adalah Proses pemberian tuntunan kepada peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya yang memiliki karakter dalam dimensi yang meliputi hati, pikir, dan raga, serta karsa. Anak didik diharapkan memiliki karakter yang baik meliputi: kejujuran, tanggungjawab, cerdas, bersih, sehat, peduli, dan kreatif.

Dari penjelasan berbagai pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan karakter, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan moral atau budi pekerti yang digunakan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang baik kepada seseorang, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan tindakan yang luhur setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

2. Fungsi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, hal ini diungkapkan oleh Zubaedi (2012: 18) yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Fungsi untuk pembentukan dan pengembangan potensi

Pendidikan karakter berfungsi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berfikir baik, berhati nurani yang baik, berperilaku baik dan berbudi luhur.

b. Fungsi untuk penguatan dan perbaikan

Pendidikan karakter untuk memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi dan atau masyarakat umum.

c. Fungsi penyaring

Pendidikan karakter dapat digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri dan dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa itu sendiri.

Sedangkan pendidikan karakter itu memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi seseorang, seperti yang dipaparkan oleh Salahudin dan Alkrienciehie (2013: 43) bahwa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi dasar agar berperilaku baik;
- b. Memperkuat perilaku yang sudah baik dan dapat memperbaiki perilaku yang kurang baik;
- c. Membantu untuk dapat menyaring budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan karakter adalah untuk menanamkan dan pembentukan serta pengembangan potensi dasar perilaku baik seseorang, kemudian potensi tersebut dikuatkan untuk diperbaiki, sehingga tetap memiliki nilai-nilai karakter yang baik sehingga ada penyaringan terhadap perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai karakter yang luhur.

3. Tujuan Pendidikan Karakter

Berkaitan dengan tujuan pendidikan karakter, bahwa menurut Muhaimin Azzet (2011: 16) sesungguhnya pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk setiap pribadi menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai yang utama, terutama nilai perbuatan dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada pemahamannya. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam pendidikan karakter adalah penekanan terhadap peserta didik untuk selalu mempunyai karakter yang baik dan diterapkan dalam bentuk perbuatan maupun sikap dan perilaku.

Sedangkan menurut Zaenul Fitri (2012: 22) Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk dan membangun pola pikir, sikap dan perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan bertanggungjawab. Secara substantif tujuan pendidikan

karakter adalah membimbing dan memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif. Menurut Kemendiknas (2010: 7) tujuan pendidikan karakter antara lain:

- a. Mengembangkan potensi qalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan;
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.

Sedangkan menurut Yahya Khan (2010: 17), pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi anak didik menuju *self actualization*;
- b. Mengembangkan sikap dan kesadaran akan harga diri;
- c. Mengembangkan seluruh potensi peserta didik, merupakan manifestasi pengembangan potensi akan membangun *self concept* yang menunjang kesehatan mental;
- d. Mengembangkan pemecahan masalah;

- e. Mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil, untuk membantu meningkatkan berpikir kritis dan kreatif;
- f. Menggunakan proses mental untuk menentukan prinsip ilmiah serta meningkatkan potensi intelektual;
- g. Mengembangkan berbagai bentuk metaphor untuk membuka intelegensi dan mengembangkan kreatifitas.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah mengembangkan, membentuk, dan menanamkan nilai-nilai yang positif pada peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang baik sehingga menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik dan bermartabat. Sikap dan perilaku itulah yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan menjadi suatu kebiasaan sebagai manusia yang memiliki karakter yang baik.

B. Nilai-Nilai Pembentukan Pendidikan Karakter

Bermoral merupakan suatu pertimbangan baik buruknya perilaku yang diterima oleh masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, yang sesuai dengan nilai yang berbudi luhur. Menurut Pedoman Sekolah yang tercantum dalam Kemendiknas (2010: 9) menyebutkan bahwa terdapat 18 nilai-nilai karakter sebagai berikut:

Tabel 12.1. Nilai-Nilai Karakter

No.	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokrasi	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan

		orang lain.
9.	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya
11.	Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain
14.	Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu

		berypaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggungjawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber: Pedoman Sekolah dari Kemendiknas Tahun 2010

Dari pemaparan di atas kita dapat mengetahui penjelasan dari masing-masing nilai karakter yang ada 18 unsur tersebut. Setiap nilai memiliki penekanan yang berbeda-beda sebagai pedoman berperilaku seseorang. Dari 18 nilai karakter tersebut setiap nilai saling berhubungan dan saling mempengaruhi agar seseorang memiliki kemampuan untuk memiliki dan menerapkan nilai-nilai karakter itu tadi dengan baik. dan nilai-nilai karakter yang diterapkan dalam program pendidikan karakter, yang telah mencakup dari segi agama, budaya serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan diterapkannya nilai-nilai tersebut dalam pendidikan karakter, maka kehidupan yang berhubungan dengan Allah SWT., lingkungan, bangsa dan negara akan menjadi aman dan nyaman. Karena saling memahami dan menghargai satu dengan yang lainnya.

C. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang diimplementasikan dalam bentuk pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dalam setiap satuan pendidikan. Menurut Kemendiknas (2011: 14-16), agar pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara optimal, maka pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sosialisasi ke *stakeholders* (komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga)
2. Pengembangan dalam kegiatan sekolah.
3. Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik dapat menggunakan pendekatan belajar aktif seperti pendekatan belajar kontekstual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran berbasis kerja, dan ICARE (*Intoduction, Connection, Application, Reflection, Extension*) dapat digunakan untuk pendidikan karakter.
4. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar yang dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu:
 - a. kegiatan rutin seperti upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman;
 - b. kegiatan spontan misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
 - c. Keteladanan misalnya nilai disiplin (kehadiran guru yang lebih awal

dibanding peserta didik, kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerja keras dan percaya diri; d. Pengkondisian, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak di sekolah dan di dalam kelas.

5. Kegiatan ko-kurikuler atau ekstrakurikuler. Terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter memerlukan perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan revitalisasi kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.
6. Kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat. Sekolah dapat membuat angket berkenaan nilai yang dikembangkan di sekolah, dengan responden keluarga dan lingkungan terdekat anak/siswa.

D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter di Tingkat Satuan Pendidikan

Pengembangan kurikulum pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan harus melibatkan semua komponen (*stakeholders*), termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri yang meliputi: isi kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

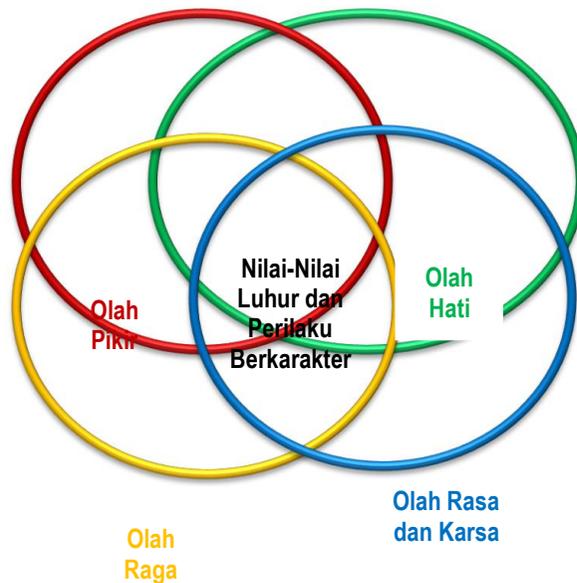
Adapun langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata (2004: 93) terdiri dari beberapa tahapan simultan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan,
2. Menganalisis kebutuhan pendidikan,
3. Menyusun desain kurikulum,
4. Mengvalidasi kurikulum,
5. Mengimplementasi kurikulum,
6. Mengevaluasi kurikulum.

Berdasarkan dari beberapa tahapan pengembangan kurikulum di atas, maka dapat melihat dari berbagai persoalan dalam pencapaian kompetensi, nampaknya diperlukan jalan keluarnya untuk mengantisipasi dari segala masalah dan kesulitan yang ada. Salah satu jalan keluarnya adalah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan, yakni pembentukan karakter peserta didik yang baik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*). Pengembangan dan implementasi

pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada *grand design* tersebut.



Gambar 12.1. Desain Kurikulum Pendidikan Karakter

Sumber Data: www.themegallery.com/Pusat Kurikulum
Balitbang Kemendiknas

Berdasarkan pada trikotomi Bloom, bahwa penerapan kurikulum harus menyentuh disemua aspek dalam pendidikan, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena ini, pembentukan karakter tersebut, bukan hanya pada bentuk pengetahuan (*transfer of knowledge*) saja, akan tetapi harus sampai pada terinternalisasi dan terbiasa (afeksi dan psikomotor). Berdasarkan konsep dari Unesco, bahwa pembentukan karakter tidak hanya berkuat pada *learning to Know* dan *learning to do* saja,

melainkan harus sampai pada *learning to be* dan *learning to life together*.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan melalui pendidikan karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam menyampaikan. Menurut Paul Suparno (2010: 42-44) Ada empat model pendekatan dalam penyampaian pendidikan karakter pada peserta didik, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri (*monolitik*).

Dalam model pendekatan ini, pendidikan karakter dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri. Dalam hal ini pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Konsekuensinya pendidikan karakter harus direncanakan dalam jadwal pelajaran secara terstruktur.

Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum. Penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.

2. Model Terintegrasi dalam Semua Bidang Studi

Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu menjadi tanggung jawab semua guru. Dalam konteks ini setiap guru

dapat memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap guru adalah pengajar pendidikan karakter tanpa kecuali.

Keunggulan model terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap guru ikut bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua siswa, di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter cenderung tidak bersifat informatifkognitif, melainkan bersifat aplikatif sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya siswa akan lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai setting. Sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Namun, menjamin kesamaan bagi setiap guru adalah hal yang tidak mudah, hal ini mengingat latar belakang setiap guru yang berbeda-beda. Di samping itu, jika terjadi perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara guru sendiri akan menjadikan siswa justru bingung.

3. Model di Luar Pengajaran

Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Kelemahannya adalah tidak ada dalam struktur

yang tetap dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah, sehingga akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih banyak.

4. Model Gabungan

Model gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama dengan tim baik oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan karakter merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional, maka sepatutnya pendidikan karakter ada pada setiap materi pelajaran.

Oleh karena itu, pendekatan secara terintegrasi merupakan pendekatan minimal yang harus dilaksanakan semua tenaga pendidik sesuai dengan konteks tugas masing-masing di sekolah, termasuk dalam hal ini adalah konselor sekolah. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan yang paling sesuai adalah dengan model integratif. Pendekatan gabungan tentu akan lebih baik lagi karena siswa bukan hanya mendapatkan informasi semata melainkan juga siswa menggali nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan secara kontekstual sehingga penghayatan siswa lebih mendalam dan tentu saja lebih mengembirakan siswa. Dari perspektif ini maka konselor sekolah dituntut untuk dapat menyampaikan informasi serta mengajak dan memberikan

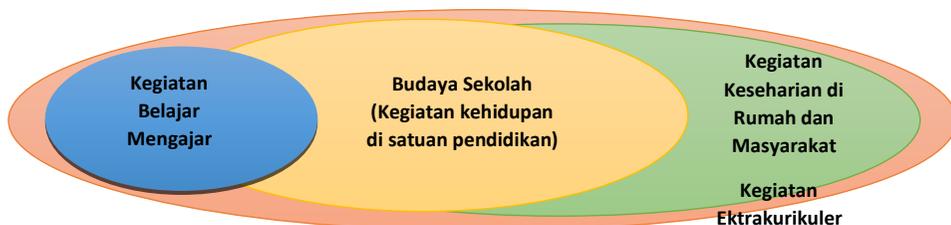
penghayatan secara langsung tentang berbagai informasi nilai-nilai karakter.

E. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menurut Jejen Musfah (2012: 227-230) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu proses pembelajaran langsung, proses pembelajaran tidak langsung dan melalui budaya sekolah. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*. Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap.

Lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosiokultural satuan pendidikan, memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian disatuan pendidikan yang mencerminkan terwujud karakter.

Sedangkan menurut Fasli Jalal (2010: 35) menjelaskan dalam satuan pendidikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dapat terlihat seperti bagan di bawah ini:



Gambar 12.2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah

Sumber Data: Kementerian Pendidikan Nasional

Di lembaga sekolah, pendidikan karakter tidak dimasukkan ke dalam pokok bahasan tertentu tetapi diintegrasikan secara sistematis sesuai dengan perencanaan. Selain itu, pendidikan karakter dilaksanakan melalui 3 segi, yaitu:

1. Kegiatan belajar mengajar

Nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan pada KBM tidak dimasukkan dalam sub pokok bahasan tetapi terintegrasi secara sistematis ke dalam setiap mata pelajaran.

2. Budaya sekolah (kegiatan/kehidupan keseharian di satuan pendidikan)

Hal tersebut dapat terlihat dari pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan, sehingga akan diketahui bagaimana proses pendidikan karakter yang terjadi.

3. Kegiatan ekstrakurikuler

Nilai-nilai pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam ekstrakurikuler sehingga akan terlihat jelas bahwa kegiatan yang diikuti peserta didik dapat mempengaruhi karakter yang dimiliki. Contohnya: pramuka, olah raga, karya tulis, dsb.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni proses pembelajaran langsung yang dapat dilakukan dengan kegiatan belajar mengajar, budaya sekolah dan proses pembelajaran tidak langsung yang dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh. 2015. *Teori Pendidikan Karakter Remaja*. Bandung: Alfabeta.
- Jalal, Fasli. 2010. *Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter*. (http://issuu.com/downloadbse/docs/wamendiknas_di_rembug_nasional_pendidikan_2011) diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.
- Kemendiknas. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Puskur.
- Kesuma, Dharma. 2013. *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Khan, Yahya. 2010. *Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.
- Muhamimin Azzet, Akhmad. 2014. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, H.E. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Musfah, Jejen. 2012. *Pendidikan Holistik: Pendekatan Lintas Perspektif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Paul Suparno, SJ., dkk. 2010. *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salahudin, Anas & Alkrienciehie, Irwanto. 2013. *Pendidikan Karakter (Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samani, Muchlas & Hariyanto. 2013. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2002. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaenul Fitri, Agus. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika Di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Zusnani, Ida. 2012. *Manajemen Pendidikan Berbasis Karakter Bangsa*. Jakarta Selatan: Tugu Publisher.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Siti Yumnah, M.Pd.I lahir di Pasuruan, 30 Maret 1976 memperoleh pendidikan dasar SD Roudlotul Ulum Bangil (SD RDU) 1982-1988. Melanjutkan di MTs Negeri 1 Bangil 1988-1991. Kemudian melanjutkan ke MA Negeri Bangil 1991-1994. Pendidikan Tinggi di tempuh di STAIPANA Bangil 1996-2000 dan melanjutkan ke pascasarjana Universitas Sunan Giri (UNSURI) Surabaya 2005-2007. Lulus Program Doktor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Dan sampai sekarang penulis masih aktif mengajar di perguruan tinggi swasta STAIPANA Bangil.



Khoirul Ulum lahir di Bekasi 2 April 1998, putra pertama dari Muh. Hoiri dan Nasiroh asal suku Madura, Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Jatiranggon 1 Bekasi, pendidikan menengah di Pondok Pesantren Sumurnangka dan SMP At-Tholhawiyah Madura, SMA di Darul Abror Bekasi. Kemudian melanjutkan studi di ibu kota dengan mengambil S-1 fakultas Tarbiyah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta (PTIQ Jakarta). Serta aktif di BEM PTIQ Jakarta pada masanya sebagai kordinator kementerian pendidikan dan kebudayaan 2019-2020 dan turut bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam cabang Jakarta Selatan (HMI MPO Jaksel) selaku kepala bidang intelektual periode 2020-2021. Saat ini penulis juga aktif sebagai guru di MTS Darul Abror Bekasi, serta sedang menempuh jenjang S-2 Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis juga aktif dalam menulis adapun hasil karya

penulis buku yang berjudul Kritik Pendidikan Pembebasan Paulo Freire dalam Perspektif Pendidikan Islam dan STM dalam Bingka Sejarah. Kemudian ada satu jurnal berjudul Kitab Al-'Ain dan Keutamaan Bahasa Arab dalam Al-Qur'an, Penulis juga dapat dihubungi melalui email: khoirull.498@gmail.com



Wonadi Idris, S.Ag, M.Pd menempuh pendidikan di SDN Pagak, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Bangil dan SMAN Bangil setelah itu menempuh S1 di STAI Pancawahana Bangil fakultas Tarbiyah. Sedangkan Magister S2 diperoleh dari Universitas Gresik (Unigres) prodi Manajemen Pendidikan. Sebelum menjadi Dosen tetap di STAI Pancawahana Bangil saat ini, pernah mengajar di SMK Swasta sebagai guru PAI. Selain itu beberapa kegiatan organisasi telah diikuti mulai aktif di organisasi kemahasiswaan hingga saat ini masih aktif di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' (Pergunu) Cabang Bangil.



Dr. Siti Halimah, M.Pd.I lahir di Desa Desa Selotambak Kec. Kraton Kab. Pasuruan. Riwayat pendidikan beliau S1 PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulus 2012, kemudian melanjutkan Studi S2 PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Lulus 2014, dan S3 MPI UIN Kiai Achmad Siddiq Jember 2022. Saat ini beliau menjadi Dosen di STIT PGRI Pasuruan. Selain menjadi Dosen beliau pernah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan profesional seperti Pelatihan Pekerti AI di STKIP PGRI Pasuruan Tahun 2015, Short Course Metodologi Penelitian Islam dan Sains di CRCS UGM Yogyakarta Tahun 2018, Sekolah Metodologi Penelitian CRCS

UGM di Hotel Disaster Oasis Yogyakarta Tahun 2018, Short Course Pengabdian kepada Masyarakat Metode ABCD angkatan Ke-2 Tahun 2020, dan Pelatihan Engagement Academic Writing: Tips-Trik Publis Artikel Pengabdian Masyarakat di Jurnal Nasional bereputasi Tahun 2020



MANSYUR, S.Ag. Merupakan putra pertama dari pasangan ABD RAHMAN dan SAPIYAH, lahir di Pulau Sakala Kec. Sapeken Kab. Sumenep 14 April 1976. Penulis mempunyai satu istri yaitu FATIMAH dan dikarunia 2 anak bernama SOFYA NURUL FAIZAH MR dan M. SOFYAN KHAIRUL FAIZIN MR. Saat ini penulis tinggal di pulau kecil bernama Pulau Pagerungan Besar Kec. Sapeken Kab. Sumenep Jawa Timur. Pekerjaan yang saat ini ditekuni Guru di SMPN 2 Sapeken sekaligus menjadi Plt. Kasek di SMA Islam Pagerungan Besar (SMA IPB). Penulis menempuh pendidikan Dasar di SDN Sakala 2, MTs Al-Hidayah Arjasa Kangean, SMA Ibrahimy Sukorejo-Situbondo, S.1 di IAI Ibrahimy Sukorejo-Situbondo dan saat ini penulis menempuh pendidikan S.2 di IKHAC Pacet-Mojokerto.



Dedi Eko Riyadi HS, M.Pd.I. Lahir di sumenep 29 Desember 1987, dari pasangan bapak Hasanuddin dan Hafidah. Mulai belajar ngaji kepada kedua orang tuanya terutama ibunda tercintanya lalu dilanjutkan kepada Kiai Yasin tepatnya di kampung kelahirannya sendiri. Ia memulai mengenyam pendidikan formal di MI Nurul Islam Bataal Barat Ganding Sumenep, Mts 1 Annuqayah dan MAK Annuqayah sekaligus menjadi santri di PP Annuqayah guluk-

guluk sumenep Madura (2003-2010). Kuliah di STIKA (sekarang INSTIKA) lulus tahun 2010. Melanjutkan ke pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (lulus tahun 2015).

Sekarang aktif menjadi dosen tetap STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep. Di kampus ini ia pernah diberi amanah menjadi Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 2018-2021 dan menjadi Kepala Prodi PGMI 2021-2024.

Selain menulis di jurnal, media, tulisannya juga terdapat di dalam buku berjudul *“Manajemen Masjid: Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid”* yang diterbitkan oleh penerbit CV. Basya Media Utama, 2022. Selain itu, terdapat juga di dalam buku berjudul *“Bunga Mimpi Di Taman Dalail”* terdiri dari penulis bersama dan diterbitkan oleh penerbit Cantrik Pustaka, Yogyakarta, 2022.

Selain aktif mengajar di kampus, ia juga aktif organisasi keguruan yaitu PC PERGUNU Sumenep sebagai. Selain itu juga aktif di PC GP Ansor Sumenep dibidang Riset & Kajian Strategis serta sebagai Tim Instruktur PC GP Ansor Sumenep.



Moh Yasin yang kerap dipanggil Yasin, lahir di Sumenep 5 Mei 1975. Ia sekarang menempuh pendidikan S2 di IKHAC Pacet Mojokerto dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Aktivitas sehari-hari Kepala Sekolah di SDN Nyabakan Timur III Kecamatan BatangBatang Kabupaten Sumenep. Ia juga sudah memiliki sertifikat kepengawasan. Ia adalah seorang penulis yang produktif, sebanyak tiga puluh enam buku sudah ditulisnya dalam bentuk antologi dari berbagai genre tulisan yang diterbitkan oleh Media Guru Indonesia, Omera Pustaka Ajibarang, Kalana Publishing Batam, dan Amerta Media Purwokerto, Banyumas Jawa Tengah. Beberapa penghargaan

sudah diperolehnya, diantaranya Seleksi Nasional Cipta Puisi dengan tema “Pendidikan dan Kemerdekaan” yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Menulis (FIM) Pontianak 2021, Lomba Cipta Puisi dengan tema “Kemerdekaan dan Masa Depan Bangsa” yang diselenggarakan oleh Ikatan Penulis Tanah Laut” Kalimantan Selatan 2021.

Ia juga sudah menghasilkan tulisan solo antara lain : Catatan Guru Dimasa Pandemi Covid 19, INTUISI (kumpulan puisi tentang covid 19), dan Sandiwara Kehidupan (kumpulan puisi). Ia aktif di beberapa komunitas literasi antara lain Ketua Forum Silaturahmi Guru (FSG) Kabupaten Sumenep, Guru Penulis Sumenep (Gupens) dan Rumah Literasi Sumenep (Rulis). Dia bisa dihubungi di :

- Surel mohyasin680@gmail.com
- WhatsApp : 085230437439
- FB : Moh Yasin



Dr. Badrut Tamam, M.Pd.I lahir di Bangkalan Madura, tanggal 05 September 1986, dari pasangan H. Rusdi dan Hj. Nurnawati. Menikah pada tanggal 19 Februari 2016 dengan Mayang Alfina Primadhani, dan dikarunia 3 orang putra-putri, yaitu Nadashofia Khairani Tamam, Nabigh Abdillah Tamam dan Nauriizza Hanin Tamam.

Menyelesaikan Pendidikan SDN Labang Bangkalan Madura, SLTPN 1 Labang Bangkalan Madura, TMI AL AMIEN Prenduan Sumenep Madura, S1 STAIN Samarinda, S2 IAIN Samarinda dan S3 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

Mengawali karir mengajar sebagai tenaga edukatif di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep Madura (2006-2009), Tenaga Edukatif di Pondok Pesantren Darul Fata Loa

Buah, Sei Kunjang Samarinda (2009-2013), Wartawan Majalah Mingguan Bmagazine (2010 -2014), Guru di SD Islam Fastabiqul Khairat Samarinda (2013-2015), Dosen di UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda (2015-Sekarang).

Pencapaian di Tahun 2019 menjadi delegasi Indonesia pada World Muslim Conference (WMC) di Malaysia. Menjadi World Muslim Ambassador dan Speaker di 20th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2021. Yudisi Terbaik Program Pascasarjana Doktoral S3 UIN KHAS Jember 2022.

Karya Buku: Perencanaan Pendidikan Islam penerbit Media Sains Indonesia Tahun 2022, Terimakasih Diriku Sudah Bertahan Sejauh Ini; Alma Pustaka 2022.

Karya Jurnal: Inklusifitas Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren dan Reorientasi Pendanaan Pendidikan Dalam Membangun Mutu Sekolah; Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat; 2018, Implementasi edupreneurship dalam pembentukan karakter sekolah unggul; Ulumuna studi keislaman; 2019, Konsepsi Dan Internalisasi Nilai Power And Authority Dalam Pendidikan Pesantren ; Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan; 2021, Strategi Humas Dalam Internalisasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama Di Ptki Kalimantan Timur; JIEMAN ; 2020, Reorientasi Kurikulum Pai Di Madrasah: Studi Analisis Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam; Reflektika ; 2017, Perspektif Kepemimpinan Qur'ani pada Varian Pesantren Terintegrasi; Managiere 1 (Pascasarjana UIN KHAS Jember) 2022, Islamic Education in National Education Policy of Indonesia; International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR); 2021.



Muhammad Arbain adalah dosen Agama dan Sosial Budaya di Universitas Borneo Tarakan. Selain dosen, ia merupakan penulis produktif multi genre dalam berbagai penulisan buku, baik buku solo maupun kolaborasi dengan penulis lain dalam berbagai proyek riset penulisan buku lintas perguruan tinggi. Pernah menjadi penulis terpilih dalam penulisan Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantara dan Ensiklopedi Budaya Keagamaan Nusantara oleh Puslitbang Lecture Kemenag RI.

Beberapa karya fenomenal yang pernah dituliskan adalah: Buku Pintar Kebudayaan Tidung (*Best Seller* Indonesia-Malaysia), *Shalat for Therapy*, Sang Juara Muda, Manajemen Strategik Peningkatan Mutu Pendidikan Islam, Pendidikan Anti Korupsi, Deradikalisasi di Perguruan Tinggi, Model Pendidikan Islam Berbasis *Blended Learning*, Disrupsi Pendidikan Tinggi di Masa Pandemi, dan lain sebagainya serta aktif menulis berbagai jurnal penelitian baik bereputasi nasional maupun internasional. Dalam pengabdian kepada masyarakat ia aktif bergelut di bidang MTQ menjadi dewan hakim KTIQ, Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI Tarakan, Ketua Umum Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena Kalimantan Utara, dan Pendiri Kampung Literasi Budaya Suku Tidung yang diadaptasi dalam sebuah channel Youtube Taka Sino.



H. Ahmad Abrar Rangkuti, M.A. lahir di Medan, 08 Agustus 1984 dari pasangan Drs. H. Muhammad Sakti Rangkuti, M.A. (ayah) dan Hj. Siti Zahara (Ibu). Penulis bertempat tinggal di Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang dan memiliki keluarga Hj. Nuriftitah, S.K.M. (isteri) serta 3 orang anak, Mahda Iftitah Salwa Rangkuti,

Zul Khairil Abrar Rangkuti, dan Iftitah Nur Alfawza Rangkuti. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Pendidikan S2 penulis ditempuh di IAIN Sumatera Utara. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis merupakan ASN di Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Deliserdang Unit Kerja UPT SPF SMP Negeri 3 Lubuk Pakam sebagai Tenaga pendidik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selain itu, penulis juga mengajarkan Bahasa Arab di MTs Al Washliyah Pulau Gambar Kecamatan Serbajadi. Buku karya antologi penulis berjudul *Dasar-Dasar Pendidikan*, dan *Teori Komunikasi Pendidikan*. Selain mengajar, penulis aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan juga dalam kegiatan *content creator* platform berbagai media sosial. Alamat email penulis abrarrkt@gmail.com.



ISTIFADAH, dilahirkan di Jember, Jawa Timur, 14 April 1968, putri ke dua dari lima bersaudara. Pasangan dari Bapak H.Achmad Saleh Dengan Ibu Hj. Sa`diyah. Alamat Rumah, Perum Puri Cempaka Blok.F30A Gebang-Jember. Hp.082131226897, email: isti68rosyadi@gmail.com.

Pendidikan Tinggi yaitu D2 Seni Musik IKIP NEGERI YOGYAKARTA, lulus tahun 1988, selanjutnya S1 PPKn di IKIP PGRI Jember, lulus tahun 2000. Gelar Magister Pendidikan Islam diraih pada tahun 2012 di Pasca Sarjana STAIN Jember, sementara gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam diperoleh pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Akhmad Siddiq Jember pada tahun 2021.

Karir bermula dari guru honorer di MAN 1 Jember pada tahun 1988 sampai 1992, kemudian diangkat sebagai PNS di MTs N III Jember pada tahun 1992, pada tahun 1998 menjadi guru MTsN II Jember, tahun 2005 diangkat menjadi guru di MAN 2 Jember, Selanjutnya pada tahun 2017 ditempatkan sebagai dosen di Institut Agama Islam Negeri Jember sampai sekarang. Profesi sebagai pelatih musik ditekuninya sejak tahun 1988 di MAN 1 Jember, selanjutnya menekuni sebagai pelatih paduan suara mulai tahun 2005 di MAN 2 Jember dan dilanjutkan menjadi pelatih paduan suara mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sampai sekarang. Nara sumber *conducting* di berbagai lembaga di Kab. Jember. Juri vokal tingkat lokal maupun Nasional. Juara 1 lomba cipta lagu tingkat Jawa-Timur. Selanjutnya beberap kali menjadi pemateri di berbagai instansi di Kabupaten Jember. Aktif menulis buku ber ISBN diantaranya yang telah terbit; Manajemen Ruang di Pondok Pesantren dan Pendidikan Seni untuk Anak Usia Dini.



Jakaria Umro, M.Pd.I Lahir di Pasuruan, 24 Juni 1985. yang biasa dipanggil “Bang Jack” yang hobinya gila bola dan futsal. Riwayat pendidikan jenjang SD di SDN Grati II (lulus tahun 1997) setelah itu melanjutkan pendidikan jenjang SMP di MMP “Darul Ulum” Grati (lulus tahun 2000), sedangkan pendidikan jenjang SMA di MAN Kota Pasuruan (lulus tahun 2003). Kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yakni Pendidikan sarjana strata satu (S1) mengambil Jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang yang lulus tahun 2007 diterima melalui jalur PMDK, sedangkan strata dua (S2) mengambil Program Studi Pendidikan Islam di Pascasarjana Universitas Islam Malang yang lulus tahun

2012. dan sekarang menjadi tenaga pengajar di Prodi Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan, disamping itu juga mengajar pada lintas prodi di Universitas PGRI Wiranegara.